



Analisis Profil Perusahaan/Usaha Indonesia

Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha
SENSUS EKONOMI 2006



**ANALISIS PROFIL
PERUSAHAAN/USAHA
INDONESIA
2006**

<http://www.bps.go.id>

ANALISIS PROFIL PERUSAHAAN/USAHA INDONESIA 2006

ISBN : 978-979-724-904-5
No. Publikasi : 07330.0809
Katalog BPS : 9102004
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 148

Naskah:
Subdirektorat Laporan Statistik

Gambar Kulit:
Subdirektorat Laporan Statistik

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Sensus Ekonomi 2006 (SE06), merupakan sensus ekonomi ketiga setelah tahun 1986 dan 1996, yang merekam kegiatan ekonomi secara komprehensif di seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Informasi yang dihasilkan SE06 diperlukan bagi para pembuat kebijakan guna perencanaan pembangunan karena dapat menggambarkan potensi ekonomi di setiap wilayah bahkan hingga wilayah terkecil di seluruh Indonesia.

Publikasi **Analisis Profil Perusahaan/Usaha di Indonesia, 2006**, menyajikan hasil pendaftaran perusahaan/usaha SE06 seluruh perusahaan/usaha yang dilakukan pada tahun 2006. Publikasi ini memaparkan analisis mengenai jumlah perusahaan/usaha dan tenaga kerja yang dirinci menurut kategori lapangan usaha, skala usaha, lokasi tempat usaha, status badan hukum dan sebagainya. Publikasi ini juga menyajikan gambaran perekonomian Indonesia yang ditinjau dari beberapa indikator makro perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, perdagangan luar negeri dan investasi.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan analisis di masa yang akan datang.

Jakarta, Mei 2008

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Dr. Rusman Heriawan

ANALISIS PROFIL PERUSAHAAN/USAHA INDONESIA 2006

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Slamet Sutomo

Editor : Slamet Sutomo
Sri Indrayanti

Penulis : Lestyowati Endang W
Windhiarso P Adi P
Nursahrizal
Harmawanti Marhaeni
Indah Budiati
Ema Tusianti

Pengolahan Data/ Penyiapan Draft : Tim SE06
Chairul Anam

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
Penjelasan Teknis	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.3 Cakupan dan Ruang Lingkup Penulisan	5
1.4 Metode Analisis	5
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN EKONOMI INDONESIA	
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.2 Laju Inflasi	12
2.3 Produk Domestik Bruto	13
2.4 Perdagangan Luar Negeri	17
2.5 Suku Bunga	19
2.6 Pariwisata	20
2.7 Investasi	20
2.8 Sensus Ekonomi 2006 (SE06)	23
BAB III GAMBARAN USAHA DI INDONESIA	
3.1 Umum	27
3.2 Sebaran Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha ...	29
3.3 Perusahaan/Usaha menurut Lokasi Tempat Usaha	32
3.4 Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha	37
3.5 Perusahaan/Usaha menurut Tahun Mulai Beroperasi	41
3.6 Perusahaan/Usaha menurut Status Badan Hukum/Usaha	43
3.7 Perusahaan/Usaha menurut Klasifikasi Tenaga Kerja	45
3.8 Perusahaan/Usaha menurut Jaringan Perusahaan/Usaha	46
BAB IV GAMBARAN TENAGA KERJA DI INDONESIA	
4.1 Umum	51
4.2 Struktur Tenaga Kerja menurut Pulau	51
4.3 Struktur Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin	53
4.4 Struktur Tenaga Kerja menurut Skala Usaha	55
4.5 Struktur Tenaga Kerja menurut Lokasi Tempat Usaha Perusahaan/Usaha	57
4.6 Struktur Tenaga Kerja pada Perusahaan yang Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum	58
4.7 Struktur Tenaga Kerja menurut Tahun Perusahaan/Usaha Mulai Beroperasi	59

BAB V ANALISIS SEKTORAL

5.1 Umum	63
5.2 Industri Pengolahan (Kategori D)	64
5.3 Konstruksi (Kategori F)	70
5.4 Perdagangan Besar dan Eceran (Kategori G)	74
5.5 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori H)	78
5.6 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (Kategori I)	81
5.7 Perantara Keuangan (Kategori J)	84
6.8 Jasa-jasa (Kategori K sampai P)	86

BAB VI ANALISIS KEWILAYAHAN

6.1 Umum	95
6.2 Komposisi Jumlah Perusahaan/Usaha	97
6.3 Struktur Ketenagakerjaan	105
6.4 Sebaran Penyerapan Tenaga Kerja	111
6.5 Indeks Konsentrasi	116

BAB VII PENUTUP 123

Lampiran 129

Daftar Pustaka 132

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan, 2002-2006 (miliar rupiah)	12
Tabel 2.2.	Laju Inflasi Indonesia menurut Kelompok Barang Kebutuhan, 1999-2006 (%)	13
Tabel 2.3.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2002-2006 (miliar rupiah)	14
Tabel 2.4.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2002-2006 (miliar rupiah)	15
Tabel 2.5.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan, 2002-2006 (miliar rupiah)	16
Tabel 2.6.	Produk Domestik Bruto per Kapita, 2002-2006 (ribu rupiah)	17
Tabel 2.7.	Perkembangan Ekspor Impor Indonesia, 2002-2006 (juta US \$) ...	18
Tabel 2.8.	Perkembangan Suku Bunga Indonesia, 2002-2006 (%)	19
Tabel 2.9.	Perkembangan Wisatawan Mancanegara, 2002-2006 (ribu orang)	20
Tabel 2.10.	Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor, Tahun 2002-2006 (miliar rupiah)	21
Tabel 2.11.	Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui Pemerintah menurut Sektor, Tahun 2002-2006 (juta US \$)	22
Tabel 3.1.	Kontribusi Nilai Tambah Bruto Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2000-2006 (%)	28
Tabel 3.2.	Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha dan Pulau, Tahun 2006	31
Tabel 3.3.	Jumlah Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Lokasi Tempat Usaha, Tahun 2006	32
Tabel 3.4.	Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berlokasi di Tempat Tidak Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha, Tahun 2006	35
Tabel 3.5.	Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berlokasi di Tempat Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Jenis Bangunan Usaha, Tahun 2006	36
Tabel 3.6.	Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Daerah, Tahun 2006	38
Tabel 3.7.	Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Pulau dan Skala Usaha, Tahun 2006	40
Tabel 3.8.	Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha, Tahun 2006	40
Tabel 3.9.	Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dengan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006	42

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.10.	Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Badan Hukum/ Usaha di Indonesia, Tahun 2006	44
Tabel 3.11.	Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Klasifikasi Tenaga Kerja di Indonesia, Tahun 2006	46
Tabel 3.12.	Jumlah Perusahaan/Usaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Jaringan Usaha di Indonesia, Tahun 2006	48
Tabel 4.1.	Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha dan Pulau, Tahun 2006 (orang)	52
Tabel 4.2.	Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2006 (orang)	54
Tabel 4.3.	Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha, Tahun 2006 (orang)	56
Tabel 4.4.	Jumlah Tenaga Kerja menurut Lokasi Tempat Usaha dan Pulau, Tahun 2006 (orang)	57
Tabel 4.5.	Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan/Usaha yang Berlokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Badan Hukum Perusahaan/Usaha, Tahun 2006 (orang)	59
Tabel 4.6.	Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan/Usaha yang Berlokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006 (orang)	60
Tabel 5.1.	Distribusi Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Golongan Pokok dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)	66
Tabel 5.2.	Distribusi Perusahaan/Usaha Industri Pengolahan menurut Umur Perusahaan, Tahun 2006 (%)	69
Tabel 5.3.	Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Golongan dan Kelompok Banyaknya Pekerja, Tahun 2006 (%)	70
Tabel 5.4.	Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Kualifikasi Perusahaan, Tahun 2006 (%)	72
Tabel 5.5.	Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Golongan Pokok dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)	74
Tabel 5.6.	Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Status Badan Hukum dan Golongan Pokok, Tahun 2006 (%)	75
Tabel 5.7.	Jumlah Perusahaan/Usaha, Tenaga Kerja, dan Tenaga kerja per Perusahaan Penyediaan Akomodasi, Tahun 2006	78

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 5.8.	Jumlah Perusahaan/Usaha Tenaga Kerja, Tenaga Kerja dan Rata-rata Tenaga Kerja per Perusahaan, Tahun 2006	80
Tabel 5.9.	Jumlah dan Persentase Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Tahun 2006	81
Tabel 5.10.	Distribusi Perusahaan/Usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurut Status Badan Hukum, tahun 2006 (%)	82
Tabel 5.11.	Distribusi Perusahaan/Usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurut Jaringan, Tahun 2006 (%)	83
Tabel 5.12.	Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan, Tahun 2006	84
Tabel 5.13.	Distribusi Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan menurut Sub Kelompok KBLI dan Jaringan Perusahaan/Usaha, Tahun 2006 (%)	86
Tabel 6.1.	Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)	99
Tabel 6.2.	Distribusi Perusahaan/Usaha di Lokasi Tidak Permanen menurut Provinsi dan Lokasi Usaha, Tahun 2006 (%)	101
Tabel 6.3.	Distribusi Perusahaan / Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Provinsi (%)	102
Tabel 6.4.	Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Kelompok Sektor, Tahun 2006 (%)	104
Tabel 6.5.	Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Provinsi, Tahun 2006 (%)	106
Tabel 6.6.	Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha menurut Lokasi Usaha per Provinsi, Tahun 2006 (%)	107
Tabel 6.7.	Struktur Ketenagakerjaan perusahaan/Usaha menurut Status Badan Hukum per Provinsi, Tahun 2006 (%)	109
Tabel 6.8.	Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha menurut Sektor Ekonomi dan Provinsi, Tahun 2006 (%)	110
Tabel 6.9.	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Per Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Skala Usaha, Tahun 2006 (orang)	112
Tabel 6.10.	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja per Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Lokasi Usaha, Tahun 2006 (orang)	113
Tabel 6.11.	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja per Unit Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Status Badan Hukum, Tahun 2006 (orang) .	114
Tabel 6.12.	Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja per Unit Perusahaan/Usaha Menurut Provinsi dan Sektor Ekonomi, Tahun 2006 (orang)	116
Tabel 6.13.	Indeks Konsentrasi Usaha Menurut Provinsi dan Jenis Indeks, Tahun 2006	118

Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2002-2006	11
Gambar 2.2.	Laju Inflasi Indonesia, 2002-2006	13
Gambar 2.3.	Distribusi Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2006 (%)	14
Gambar 2.4.	Nilai Ekspor dan Impor Indonesia, 2002-2006 (juta US \$)	19
Gambar 3.1.	Distribusi Perusahaan/Usaha, Penduduk dan PDRB menurut Pulau, Tahun 2006 (%)	29
Gambar 3.2.	Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha dan Lokasi Tempat Usaha, Tahun 2006	33
Gambar 3.3.	Distribusi Perusahaan/Usaha yang Berlokasi di Tempat Tidak Permanen menurut Lokasi Tempat Usaha, Tahun 2006	34
Gambar 3.4.	Distribusi Perusahaan/Usaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Jenis Bangunan Usaha, Tahun 2006	36
Gambar 3.5.	Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha, Tahun 2006	39
Gambar 3.6.	Distribusi Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006	43
Gambar 3.7.	Distribusi Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Klasifikasi Tenaga Kerja di Indonesia, Tahun 2006	45
Gambar 4.1.	Distribusi Tenaga Kerja dan Perusahaan/Usaha menurut Pulau, Tahun 2006	52
Gambar 5.1.	Distribusi Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja pada Kategori Industri Pengolahan, Tahun 2006	65
Gambar 5.2.	Distribusi Perusahaan/Usaha Industri Besar Sedang menurut Status Badan Hukum, Tahun 2006 (%)	68
Gambar 5.3.	Distribusi Perusahaan/Usaha Industri Berskala Mikro dan Kecil menurut Status Badan Hukum, Tahun 2006 (%)	69
Gambar 5.4.	Distribusi Perusahaan/Usaha Industri Pengolahan Skala Besar dan Sedang menurut Umur Perusahaan, Tahun 2006 (%)	70
Gambar 5.5.	Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Golongan Pokok, Tahun 2006 (%)	71

Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 5.6.	Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Status Badan Hukum, Tahun 2006 (%)	72
Gambar 5.7.	Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Umur Perusahaan, Tahun 2006 (%)	73
Gambar 5.8.	Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Golongan Pokok, Tahun 2006 (%)	74
Gambar 5.9.	Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Skala Usaha, Tahun 2006 (%)	75
Gambar 5.10.	Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Lokasi Usaha, Tahun 2006 (%)	76
Gambar 5.11.	Komposisi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Kategori dan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006 (%)	77
Gambar 5.12.	Distribusi Perusahaan/Usaha Jasa-jasa menurut Kategori, Tahun 2006 (%)	87
Gambar 5.13.	Komposisi Perusahaan/Usaha Jasa-jasa menurut Kategori dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)	87
Gambar 5.14.	Distribusi Perusahaan/Usaha Jasa-jasa menurut Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006 (%)	89
Gambar 5.15.	Komposisi Perusahaan/Usaha Jasa-jasa menurut Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006 (%)	89
Gambar 6.1.	Sebaran Perusahaan/Usaha Menurut Wilayah, Tahun 2006 (%)	98
Gambar 6.2.	Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha, Tahun 2006 (%)	99
Gambar 6.3.	Distribusi Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Tidak Permanen menurut Lokasi Usaha, Tahun 2006 (%)	100
Gambar 6.4.	Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha (Lokasi Tidak Permanen) menurut Lokasi Usaha, Tahun 2006 (%)	106
Gambar 6.5.	Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha Tidak Berbadan Hukum menurut Provinsi, Tahun 2006 (%)	108
Gambar 6.6.	Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2006 (%)	110

1. Pendaftaran (listing) Perusahaan/Usaha

Sensus Ekonomi 2006 (SE06) merupakan kegiatan yang berskala besar sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kegiatan pendaftaran (*listing*) perusahaan/usaha yang dilakukan pada sekitar pertengahan tahun 2006 merupakan tahap awal dari kegiatan SE06. Kegiatan pendaftaran perusahaan/usaha dilakukan di seluruh lapangan usaha kecuali pertanian dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yang berada dalam wilayah Indonesia. Lapangan usaha yang dicakup meliputi Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa.

Kegiatan pendaftaran perusahaan/usaha dilakukan dengan cara mendatangi setiap perusahaan/usaha. Pendaftaran perusahaan/usaha tersebut menggunakan 2 (dua) macam kuesioner, yaitu daftar **SE06-L1** dan daftar **SE06-L2**. Daftar SE06-L1 digunakan untuk mendaftarkan perusahaan/usaha di lokasi tidak permanen yaitu perusahaan/usaha yang berada di luar bangunan (dengan lokasi tetap ataupun tidak tetap) dan di dalam bangunan tetapi bukan bangunan tempat usaha, seperti :

a. Usaha keliling (lokasi tidak tetap), misalnya pedagang keliling, tukang ojek sepeda motor, jasa semir sepatu keliling, tukang pijat keliling.

Untuk usaha keliling (selain ojek sepeda motor), pendaftaran usahanya dilakukan di rumah tangganya. Untuk usaha ojek sepeda motor didaftarkan di pangkalan ojek.

b. Usaha di luar bangunan dengan lokasi tetap (usaha kaki lima yang berada di pinggir jalan/trotoar).

Pendaftaran usaha dilakukan di lokasi usaha.

c. Usaha di dalam bangunan bukan tempat tinggal dimana tempat usahanya tidak permanen, seperti los di pasar tradisional, usaha di koridor pada stasiun kereta api, usaha pada counter-counter di dalam dan sekitar mall, plaza, dan lain-lain.

Pendaftaran usaha dilakukan di lokasi usaha.

Sementara untuk perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen, yaitu perusahaan/usaha yang berada di dalam bangunan tempat usaha tersendiri dan lokasi tetap, dicatat dengan menggunakan Daftar SE06-L2.

Informasi yang dikumpulkan melalui Daftar SE06-L1 dan Daftar SE06-L2 mencakup nama, alamat, pengusaha, tempat usaha, kegiatan utama, waktu beroperasi, tenaga kerja, aset dan omset perusahaan. Namun, ada tambahan informasi yang dimuat dalam Daftar SE06-L2 yang tidak dimuat dalam Daftar SE06-L1, yaitu bentuk badan hukum/usaha, tahun mulai beroperasi secara komersial dan jaringan perusahaan/usaha.

2. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang diuraikan hanya dibatasi pada istilah yang digunakan dalam analisis ini.

2.1. Umum

Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab/menanggung resiko.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2005 menggunakan kode angka 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi, disamping itu dicantumkan pula kode alfabet yang disebut kategori.

Kategori merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit dengan kode alphabet. Dalam KBLI seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 18 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan Q, dan X sebagai kegiatan yang belum jelas batasannya. Kategori bukan merupakan bagian dari kode KBLI, tetapi dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor/lapangan usaha sehingga dapat dikonversikan ke dalam kode angka satu digit yang disebut sektor/lapangan usaha pada klasifikasi sebelumnya yang menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang aslinya (*nature*) berdasarkan ijin usaha. Jika ada lebih dari satu kegiatan usaha dan *nature*nya tidak tahu, maka kegiatan utama adalah kegiatan yang mempunyai nilai produksi/omset/pendapatan paling besar. Jika nilai produksi/omset/pendapatan sama, maka kegiatan utamanya adalah dari volume terbesar. Jika nilai produksi/omset/pendapatan dan volume sama, maka kegiatan utamanya adalah dari waktu terbanyak untuk proses produksi/operasi. Jika nilai produksi/omset/pendapatan, volume dan waktunya sama, maka kegiatan utamanya berdasarkan pernyataan responden.

Lokasi/Tempat Usaha adalah tempat beroperasi secara *de facto* atau lokasi dimana usaha tersebut dilakukan.

Pekerja : Orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Pekerja Harian Lepas : Pekerja dibayar yang tidak terkait secara tetap dengan perusahaan/usaha, biasanya mereka bekerja selama ada pekerjaan/proyek dan upah yang diterima sesuai dengan jumlah hari kerjanya.

Contoh : tukang kayu, tukang batu, kenek (pembantu tukang).

Pekerja/karyawan Dibayar: Pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja/karyawan Tidak Dibayar: Pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasa aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Skala Usaha dalam SE06, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan perusahaan/usaha dalam empat kategori skala usaha, yaitu : mikro, kecil, menengah, dan besar. Kecuali untuk perusahaan/usaha industri pengolahan, kriteria yang digunakan adalah berdasarkan omset yang dimiliki perusahaan dan kriteria lain yang selama ini digunakan oleh BPS. Pengelompokan berdasarkan omset per tahun adalah sebagai berikut :

- usaha mikro : < Rp. 50 juta
- usaha kecil : Rp. 50 juta - Rp. 1 milyar
- usaha menengah : Rp. 1 milyar – Rp. 3 milyar
- usaha besar : > Rp. 3 milyar

Perusahaan/usaha industri pengolahan menggunakan jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan/usaha. Pengelompokannya sebagai berikut :

- usaha mikro : < 5 orang
- usaha kecil : 5 – 19 orang
- usaha menengah : 20 – 99 orang
- usaha besar : > 100 orang

Penjelasan : perusahaan/usaha yang berstatus cabang/perwakilan/unit pembantu yang hanya melayani perusahaan pusat/induknya tidak dapat ditentukan klasifikasi skala usahanya, karena tidak mempunyai informasi omset.

2.2. Daftar SE06-L1

Usaha Kakilima (K 5) adalah usaha tidak berbadan hukum dengan bangunan dan atau peralatan usaha tidak permanen/menempel, baik lokasinya tetap maupun berpindah-pindah. Sifat usahanya menghadang/menghampiri konsumen serta dalam pengelolaan usaha umumnya menggunakan fasilitas umum (*public utilities*), antara lain bagian jalan/trotoar yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan bukan sebagai peruntukkan tempat usaha, misalnya usaha kakilima/K5 yang berada di pinggir jalan/trotoar.

Usaha di dalam bangunan bukan tempat tinggal dimana tempat usahanya tidak permanen

1. Los-los di pasar tradisional : los sayuran, los ikan, los daging.
2. Usaha yang berada di koridor pada stasiun-stasiun kereta api.

3. Usaha pada counter-counter di dalam dan sekitar Mall, Plaza, ITC, dan lain-lain.

Usaha Keliling adalah usaha yang dalam melakukan aktivitas kegiatannya tidak pada suatu lokasi yang tetap (berpindah-pindah), misalnya:

1. Pedagang keliling : jual sayur keliling, jual perabot keliling, jual bakso keliling.
2. Transportasi : tukang ojek sepeda motor, supir angkutan umum yang bukan karyawan perusahaan angkutan (contoh: supir bis, truk, taksi, bajaj, mikrolet, dll)
3. Jasa - jasa : jasa semir sepatu keliling, jasa pijat keliling, tukang cukur keliling.

Pangkalan ojek adalah tempat berkumpulnya usaha ojek (minimal 2 unit) di lokasi tetap dan beroperasi setiap hari, termasuk yang beroperasi pada hari libur.

2.3. Daftar SE06-L2

Bangunan Tempat Usaha adalah tempat perlindungan permanen maupun tidak permanen pada tempat tetap yang mempunyai pintu keluar/masuk tersendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan yang mempunyai atap, lantai, baik ber dinding maupun tanpa dinding yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Salah satu contoh dari bangunan tempat usaha yaitu mal, supermarket, *department store*, dan *shopping centre* merupakan pasar modern yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi. Pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

Bangunan Khusus Usaha adalah suatu bangunan yang tetap dan digunakan hanya untuk kegiatan usaha.

Bangunan Campuran adalah bangunan yang digunakan baik untuk usaha (sebagian bangunan) maupun tempat tinggal.

Status Badan Hukum/Badan Usaha/Perijinan : PT, Koperasi, CV, Firma, Yayasan, Ijin khusus dari Instansi terkait, Perorangan.

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan usaha yang disebut Badan Hukum adalah usaha yang modalnya dipisahkan, seperti Perum, PT (Persero), PT, BHMN, Koperasi, Yayasan. Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum adalah suatu usaha yang modalnya tidak dipisah, seperti CV, Fa (Firma), dan Perorangan.

Perijinan adalah ijin yang diberikan oleh instansi pemerintah pada perusahaan/usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

Ketentuan :

Penentuan bentuk badan hukum/badan usaha suatu kegiatan ekonomi/usaha yang berstatus cabang, perwakilan dan unit pembantu/pelaksana, mengikuti bentuk badan hukum/badan usaha perusahaan induk atau pusat.

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.

Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV) adalah perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab memberikan modal (uang) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja.

Firma adalah perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang masing-masing merupakan sekutu aktif. Para sekutu harus menyerahkan kekayaannya sesuai yang tertera di akta pendirian.

Yayasan adalah suatu badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.

Ijin khusus dari Instansi Terkait adalah ijin yang dikeluarkan oleh departemen/instansi yang membina, baik dinas tingkat propinsi maupun dinas tingkat kota/kabupaten.

Perorangan adalah suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan ataupun lebih tanpa bentuk badan hukum/usaha.

Jaringan Perusahaan/Usaha ditujukan untuk melihat apakah perusahaan tersebut berdiri sendiri (tunggal) atau memiliki hubungan organisasi secara vertikal dengan perusahaan lain.

Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain dari perusahaan tunggal adalah perusahaan tanpa cabang.

Contoh :

PT. Caltex Pasific Indonesia, meskipun memiliki unit operasional di tempat lain, akan tetapi unit operasional tersebut bukan merupakan cabang dari PT. Caltex.

Kantor Pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/Unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu.

Contoh :

1. PT. Sarinah Jaya (Dept. Store) berkantor pusat di Jl. MH Thamrin memiliki kantor cabang di Jl. Juanda dan memiliki unit pemasaran (Dept. Store) di TMII.
2. PT. Telekomindo Primabhakti (Jasa sambungan telepon bergerak GSM dan pembangunan sarana komunikasi dan paging) berkantor pusat di Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat memiliki cabang di Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan dan Jl. Daan Mogot Jakarta Barat.

Kantor Induk adalah perusahaan yang mempunyai hubungan kerja terhadap kegiatan di tempat lain yang secara administratif melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap seluruh perusahaan di daerah lain, tetapi perusahaan di daerah lain tersebut tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan induk.

Pabrik adalah tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan/proses produksi, yaitu merubah bahan dasar/baku menjadi barang jadi atau setengah jadi (dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih bernilai). Pengertian pabrik tidak harus merupakan bangunan besar yang memiliki mesin-mesin dan ada cerobong asapnya, termasuk juga suatu tempat proses pembuatan barang seperti tempat pembuatan mebel, tempat pembuatan tahu, tempat pembuatan gerabah (bahan-bahan dari tanah liat).

Cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya itu tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

Contoh : Galeria (Pasar Baru) adalah cabang dari PT. Matahari Putra Prima

Penjelasan : Istilah cabang dalam SE06 ini mengandung pengertian umum, artinya penggunaan istilah ini berbeda antara jenis kegiatan ekonomi/usaha, istilah ini digunakan dengan tingkatan lebih rinci. Misalnya cabang utama, cabang, dan cabang pembantu. Jenis kegiatan lain mungkin menggunakan istilah yang berbeda, namun tetap dikategorikan cabang, sejauh memenuhi definisi kantor cabang.

Contoh : UPT Damri dan Kandatel (Kantor Daerah Telekomunikasi).

Perwakilan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari unit kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.

Contoh : CV. SDN (Sampoerna Distribusi Nusantara) merupakan distributor dari produk PT HM. Sampoerna berkantor pusat di Surabaya (kode 2; kantor pusat/induk). CV. SDN ini memiliki kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Kantor Perwakilan CV.SDN di Semarang, Jawa Tengah (kode 5; perwakilan).

Unit Pembantu adalah unit kegiatan ekonomi yang dalam memproduksi barang/jasa terutama untuk keperluan unit kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya, baik kantor pusat, perwakilan, ataupun cabang. Unit pembantu pada umumnya tidak berwenang.

Penjelasan : untuk perusahaan/usaha yang berstatus cabang/perwakilan/unit pembantu yang hanya melayani perusahaan pusat/induknya tidak ditanyakan aset perusahaan/usaha yang dimiliki pada akhir tahun 2005 dan nilai produksi/omset/pendapatan selama tahun 2005.

<http://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik, secara geografis terletak antara 6° 08' Lintang Utara dan 11° 15' Lintang Selatan dan antara 94° 45' dan 141° 05' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1 860 359,67 km². Secara administrasi Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 349 kabupaten, 91 kota, 5 641 kecamatan dan 71 555 desa/kelurahan. Gambaran perekonomian dari wilayah Indonesia yang sangat luas dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam sangat diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Guna memperoleh gambaran berbagai kegiatan ekonomi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan, pada tahun 2006, sensus ekonomi kembali diselenggarakan setelah tahun 1986 dan 1996. Sensus Ekonomi 2006 (SE06) adalah salah satu sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun dengan tahun yang berakhir enam. Sensus Ekonomi bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar yang lengkap, rinci dan *up to date* tentang kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah, karakteristik usaha, dan kegiatan dari semua skala perusahaan/usaha yang bergerak di berbagai lapangan usaha, di luar usaha pertanian. Arti dan peranan SE06 sangat penting dalam mengidentifikasi populasi perusahaan/usaha, memperbaharui direktori perusahaan/usaha, serta mengetahui peta penyebaran perusahaan/usaha menurut provinsi, terutama setelah krisis ekonomi 1997.

Pelaksanaan SE06 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran (*listing*) seluruh kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2006. Tahap kedua adalah pendataan struktur biaya, struktur ketenagakerjaan dan informasi lain pada perusahaan/usaha yang dilakukan pada tahun 2007. Pendataan dilakukan secara sampel pada perusahaan/usaha yang berskala mikro dan kecil dan secara sensus pada perusahaan/usaha yang berskala menengah dan besar. Pendaftaran perusahaan/usaha dilakukan dengan pendekatan usaha (*establishment approach*), mulai dari perusahaan yang

Pendaftaran perusahaan/usaha SE06 dilakukan dengan pendekatan usaha (*establishment approach*) mulai dari perusahaan besar hingga usaha yang dilakukan oleh anggota rumah tangga.

Bagi para pembuat kebijakan, informasi yang dihasilkan SE06 Listing dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan hasil pembangunan serta untuk dasar perencanaan pembangunan selanjutnya.

berskala besar hingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Dari hasil pendaftaran perusahaan/usaha diperoleh sebaran dari perusahaan/usaha dan tenaga kerja menurut provinsi, kategori lapangan usaha, status badan hukum/usaha, skala usaha dan sebagainya.

Gambaran secara komprehensif tentang hasil pendaftaran perusahaan/usaha (SE06-Listing) sangat dibutuhkan bagi semua pihak. Bagi para pembuat kebijakan informasi yang dihasilkan dapat berguna untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta untuk perencanaan pembangunan selanjutnya. Sementara bagi kalangan usaha, dapat menjadi dasar perencanaan untuk pengembangan usaha, pangsa pasar, dan potensi pasar.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan Analisis Profil Perusahaan/Usaha di Indonesia, hasil SE06-Listing adalah untuk :

- memberikan gambaran tentang distribusi perusahaan/usaha dan tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha, lokasi tempat usaha, skala usaha, bentuk badan hukum/usaha, klasifikasi tenaga kerja, dan jaringan usaha
- memberikan gambaran tentang distribusi perusahaan/usaha dan tenaga kerja menurut provinsi
- memberikan gambaran tentang struktur perusahaan/usaha dan tenaga kerja menurut kedalaman KBLI (2 digit atau 3 digit).

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan untuk melihat potensi usaha-usaha yang ada baik secara sektoral maupun secara spasial.

1.3. Cakupan dan Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan profil perusahaan/usaha mencakup seluruh perusahaan/usaha hasil listing SE06. Penulisan disajikan pada tingkat nasional yang akan dirinci menurut provinsi dan karakteristik perusahaan/usaha. Listing SE06 mencakup seluruh perusahaan/usaha tidak termasuk kategori lapangan usaha Pertanian (kategori A dan B) dan kategori lapangan

usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (kategori L), yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kategori lapangan usaha yang dicakup dalam SE06 adalah :

- C. Pertambangan dan Penggalian
- D. Industri Pengolahan
- E. Listrik, Gas dan Air
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan
- H. Hotel dan Restoran
- I. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- J. Perantara Keuangan
- K. Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan
- M. Jasa Pendidikan
- N. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- O. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya
- P. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga.

Hasil analisis dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan perencanaan pembangunan untuk melihat potensi usaha baik secara sektoral maupun spasial.

1.4. Metode Analisis

Analisis Profil Perusahaan/Usaha di Indonesia, tahun 2006 ini sebagian besar menggunakan analisis deskriptif, namun pada analisis kewilayahan (Bab 6) digunakan indeks konsentrasi yang terdiri dari tiga jenis, yaitu indeks pengganda pemanfaatan tenaga kerja (PK), indeks *Location Quotient* (LQ), dan indeks konsentrasi (IK).

1.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat struktur perusahaan/usaha menurut berbagai karakteristik, seperti kategori lapangan usaha, wilayah, skala usaha, lokasi tempat usaha, status badan hukum. Selain struktur perusahaan/usaha, analisis ini juga digunakan untuk melihat penyerapan tenaga kerja.

1.4.2. Analisis Indeks Konsentrasi

Analisis indeks konsentrasi dapat digunakan sebagai dasar suatu perencanaan maupun evaluasi pembangunan wilayah guna mencapai sasaran pembangunan. Ada tiga jenis

Sektor basis adalah sektor-sektor yang secara relatif lebih tinggi di suatu wilayah, sehingga dapat berperan sebagai penggerak utama bagi setiap perubahan dan berpengaruh ganda terhadap wilayahnya.

indeks konsentrasi yang masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan sesuai dengan asumsi dasar dari penggunaan indeks tersebut. Ketiga jenis indeks ini menggunakan istilah sektor basis dan sektor bukan basis. Sektor basis adalah sektor-sektor yang pertumbuhannya secara relatif lebih tinggi di suatu wilayah, sehingga dapat berperan sebagai penggerak utama bagi setiap perubahan dan berpengaruh ganda terhadap wilayahnya. Sedangkan sektor non basis merupakan kebalikan dari sektor basis, yaitu sektor-sektor yang pertumbuhannya relatif lebih rendah.

Indeks Pengganda Pemanfaatan Tenaga Kerja (PK)

Indeks PK adalah suatu angka indeks yang menunjukkan seberapa besar perluasan kesempatan kerja dari perubahan pada sektor basis.

Rumusan indeks PK yaitu :

$$PK = (V_b + V_{nb})/V_b$$

dimana V_b = nilai indikator dari sektor basis

V_{nb} = nilai indikator sektor bukan basis.

Analisis ini menggunakan indikator kesempatan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja) serta sektor basis (berlaku semua wilayah/provinsi) usaha UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), usaha tidak berbadan hukum, dan usaha sektor *manufacturing* dan *services*. Analisis ini melakukan penyederhanaan strata/kategori analisis yaitu dengan membuat perbandingan sektor basis dengan sektor bukan basis menjadi 1:1.

Indeks Location Quotient (LQ)

Indeks LQ adalah suatu angka indeks yang mengukur tingkat spesialisasi (relatif) suatu sektor di suatu wilayah. Pengertian relatif diartikan sebagai tingkat perbandingan suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensinya). Wilayah yang diamati merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas tersebut. (Ghalib, Rusli, 2005)

Rumusan indeks LQ yaitu :

$$LQ = (Vp_b / Vp) / (Vn_b / Vn)$$

dimana Vp_b = nilai indikator dari sektor basis provinsi

Vp = nilai indikator dari provinsi

Vn_b = nilai indikator dari sektor basis nasional

Vn = nilai indikator dari nasional

Analisis ini juga menggunakan indikator-indikator seperti pada indeks pengganda pemanfaatan tenaga kerja. Penyederhanaan strata/kategori analisis dilakukan dengan membuat perbandingan sektor basis dengan sektor bukan basis menjadi 1:1. Apabila $LQ > 1$ maka sektor basis representasinya di atas proporsional (*Over Represented*) di provinsi tersebut, $LQ = 1$ maka sektor basis relatif proporsional (*Proportional*), $LQ < 1$ maka sektor basis dibawah proporsional (*Under Represented*).

Indeks Konsentrasi (IK)

Ada kesamaan antara Indeks Konsentrasi (IK) dengan indeks LQ, namun fokus model ini lebih mengacu kepada rasio angkatan kerja dengan jumlah penduduk.

Rumusan indeks IK yaitu :

$$IK = (Vp_b / Pp) / (Vn_b / Pn)$$

dimana Vp_b = nilai indikator dari sektor basis provinsi

Pp = Jumlah penduduk dari provinsi

Vn_b = nilai indikator dari sektor basis nasional

Pn = Jumlah penduduk dari nasional

Indikator-indikator yang digunakan dalam model analisis ini sama dengan dua model analisis sebelumnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Analisis Profil Perusahaan/Usaha di Indonesia hasil SE06-listing disajikan dalam 7 (tujuh) bab. Uraian tentang latar belakang, tujuan dan ruang lingkup disajikan dalam Bab I Pendahuluan. Kemudian dipaparkan mengenai tinjauan perekonomian Indonesia dilihat dari beberapa indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan luar negeri, yang semuanya disajikan pada Bab II Tinjauan Perekonomian Indonesia.

Gambaran mengenai sebaran perusahaan/usaha menurut kategori lapangan usaha, skala usaha, tahun mulai beroperasi, status badan hukum/usaha, kalsifikasi tenaga kerja dan jaringan usaha disajikan dalam Bab III Gambaran Usaha di Indonesia. Bab IV Gambaran Ketenagakerjaan di Indonesia, memaparkan tentang distribusi tenaga kerja menurut jenis kelamin, kategori lapangan usaha, tahun mulai beroperasi dan status badan hukum/usaha.

Selanjutnya pembahasan mengenai distribusi perusahaan/usaha menurut KBLI 2 atau 3 digit dari masing-masing kategori lapangan usaha disajikan dalam Bab V Analisis Sektoral. Analisis kewilayahan sebagai judul dari Bab VI menguraikan perbandingan antar provinsi. Akhirnya Bab VII Penutup, menguraikan kesimpulan atas penulisan analisis ini.

TINJAUAN EKONOMI

2

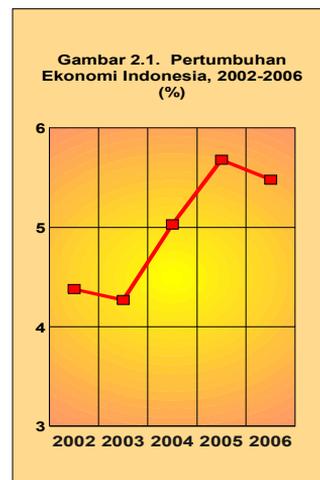
<http://www.bps.go.id>

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2002-2005 selalu mengalami percepatan pertumbuhan. Pada tahun 2003 ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun 2000 tumbuh sebesar 4,72 persen. Pada tahun 2004 diwarnai dengan berlangsungnya proses pemilihan umum dan pemilihan presiden, perekonomian Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 5,03 persen (Tabel 2.1). Demikian pula pada tahun 2005 perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat lagi sebesar 5,68 persen, meski di bawah target pemerintah sebesar 6,0 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2006 sedikit melambat menjadi 5,48 persen, yang berarti di bawah target pemerintah sebesar 6,2 persen. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 (Tabel 2.1) disebabkan melambatnya beberapa sektor, yaitu perdagangan, hotel dan restoran (6,13 persen), keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (5,65 persen), listrik, gas dan air minum (5,87 persen) serta pertambangan dan penggalan (2,21 persen). Kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada *administrative pricing* (kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan tarif dasar listrik) merupakan faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006.

Awal tahun 2006, perekonomian Indonesia masih membawa *carry over* dampak negatif kebijakan fiskal kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005. Imbas dari dampak tersebut masih dirasakan di sepanjang tahun 2006. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dari 3,95 persen pada tahun 2005 menjadi 3,17 persen pada tahun 2006 (Tabel 2.2) sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi sebesar 17,11 persen pada tahun 2005 (Tabel 2.6). Padahal variabel konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 64 persen dalam pembentukan PDB tahun 2005 dan sekitar 63 persen pada tahun 2006 (Tabel 2.5). Rendahnya daya beli masyarakat ini membawa mata rantai dampak yang panjang. Sebagai contoh masalah pendanaan, pihak bank menjadi ragu-ragu untuk

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2006 melambat menjadi 5,48 persen, di bawah target pemerintah sebesar 6,0 persen,



Tabel 2.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2002-2006 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005 ^{x)}	2006 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Peternakan,	232 973,5	240 387,3	247 163,6	253 726,0	261 296,8
Kehutanan dan Perikanan	(3,23)	(3,18)	(2,82)	(2,66)	(2,98)
Pertambangan dan Penggalian	169 932,	167 603,8	160 100,5	165 085,4	168 729,9
	(1,00)	(-1,37)	(-4,48)	(3,11)	(2,21)
Industri Pengolahan	419 388,1	441 754,9	469 952,4	491 421,8	514 192,2
	(5,29)	(5,33)	(6,38)	(4,57)	(4,63)
Listrik, Gas dan Air Minum	9 868,2	10 349,2	10 897,6	11 584,1	12 263,6
	(8,94)	(4,87)	(5,30)	(6,30)	(5,87)
Bangunan	84 469,8	89 621,8	96 334,4	103 483,7	112 762,2
	(5,48)	(6,10)	(7,49)	(7,42)	(8,97)
Perdagangan, Hotel dan	243 409,3	256 516,6	271 142,2	293 877,2	311 903,5
Restoran	(3,90)	(5,38)	(5,70)	(8,38)	(6,13)
Pengangkutan dan Komunikasi	76 173,1	85 458,4	96 896,7	109 467,1	124 399,0
	(8,39)	(12,19)	(13,38)	(12,97)	(13,64)
Keuangan, Persewaan dan	130 928,1	140 374,4	151 123,3	161 384,3	170 495,6
Jasa Perusahaan	(6,37)	(7,21)	(7,66)	(6,79)	(5,65)
Jasa-jasa	138 982,3	145 104,9	152 906,1	160 626,5	170 612,1
	(3,75)	(4,41)	(5,38)	(5,05)	(6,22)
Produk Domestik Bruto	1 506 124,4	1 577 171,3	1 656 516,8	1 750 656,1	1 846 654,9
	(4,38)	(4,72)	(5,03)	(5,68)	(5,48)
Produk Domestik Bruto	1 345 814,2	1 421 474,8	1 506 296,6	1 605 247,6	1 703 086,0
Tanpa Migas	(5,09)	(5,62)	(5,97)	(6,57)	(6,09)

Catatan : angka dalam kurung menunjukkan laju pertumbuhan (y-o-y)

x) angka sementara

xx) angka sangat sementara

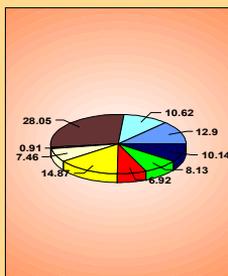
Sumber : BPS

mencairkan kreditnya karena dihindangi kekhawatiran kegagalan pengambilan kredit. Struktur pendapatan perbankan di Indonesia masih lebih membebankan sumber pendapatannya dari bunga (*interest income*) ketimbang dari pendapatan jasa-jasa perbankan.

2.2. Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2006 diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun 2000. Dibandingkan tahun 2005 (y-o-y), seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan, merosotnya daya beli masyarakat mempengaruhi kinerja beberapa sektor ekonomi hingga mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2005, kecuali sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor

Gambar 2.2. Distribusi Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2006 (%)



Bangunan, sektor Jasa-jasa, sektor Pertanian, dan sektor Industri Pengolahan. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Bangunan merupakan sektor-sektor dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing mencapai 13,64 persen dan 8,97 persen pada tahun 2006 (Tabel 2.1), meskipun sumbangannya terhadap pembentukan PDB relatif kecil (Tabel 2.2). Tingginya pertumbuhan sektor Pengangkutan dan Komunikasi terutama disumbang oleh subsektor Telekomunikasi sebagai akibat meningkatnya pemakaian sarana komunikasi oleh masyarakat, menurunnya biaya pulsa, dan meningkatnya dukungan pembiayaan dari perbankan. Sementara tingginya pertumbuhan sektor Bangunan terutama tampak pada perkembangan properti komersial termasuk pusat perbelanjaan, apartemen dan kondominium.

Pesatnya perkembangan properti seperti pusat perbelanjaan, apartemen dan kondominium menyebabkan tingginya pertumbuhan sektor Bangunan.

Pertumbuhan sektor Pertanian meningkat dari 2,66 persen pada tahun 2005 menjadi 2,98 persen pada tahun 2006, terutama terjadi pada subsektor Tanaman Bahan Makanan dan subsektor Perkebunan. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan relatif sama dengan pertumbuhan

Tabel 2.2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan, 2002-2006 (miliar rupiah)

Jenis Penggunaan	2002	2003	2004	2005 ^{x)}	2006 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	920 749,6 (3,84)	956 593,4 (3,89)	1 004 109,0 (4,97)	1 043 805,1 (3,95)	1 076 928,1 (3,17)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	110 333,6 (12,99)	121 404,1 (10,03)	126 248,7 (3,99)	136 424,9 (8,06)	147 563,7 (9,61)
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	307 584,6 (4,69)	309 431,1 (0,60)	354 865,7 (14,68)	389 757,2 (9,93)	404 606,6 (2,91)
a. Perubahan Inventori	13 085,0	45 996,7	25 099,1	18 652,1	13 095,1
b. Diskrepansi Statistik	10 454,6	-26 895,8	8 757,2	4 319,8	24 035,7
Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	566 188,4 (-1,22)	599 516,4 (5,89)	680 621,0 (13,53)	791 995,9 (16,36)	864 503,5 (9,16)
Dikurangi : Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	422 271,4 (-4,25)	428 874,6 (1,56)	543 183,8 (26,65)	635 920,1 (17,07)	684 077,8 (7,57)
Produk Domestik Bruto	1 506 124,4 (4,38)	1 577 171,3 (4,72)	1 656 516,8 (5,03)	1 750 656,1 (5,68)	1 846 654,9 (5,48)

Cata angka dalam kurung menunjukkan laju pertumbuhan (y-o-y)

x) Angka sementara

xx) angka sangat sementara

Sumber : BPS

tahun sebelumnya, yaitu sekitar 4,6 persen yang merupakan pangsa terbesar dalam struktur pertumbuhan. Beberapa subsektor tumbuh melambat terutama terjadi pada kelompok Industri Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya, yang dipengaruhi oleh lemahnya permintaan pasar domestik dan masih terbatasnya dukungan pembiayaan dari perbankan. Sementara itu, pertumbuhan kelompok Industri Makanan, Minuman dan Tembakau meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan terindikasi meningkat pada paruh kedua 2006 didukung oleh mulai pulihnya daya beli masyarakat, penurunan suku bunga, serta masih cukup tingginya permintaan pasar luar negeri. Di sisi lain, beberapa sektor yang berorientasi pada pasar domestik tumbuh melambat, seperti sektor Listrik, Gas dan Air Minum, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Tabel 2.3. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2002-2006 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005 ^{x)}	2006 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	298 876,8 (16,04)	305 783,5 (15,19)	329 124,6 (14,34)	363 928,8 (13,07)	430 493,9 (12,90)
Pertambangan dan Penggalian	161 023,8 (8,64)	167 572,3 (8,32)	205 252,0 (8,94)	308 339,1 (11,07)	354 626,9 (10,62)
Industri Pengolahan	553 746,6 (29,72)	568 920,3 (28,25)	644 342,6 (28,07)	771 724,0 (27,71)	936 361,9 (28,05)
Listrik, Gas dan Air Minum	15 391,9 (0,83)	19 144,2 (0,95)	23 730,3 (1,03)	26 693,5 (0,96)	30 398,5 (0,91)
Bangunan	101 573,5 (5,45)	125 337,1 (6,22)	151 247,6 (6,59)	195 775,9 (7,03)	249 127,8 (7,46)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	314 646,8 (16,89)	335 100,4 (16,64)	368 555,9 (16,05)	430 154,2 (15,45)	496 336,2 (14,87)
Pengangkutan dan Komunikasi	97 970,2 (5,26)	118 916,4 (5,91)	142 292, (6,20)	180 968,7 (6,50)	230 921,6 (6,92)
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	154 442,2 (8,29)	174 074,5 (8,64)	194 410,9 (8,47)	230 587,2 (8,28)	271 543,1 (8,13)
Jasa-jasa	165 602,8 (8,89)	198 825,9 (9,87)	236 870,3 (10,32)	276 789,0 (9,94)	338 385,8 (10,14)
Produk Domestik Bruto	1 863 274,6 (100,00)	2 013 674,6 (100,00)	2 295 826,2 (100,00)	2 784 960,4 (100,00)	3 338 195,7 (100,00)
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	1 700 522,7 (91,27)	1 840 854,9 (91,42)	2 083 077,9 (90,73)	2 467 957,7 (88,62)	2 976 677,3 (89,17)

Catatan :- angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDB

x) angka sementara

xx) angka sangat sementara

Sumber : BPS

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi 2006 digerakkan oleh semua komponen PDB, namun rata-rata tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh meningkat dari 8,06 persen pada tahun 2005 menjadi 9,61 persen pada tahun 2006 dan merupakan komponen dengan pertumbuhan tertinggi (Tabel 2.2). Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB, yaitu sebesar 62,69 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2005 yang kontribusinya mencapai 64,12 persen (Tabel 2.4).

PDB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk Indonesia secara nominal. Perkembangan PDB per kapita atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2002 sampai 2006 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Nilai tambah domestik bruto per kapita penduduk Indonesia atas dasar harga berlaku pada tahun

Tabel 2.4. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan, 2002-2006 (miliar rupiah)

Jenis Penggunaan	2002	2003	2004	2005 ^{x)}	2006 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 231 964,5 (66,12)	1 372 078,0 (68,14)	1 532 888,3 (66,77)	1 785 596,4 (64,12)	2 092 655,7 (62,69)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	132 218,8 (7,10)	163 701,4 (8,13)	191 055,6 (8,32)	224 980,5 (8,08)	288 079,9 (8,63)
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	353 967,0 (19,00)	392 788,6 (19,51)	515 381,2 (22,45)	657 625,1 (23,61)	800 083,5 (23,97)
a. Perubahan Inventori	35 979,5 (1,93)	122 681,9 (6,09)	36 911,1 (1,61)	27 684,5 (0,99)	19 551,5 (0,59)
b. Diskrepansi Statistik	- 5 553,7 (-0,30)	- 185 355,1 (-9,20)	- 87 673,3 (-3,82)	- 30 480,1 (-1,09)	- 22 863,0 (-0,68)
Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	595 514,0 (31,96)	613 720,8 (30,48)	739 639,3 (32,22)	935 959,6 (33,61)	1 030 778,6 (30,88)
Dikurangi : Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	480 815,4 (25,80)	465 940,9 (23,14)	632 376,1 (27,54)	816 405,7 (29,31)	870 090,5 (26,06)
Produk Domestik Bruto	1 863 274,7 (100,00)	2 013 674,6 (100,00)	2 295 826,2 (100,00)	2 784 960,4 (100,00)	3 338 195,7 (100,00)

Catatan : - angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDB

x) angka sementara

xx) angka sangat sementara

Sumber : BPS

2002 sebesar Rp 8,6 juta. Pada tahun 2003 dan 2004, PDB per kapita masing-masing meningkat menjadi Rp 9,4 juta dan Rp 10,6 juta. Selanjutnya pada tahun 2005, PDB per kapita terus meningkat menjadi Rp 12,7 juta, bahkan pada tahun 2006 PDB per kapita Indonesia telah mencapai Rp 15,0 juta atau naik sebesar 18,33 persen (Tabel 2.5).

Tabel 2.5. Produk Domestik Bruto per Kapita, 2002-2006 (ribu rupiah)

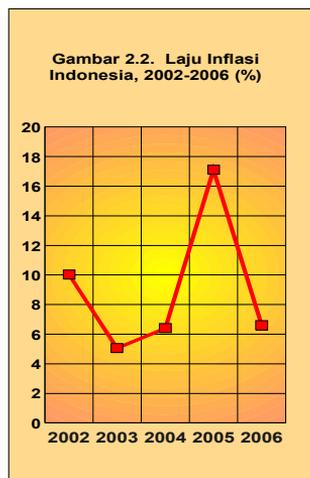
Tahun	PDB per Kapita	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
2002	8 645,1	7 142,7
2003	9 429,5	7 385,5
2004	10 610,1	7 655,5
2005 ^{x)}	12 704,8	7 986,4
2006 ^{xx)}	15 033,4	8 316,3

Catatan : x) angka sementara
 xx) angka sangat sementara

Sumber : BPS

2.3. Laju Inflasi

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diimbangi dengan turunnya laju inflasi pada tahun 2006 yang kembali ke posisi *single digit*. Laju inflasi pada tahun 2006 yang hanya 6,6 persen sangat kontras dibandingkan dengan inflasi tahun 2005 yang merupakan inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Inflasi pada tahun 2006 secara umum dipicu oleh meningkatnya harga beras yang baru terjadi pada bulan-bulan terakhir tahun 2006. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan impor beras namun belum ada efek psikologis yang mempengaruhi pedagang menurunkan harga beras sehingga sampai di penghujung tahun 2006 harga beras masih bertahan di level tertinggi.



Laju inflasi pada tahun 2006 terjadi pada semua kelompok barang kebutuhan dengan laju inflasi tertinggi pada kelompok bahan makanan (*volatile food*) yang

mencapai 12,94 persen. Tingginya inflasi pada kelompok bahan makanan terutama karena meningkatnya harga sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya yang mencapai 29,13 persen. Jika dilihat dari besarnya sumbangan/andil terhadap laju inflasi nasional, kelompok pengeluaran bahan makanan merupakan penyumbang tertinggi sebesar 3,05 persen. Angka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Secara umum, inflasi pada tahun 2006 sebesar 6,6 persen dipicu oleh meningkatnya harga beras pada bulan-bulan terakhir tahun 2006.

Tabel 2.6. Laju Inflasi Indonesia menurut Kelompok Barang Kebutuhan, 1999– 2006 (%)

Tahun/Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	Sandang Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan O,R	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1999	-5,25	3,6	5,23	6,54	3,87	5,29	5,15	2,01
2000	4,00	11,08	10,1	10,19	9,57	17,51	12,66	9,35
2001	12,03	14,48	13,59	8,14	8,92	11,9	14,16	12,55
2002	9,13	9,18	12,71	2,69	5,63	10,85	15,52	10,03
2003	-1,72	6,24	9,21	7,09	5,67	11,71	4,1	5,06
2004	6,38	4,85	7,4	4,87	4,75	10,31	5,84	6,4
2005	13,91	13,71	13,94	6,92	6,13	8,24	44,75	17,11
2006	12,94	6,36	4,83	6,84	5,87	8,13	1,02	6,6
Januari	4,29	0,94	0,7	0,73	1,06	0,2	-0,05	1,36
Pebruari	1,18	0,65	0,55	0,72	0,4	-0,28	0,16	0,58
Maret	-0,88	0,58	0,36	0,15	0,39	0,12	0,13	0,03
April	-0,85	0,43	0,42	0,7	0,58	0,09	0,07	0,05
Mei	0,28	0,3	0,3	2,03	0,57	0,07	0,17	0,37
Juni	1,12	0,26	0,32	-0,08	0,27	0,25	0,1	0,45
Juli	0,99	0,31	0,21	0,36	0,06	0,69	0,08	0,45
Agustus	-0,34	0,35	0,3	0,35	0,33	4,77	0,01	0,33
September	0,62	0,13	0,28	-0,13	0,31	1,84	-0,01	0,38
Oktober	2,17	0,64	0,26	1,00	0,29	0,10	0,46	0,86
Nopember	0,65	0,47	0,29	0,7	0,42	0,03	-0,21	0,34
Desember	3,12	1,11	0,74	0,13	1,05	0,07	0,1	1,21

Sumber: BPS (Indikator Ekonomi & Warta IHK)

2.4. Perdagangan Luar Negeri

Di bidang perdagangan luar negeri, kebijakan-kebijakan selain ditujukan untuk meningkatkan daya saing global produk Indonesia, juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menambah cadangan devisa, dan memperkuat nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut mencakup perdagangan ekspor dan impor, yang merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di bidang perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia selama tahun 2002-2006 menunjukkan gambaran yang cukup mengembirakan. Secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia tetap pada posisi surplus baik pada komoditi migas maupun non migas. Pada tahun 2003 neraca

Neraca perdagangan Indonesia selama 2002-2006 tetap mencatat surplus, baik komoditas migas maupun non migas.



perdagangan Indonesia mencapai surplus US \$ 28,5 miliar atau meningkat 10,20 persen dibandingkan tahun 2002. Nilai ekspor yang cukup tinggi namun diimbangi pula dengan nilai impor yang tinggi menyebabkan neraca perdagangan pada tahun 2004 hanya mencatat surplus US \$ 25,1 miliar atau lebih rendah 12,09 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun neraca perdagangan dua tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 yang mencapai surplus US \$ 39,7 miliar atau naik 42,11 persen dibanding tahun 2005 (Tabel 2.7). Peningkatan surplus ini sudah cukup signifikan, sehingga dapat membantu memperkuat posisi cadangan devisa di tahun depan agar stabilitas rupiah tetap terjaga.

Perkembangan nilai ekspor selama tahun 2002-2006 selalu meningkat setiap tahunnya, rata-rata tumbuh sebesar 15,35 persen per tahun. Selama lima tahun terakhir, total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2005 mengalami peningkatan tertinggi, yaitu sebesar 19,66 persen dibandingkan tahun 2004 dengan nilai ekspor mencapai US \$ 85,7 miliar. Nilai ekspor pada tahun 2006 merupakan rekor tertinggi selama periode yang sama yang mencapai US \$ 100,8 miliar atau naik 17,67 persen. Kinerja ekspor yang cukup baik ini didukung oleh ekspor komoditi non migas yang menghasilkan devisa cukup tinggi. Sebagai penyumbang terbesar ekspor Indonesia, kontribusi ekspor komoditi non migas selama tahun 2002-2006 berkisar antara 77-79 persen. Serupa dengan ekspor, nilai impor Indonesia pada periode yang sama juga meningkat setiap tahunnya. Kenaikan nilai impor yang cukup mengejutkan terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 42,93 persen dengan nilai impor sebesar US \$ 46,5 miliar. Namun pada

Tabel 2.7. Perkembangan Ekspor Impor Indonesia, 2002-2006 (juta US \$)

Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Neraca Perdagangan Luar Negeri	25 869,9	28 507,6	25 060,1	27 959,1	39 733,1
a. Ekspor	57 158,8	61 058,3	71 584,6	85 660,0	100 798,6
b. Impor	31 288,9	32 550,7	46 524,5	57 700,9	61 065,5

Sumber : BPS

tahun 2005 pertumbuhan nilai impor dapat dikendalikan dengan peningkatan sebesar 24,02 persen meskipun masih tergolong cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2006 impor dapat ditekan sehingga hanya naik sebesar 5,83 persen, dengan nilai impor mencapai US \$ 61,1 miliar.

2.5. Suku Bunga

Perkembangan moneter selama tahun 2006 menunjukkan kondisi yang semakin membaik, meskipun pada triwulan awal masih menerapkan kebijakan yang masih ketat (*tight biased*) meneruskan kebijakan tahun sebelumnya akibat dari inflasi yang cukup tinggi. Kebijakan moneter yang ketat tersebut ditempuh dalam rangka mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang ditetapkan. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan mengalami penurunan karena inflasi sudah berhasil dikendalikan. Total penurunan suku bunga SBI dari Januari ke Desember selama tahun 2006 mencapai 300 basis points (bps), yaitu dari 12,75 persen menjadi 9,75 persen. Walaupun demikian, sejak tahun 2005 suku bunga Deposito berjangka Bank Umum 1 bulan mengalami kenaikan setelah dua tahun berturut-turut turun dari 14,41 persen pada tahun 2002 menjadi 6,20 persen pada tahun 2004. Posisi Desember 2006 suku bunga Deposito berjangka Bank Umum 1 bulan mencapai 8,96 persen, meningkat dari posisi Desember tahun sebelumnya yang sebesar 8,36 persen (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Perkembangan Suku Bunga Indonesia, 2002-2006 (%)

Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Umum 1 bulan	14,41	9,70	6,20	8,36	8,96

Sumb : Bank Indonesia

2.6. Pariwisata

Peristiwa gempa bumi di beberapa daerah, kebakaran hutan, wabah flu burung hingga kecelakaan baik darat, laut maupun udara merupakan faktor-faktor penyebab menurunnya jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006.

Pemasukan devisa lainnya yang merupakan salah satu sumber penciptaan lapangan kerja serta kesempatan usaha adalah sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata sangat bergantung pada isu sosial, politik, ekonomi, dan keamanan negara. Peristiwa bom Bali, bencana alam, hingga kenaikan harga BBM yang memicu inflasi menjadi mimpi buruk bagi sektor pariwisata. Kelesuan sektor pariwisata ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia selama periode tahun 2002-2006, meskipun sempat bangkit pada tahun 2004 (Tabel 2.9). Industri pariwisata kembali melemah pada tahun 2005 setelah bom kembali meledak di Bali, tepatnya di Jimbaran dan Kuta yang merupakan tempat favorit para wisman, pada bulan Oktober. Peristiwa ini berdampak pada turunnya jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia menjadi sekitar 5 juta orang atau turun sebesar 6 persen. Jumlah wisman kembali berkurang pada tahun 2006 hingga 2,6 persen, menjadi 4,87 juta orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2006 antara lain karena bencana alam seperti gempa bumi di beberapa daerah, kebakaran hutan, wabah flu burung, hingga kecelakaan baik darat, laut, maupun udara.

Tabel 2.9. Perkembangan Wisatawan Mancanegara, 2002-2006 (ribu orang)

Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Wisatawan Asing	5 033,4	4 467,0	5 321,2	5 002,1	4 871,4

Sumber : BPS

2.7. Investasi

Perkembangan investasi dalam negeri selama periode 2002-2006 cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2006, dimana total rencana Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah meningkat dengan pesat hingga lebih dari tiga kali lipat atau sekitar 221,82 persen dari tahun 2005 menjadi Rp. 162 767,2 miliar. Sektor Industri merupakan sektor yang memperoleh prioritas dalam pembangunan, sehingga sebagian besar dana pembangunan dialokasikan kepada sektor tersebut. Bahkan pada tahun 2003 dan 2006 pengalokasiannya lebih dari 80 persen. Sedangkan sektor yang menempati urutan terendah adalah sektor Lembaga Keuangan, Perasuransian, Real Estate dan Jasa Perusahaan (Tabel 2.10).

Sebagai sektor yang memperoleh prioritas dalam pembangunan, tak heran bila sebagian besar dana pembangunan dialokasikan kepada sektor industri.

Dana yang berasal dari dalam negeri belum cukup memadai untuk membiayai pembangunan di Indonesia yang membutuhkan dana cukup besar, sehingga

Tabel 2.10. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor, Tahun 2002 – 2006 (miliar rupiah)

Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1 470,3 (5,8)	2 057,9 (4,1)	1 847,9 (5,0)	4 493,6 (8,9)	8 767,8 (5,4)
Pertambangan dan Penggalian	703,6 (2,8)	988,9 (2,0)	662,4 (1,8)	982,3 (1,9)	437,4 (0,3)
Industri	15 856,3 (62,8)	40 927,4 (81,7)	20 644,5 (55,6)	26 807,5 (53,0)	131 753,3 (80,9)
Listrik, Gas dan Air	5,4 (0,0)	608,4 (1,2)	8 798,1 (23,7)	6 276,1 (12,4)	7 232,4 (4,4)
Konstruksi	1 623,9 (6,4)	2 061,9 (4,1)	1 473,0 (4,0)	1 537,9 (3,0)	3 028,4 (1,9)
Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Hotel	1 188,5 (4,7)	1 301,8 (2,6)	764,1 (2,1)	4 652,9 (9,2)	9 413,2 (5,8)
Transportasi, Pergudangan dan Perhubungan	3 125,7 (12,4)	2 023,4 (4,0)	1 887,1 (5,1)	2 375,1 (4,7)	1 930,3 (1,2)
Lembaga Keuangan, Perasuransian, Real Estate dan Jasa Perusahaan	3,1 (0,0)	- -	- -	0,0 (0,0)	1,0 (0,0)
Jasa Masyarakat, Sosial dan Perorangan	1 253,7 (5,0)	122,4 (0,2)	1 063,3 (2,9)	3 451,0 (6,8)	203,4 (0,1)
Jumlah	25 230,5 (100,0)	50 092,1 (100,0)	37 140,4 (100,0)	50 576,4 (100,0)	162 767,2 (100,0)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMDN
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

dibutuhkan bantuan dana investasi dari luar negeri selain berupa pinjaman. Investasi asing yang berbentuk Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui oleh pemerintah selama tahun 2002-2006 cenderung fluktuatif pada tiga tahun pertama, namun dua tahun terakhir terus meningkat masing-masing 31,75 persen pada tahun 2005 dan 15,36 persen pada tahun 2006, sehingga rencana PMA pada tahun 2006 yang disetujui pemerintah mencapai US \$ 15 624 juta (Tabel 2.11). Sektor yang paling banyak diminati oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia selama tahun 2003-2006 adalah sektor industri. Hal ini tercermin dari besarnya investasi yang diterima oleh sektor industri selama periode tersebut, yaitu sekitar 44 hingga 53 persen dari total investasi asing.

Tabel 2.11. Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor, Tahun 2002 - 2006 (juta US \$)

Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	458,9 (4,7)	179,2 (1,3)	329,73 (3,2)	606,0 (4,5)	963,5 (6,2)
Pertambangan dan Penggalian	49,3 (0,5)	17,9 (0,1)	66,3 (0,6)	775,9 (5,7)	325,7 (2,1)
Industri	3 258,2 (33,3)	6 574,1 (48,4)	6 336,4 (61,6)	6 028,0 (44,5)	8 307,4 (53,2)
Listrik, Gas dan Air	90,2 (0,9)	362,9 (2,7)	275,5 (2,7)	22,5 (0,2)	1 180,1 (7,6)
Konstruksi	282,1 (2,9)	857,6 (6,3)	954,0 (9,3)	1 772,2 (13,1)	2 561,3 (16,4)
Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Hotel	1 131,0 (11,5)	971,9 (7,1)	1 179,0 (11,5)	884,6 (6,5)	1 427,7 (9,1)
Transportasi, Pergudangan dan Perhubungan	3 713,3 (37,9)	4 340,5 (31,9)	586,5 (5,7)	3 097,0 (22,9)	294,0 (1,9)
Lembaga Keuangan, Perasuransian, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,3 (0,1)	10,4 (0,1)	339,6 (3,3)	124,8 (0,9)	57,2 (0,4)
Jasa Masyarakat, Sosial dan Perorangan	805,1 (8,2)	281,9 (2,1)	212,8 (2,1)	233,0 (1,7)	507,1 (3,2)
Jumlah	9 795,4 (100,0)	13 596,4 (100,0)	10 279,8 (100,0)	13 544,0 (100,0)	15 624,0 (100,0)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMA

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

2.8. Sensus Ekonomi 2006 (SE06)

Terpuruknya perekonomian Indonesia di sepanjang 1998-1999 akibat krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997, pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, peristiwa bencana alam, serta pesatnya perkembangan teknologi telah mewarnai perubahan potret perekonomian Indonesia. Ini berarti, informasi yang dihasilkan Sensus Ekonomi 1996 (SE96) sudah tidak relevan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, setelah satu dasa warsa pelaksanaan SE96, BPS kembali melaksanakan Sensus Ekonomi pada tahun 2006 (SE06). SE06 merekam kegiatan ekonomi secara komprehensif di seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha pertanian dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. SE06 akan menghasilkan potret terkini dan rinci dari perekonomian Indonesia berupa peta dan direktori terpadu perusahaan/usaha, populasi perusahaan/usaha dan penyerapan tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha, wilayah dan berbagai karakteristik lainnya.

GAMBARAN USAHA DI INDONESIA

3

3.1. Umum

Kinerja perekonomian Indonesia selama empat tahun terakhir selalu mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali pada tahun 2005 dimana perekonomian hanya tumbuh sebesar 5,68 persen, tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut terekam pada triwulan terakhir tahun 2005 sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar dua kali lipat pada tanggal 1 Oktober 2005. Kenaikan tersebut membuat daya beli masyarakat turun yang kemudian berimbas pada menurunnya nilai produksi.

Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga konstan 2000 tercatat sebesar 5,48 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua lapangan usaha dan telah membawa perubahan terhadap kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penghitungan PDB yang selama ini memberikan gambaran tentang nilai tambah pada seluruh lapangan usaha akan lebih lengkap bila tersedia juga informasi mengenai populasi perusahaan/usaha yang bergerak di setiap lapangan usaha. Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 (SE06), informasi yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang keberadaan setiap kategori lapangan usaha, baik secara nasional maupun regional.

Informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan pendaftaran perusahaan/usaha SE06, diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang keberadaan setiap kategori lapangan usaha secara nasional dan regional.

Disamping perusahaan/usaha yang berada di lokasi permanen yang eksistensinya lebih diakui oleh pelaku ekonomi, gambaran usaha di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari banyaknya usaha yang dilakukan di lokasi yang tidak permanen, seperti pedagang keliling, ojek sepeda motor, sopir angkutan umum yang bukan buruh/karyawan perusahaan angkutan dan usaha jasa, seperti tukang cukur, tukang pijat keliling, jasa semir sepatu keliling, dan lain-lain. Juga usaha di luar bangunan dengan lokasi tetap, seperti pedagang kaki lima, serta usaha-usaha yang berada dalam bangunan bukan tempat tinggal, yang tempat usahanya tidak permanen, seperti di los-los pasar,

koridor stasiun dan *counter-counter* di mal/plaza. Seberapa besar kontribusi perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi tidak permanen dan di lokasi permanen akan dibahas dalam bab ini.

Di tengah hantaman krisis ekonomi, usaha kecil dan menengah mampu bertahan bahkan berkembang dengan cukup baik.

Prioritas pembangunan yang selama ini lebih menguntungkan pelaku ekonomi dengan skala besar/menengah, ditengarai telah gagal membawa perekonomian Indonesia menuju kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia, karena dalam sekejap telah dihempas badai krisis ekonomi yang memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Namun sebaliknya, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) justru mampu membuktikan ketangguhannya di tengah hantaman krisis ekonomi, dimana UKM mampu bertahan dan berkembang dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peran UKM dalam struktur ekonomi yang cukup besar dalam pembentukan nilai tambah PDB.

Selain sebaran perusahaan/usaha menurut lokasi usaha dan skala usaha, bab ini juga akan menguraikan tentang sebaran perusahaan/usaha berdasarkan tahun mulai beroperasi, jumlah tenaga kerja, jaringan usaha, dan sebaran perusahaan/usaha yang berbadan hukum menurut kategori lapangan usaha.

Tabel 3.1. Kontribusi Nilai Tambah Bruto Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2000-2006 (%)

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	14,90	14,64	14,83	14,58	13,75	12,53	12,34
Pertambangan dan Penggalian	0,99	1,00	1,02	1,05	1,05	1,11	1,21
Industri Pengolahan	7,17	7,56	7,55	7,46	7,17	6,71	6,65
Listrik, Gas dan Air	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Bangunan	3,66	3,79	4,01	4,13	4,33	4,65	4,92
Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,54	15,47	16,50	16,00	15,43	14,88	14,34
Pengangkutan dan Komunikasi	2,81	2,88	3,10	3,36	3,31	3,43	3,69
Jasa-jasa	4,15	4,09	4,30	4,61	4,82	4,86	4,88
Produk Domestik Bruto (PDB)	54,69	54,81	56,84	56,81	55,38	53,54	53,28
PDB Tanpa Migas	54,56	54,70	56,84	56,73	55,30	53,43	53,19

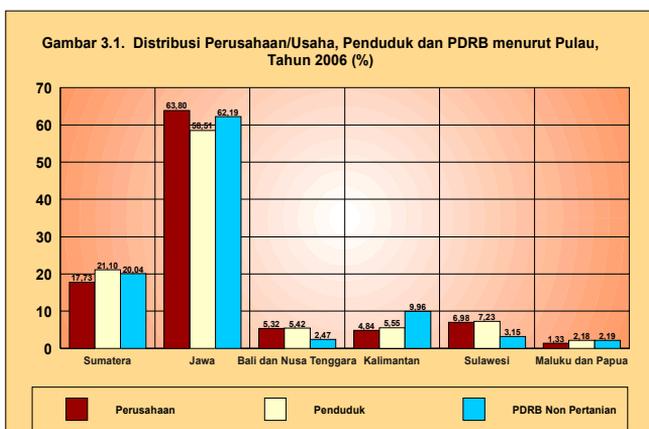
Sumber : BPS

3.2. Sebaran Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha

Guna penyeragaman pengelompokan berbagai kegiatan ekonomi, BPS telah menyusun Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) tahun 1977, 1983, 1990 dan 1997. Pada tahun 2000 dan 2005, KLUI berubah menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang mengikuti "International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)" Revisi ke-3 tahun 1990, sehingga struktur dan pemberian kodenya agak berbeda dengan KLUI sebelumnya. Dengan adanya penyeragaman tersebut, keterbandingan data kegiatan ekonomi antar waktu, antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional dapat dilakukan.

Struktur jumlah perusahaan/usaha di Indonesia berdasarkan hasil SE06 dapat memberikan gambaran kategori lapangan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan yang mengacu pada tingkat efisiensi, efektifitas dan daya saing. Pulau Jawa sebagai sentral perekonomian Indonesia merupakan tempat paling dominan berlokasinya sejumlah perusahaan/usaha. Distribusi persentase PDRB untuk kategori lapangan usaha Non Pertanian di Indonesia memberikan gambaran Pulau Jawa masih sangat dominan dalam peranannya terhadap pembentukan PDRB Nasional sebesar 62,19 persen, disusul Sumatera yang mencapai 20,04 persen dan terkecil adalah Maluku dan Papua sebesar 2,19 persen. Angka selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambaran kategori lapangan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan yang mengacu pada tingkat efisiensi, efektivitas dan daya saing dapat dilihat dari struktur jumlah perusahaan/usaha di Indonesia.



Hasil pendafataran SE06 menunjukkan empat kategori lapangan usaha mendominasi perusahaan/usaha di Indonesia, masing-masing Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.

Dikaitkan dengan distribusi perusahaan/usaha menurut pulau, seyogyanya kontribusi jumlah perusahaan/usaha di Pulau Jawa sejalan dengan kontribusi nilai tambah bruto dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang dominan terhadap PDB, sejalan pula dengan kontribusi penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Gambar 3.1. menunjukkan bahwa sekitar 63,80 persen perusahaan/usaha berlokasi di Pulau Jawa sejalan dengan sebaran penduduk di Indonesia, yaitu lebih dari 50 persen penduduk berdomisili di Pulau Jawa. Jumlah perusahaan/usaha di Pulau Sumatera menduduki tempat kedua dengan 17,73 persen. Selebihnya tersebar di Pulau Bali dan Nusa Tenggara (5,32 persen), Pulau Kalimantan (4,84 persen), Pulau Sulawesi (6,98 persen), dan Pulau Maluku dan Papua (1,33 persen).

Berdasarkan hasil SE06 pada Tabel 3.2, dari 22,74 juta perusahaan/usaha yang ada di Indonesia, lebih dari 80 persen di dominasi oleh empat kategori lapangan usaha, masing-masing Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; serta Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi. Jumlah perusahaan/usaha di kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran mencatat kontribusi terbesar yaitu 45,32 persen dari seluruh perusahaan/usaha yang ada. Sementara tiga kategori lapangan usaha yang lain berkisar dari 11,89 persen hingga 14,20 persen. Dari tiga belas kategori lapangan usaha, jumlah perusahaan di lima kategori lapangan usaha, masing-masing Listrik, Gas dan Air; Konstruksi; Perantara Keuangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga kontribusinya hanya kurang dari satu persen.

Dari seluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, perusahaan/usaha Perdagangan Besar dan Eceran selalu mendominasi di setiap pulau. Hal ini menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha ini terutama usaha perdagangan eceran banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena selain mudah dilakukan, hanya membutuhkan sedikit modal dan keterampilan yang minim. Namun, bukan

berarti usaha ini tidak ada yang membutuhkan modal besar dan ketrampilan khusus.

Urutan kedua setelah kategori lapangan usaha perdagangan, ternyata berbeda untuk setiap pulau. Perusahaan/usaha Industri Pengolahan mencatat urutan kedua di Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Sulawesi. Sementara di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan, terbanyak kedua adalah perusahaan/usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Urutan terbanyak kedua di Pulau Maluku dan Papua cenderung pada kategori lapangan usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha dan Pulau, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku dan Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C	34 060	136 497	26 797	27 679	12 472	9 407	246 912
D	404 827	2 162 235	278 847	121 019	231 562	30 981	3 229 471
E	5 603	3 747	886	1 376	2 338	550	14 500
F	44 272	51 418	20 164	19 636	25 399	4 017	164 906
G	2 016 513	6 251 351	521 923	539 615	815 759	159 286	10 304 447
H	490 006	2 187 063	89 294	133 443	100 597	14 343	3 014 746
I	436 647	1 746 978	138 417	98 762	229 599	52 141	2 702 544
J	14 898	47 873	7 944	4 078	7 790	1 026	83 609
K	132 379	539 594	40 836	49 032	37 772	9 137	808 750
M	69 417	200 239	17 309	20 584	27 173	6 833	341 555
N	40 218	103 198	10 034	12 131	10 915	2 391	178 887
O	272 591	990 365	55 332	65 683	72 943	9 840	1 466 754
P	70 517	85 290	2 766	7 655	11 598	1 881	179 707
Jumlah	4 031 948	14 505 848	1 210 549	1 100 693	1 585 917	301 833	22 736 788
Persentase	17,73	63,80	5,32	4,84	6,98	1,33	100,00

Catatan :

C : Pertambangan dan Penggalian

D : Industri Pengolahan

E : Listrik, Gas dan Air

F : Konstruksi

G : Perdagangan Besar dan Eceran

H : Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum

I : Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

J : Perantara Keuangan

K : Real Estate dan Usaha Persewaan

M : Jasa Pendidikan

N : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

O : Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya

P : Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Sumber : diolah dari SE06-Listing

3.3. Perusahaan/Usaha menurut Lokasi Tempat Usaha

Penentuan lokasi tempat usaha dilakukan secara *de facto* yaitu lokasi dimana usaha tersebut dilakukan. Instrumen yang digunakan dalam mendaftarkan perusahaan/usaha menyesuaikan dengan lokasi tempat usaha. Daftar SE06-L1 digunakan untuk mendaftarkan perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi tidak permanen, sedangkan Daftar SE06-L2 untuk perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen.

Secara umum perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat permanen merupakan usaha yang eksistensinya lebih diakui oleh para pelaku ekonomi dibandingkan perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen, karena keberadaannya dapat ditelusuri dengan mudah dan cepat mengingat perusahaan tersebut berada di dalam bangunan tempat usaha tersendiri dan berlokasi tetap. Berdasarkan hasil pencacahan SE06, jumlah perusahaan/usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berlokasi di tempat permanen sekitar 12,9 juta perusahaan

Tabel 3.3. Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha dan Lokasi Tempat Usaha, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Lokasi Tempat Usaha Tidak Permanen	Lokasi Tempat Usaha Permanen	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Pertambangan dan Penggalian	0	246 912	246 912
D. Industri Pengolahan	51 366	3 178 105	3 229 471
E. Listrik, Gas dan Air	184	14 316	14 500
F. Konstruksi	4 517	160 389	164 906
G. Perdagangan Besar dan Eceran	5 159 358	5 145 089	10 304 447
H. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1 759 240	1 255 506	3 014 746
I. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2 272 706	429 838	2 702 544
J. Perantara Keuangan	5 306	78 303	83 609
K. Real Estate dan Usaha Persewaan	5 731	803 019	808 750
M. Jasa Pendidikan	186	341 369	341 555
N. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11 023	167 864	178 887
O. Jasa Kmsyrktan, SosBud, Hib.& Perorgn Lainnya	356 361	1 110 393	1 466 754
P. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	158 357	21 350	179 707
Jumlah	9 784 335	12 952 453	22 736 788
Persentase	43,03	56,97	100,00

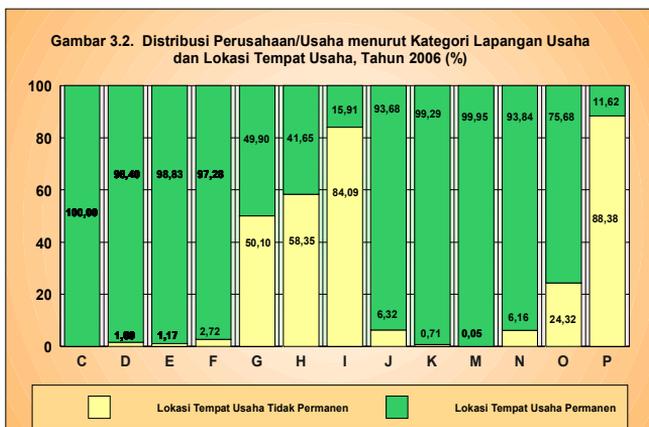
Sumber : diolah dari SE06-Listing

atau 56,97 persen dari seluruh perusahaan/usaha, sementara sekitar 9,8 juta perusahaan (43,03 persen) menjalankan kegiatannya di tempat tidak permanen.

Bila tempat usaha di lokasi tidak permanen dijadikan sebagai salah satu kriteria usaha sektor informal, maka secara umum gambaran usaha di Indonesia hasil SE06 menunjukkan bahwa usaha-usaha informal masih menjadi pilihan penduduk Indonesia untuk mencari nafkah. Tabel 3.3. menunjukkan, dari seluruh perusahaan/usaha yang berusaha di tempat tidak permanen, sekitar 52,73 persen dilakukan oleh usaha pada kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sekitar 5,2 juta perusahaan/usaha, 23,23 persen oleh usaha pada kategori lapangan usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, serta usaha pada kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sekitar 17,98 persen. Selebihnya tersebar di kategori lapangan usaha lainnya, yang jumlahnya relatif sedikit.

Perusahaan/usaha perdagangan besar dan eceran yang berusaha di lokasi tidak permanen mencatat kontribusi tertinggi yaitu 52,73 persen.

Bila dilihat jumlah perusahaan/usaha pada masing-masing kategori lapangan usaha menurut lokasi tempat usaha, Gambar 3.2. menunjukkan bahwa usaha pada empat kategori lapangan usaha, yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran (G), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (H), Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (I) serta Jasa Perorangan yang melayani rumahtangga (P) mencatat lebih dari 50 persen



menjalankan usahanya di lokasi tempat tidak permanen. Bahkan kategori lapangan usaha Jasa Perorangan yang Melayani Rumahtangga mencapai 88,12 persen, serta kategori lapangan usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi mencatat kontribusi 84,10 persen. Sebaliknya, kecuali kategori lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan yang memang hanya dilisting dengan daftar SE06-L2 (tempat permanen), delapan kategori lapangan usaha selebihnya mayoritas dilakukan di tempat permanen (lebih dari 75 persen).

Lebih dari 70 persen perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen merupakan usaha keliling (42,23 persen) dan usaha kaki lima (31,61 persen).

Gambar 3.3. dan Tabel 3.4 menunjukkan bahwa dari seluruh perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen, 7,2 juta perusahaan/usaha atau lebih dari 70 persen merupakan usaha keliling dan usaha kaki lima, masing-masing sebesar 42,23 persen dan 31,61 persen. Sementara itu, meskipun berada di dalam bangunan bukan tempat tinggal, namun karena tempat usahanya tidak permanen, maka usaha di koridor dan los dikategorikan sebagai usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen, ada sekitar 1,3 juta perusahaan/usaha atau 13,25 persen dari seluruh usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen. Sedangkan usaha ojek di pangkalan tercatat sekitar 1,3 juta usaha (12,91 persen).

Perusahaan/usaha yang dilakukan di lokasi yang permanen, terdiri dari dua lokasi, yaitu usaha yang dilakukan di bangunan campuran dan usaha yang dilakukan di bangunan khusus untuk usaha. Dari 13

Gambar 3.3. Distribusi Perusahaan/Usaha yang Berlokasi di Tempat Tidak Permanen menurut Lokasi Tempat Usaha, Tahun 2006 (%)



kategori lapangan usaha yang dilisting pada SE06, delapan diantaranya lebih banyak yang melakukan kegiatan ekonominya pada bangunan campuran. Sementara sisanya sebagian besar mempunyai bangunan khusus untuk usaha, seperti kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Perantara Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Jasa Pendidikan.

Sementara itu, dari 12,9 juta perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat permanen, menunjukkan bahwa kontribusi perusahaan/usaha yang menempati bangunan campuran sebanyak 7,5 juta perusahaan/usaha (57,60 persen), sisanya menempati bangunan khusus usaha. Bila dilihat jumlah perusahaan/usaha pada masing-masing kategori lapangan usaha yang berlokasi di tempat permanen, mayoritas (lebih dari 65 persen) yang memilih berusaha di bangunan khusus usaha adalah perusahaan/usaha kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan (87,40

Tabel 3.4. Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berlokasi di Tempat Tidak Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Lokasi Tempat Usaha				Jumlah
	Keliling	Usaha K-5	Pangkalan	Los/Koridor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D. Industri Pengolahan	7 475	36 001	-	7 890	51 366
E. Listrik, Gas dan Air	115	41	-	28	184
F. Konstruksi	491	3 955	-	71	4 517
G. Perdagangan Besar dan Eceran	1 894 302	2 161 492	-	1 103 564	5 159 358
H. Akomodasi dan Makan Minum	855 667	759 736	-	143 837	1 759 240
I. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	985 927	16 607	1 263 511	6 661	2 272 706
J. Perantara Keuangan	5 188	117	-	1	5 306
K. Real Estate dan Usaha Persewaan	3 241	2 010	-	480	5 731
M. Jasa Pendidikan	126	33	-	27	186
N. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10 051	485	-	487	11 023
O. Jasa Kmsyrktan, SosBud, Hib.& Perorgn Lainnya	215 526	110 062	-	30 773	356 361
P. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	153 672	2 444	-	2 241	158 357
Total	4 131 781	3 092 983	1 263 511	1 296 060	9 784 335

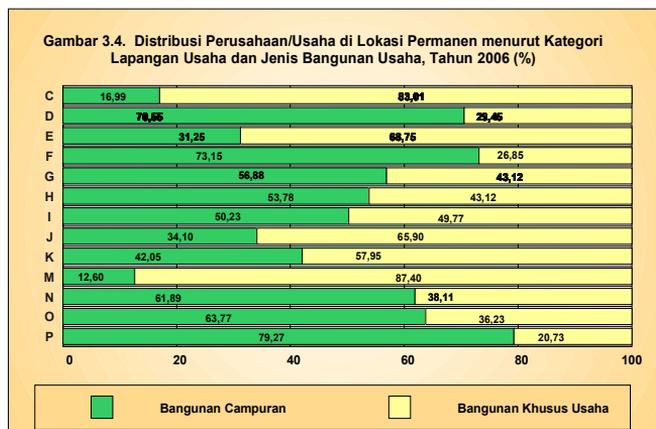
Sumber : diolah dari SE06-Listing

Tabel 3.5. Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berlokasi di Tempat Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Jenis Bangunan Usaha, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Bangunan Campuran	Bangunan Khusus Usaha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
C Pertambangan dan Penggalian	41 960	204 952	246 912
D Industri Pengolahan	2 242 080	936 025	3 178 105
E Listrik, Gas dan Air	4 474	9 842	14 316
F Konstruksi	117 326	43 063	160 389
G Perdagangan Besar dan Eceran	2 926 715	2 218 374	5 145 089
H Akomodasi, Makan dan Minum	675 208	580 298	1 255 506
I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	215 929	213 909	429 838
J Perantara Keuangan	26 698	51 605	78 303
K Real Estate dan Usaha Persewaan	337 695	465 324	803 019
M Jasa Pendidikan	43 022	298 347	341 369
N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103 898	63 966	167 864
O Jasa Kmsyrktan, SosBud, Hib. & Perorangan Lainnya	708 047	402 346	1 110 393
P Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	16 925	4 425	21 350
Jumlah	7 459 977	5 492 476	12 952 453

Sumber : diolah dari SE06-Listing

persen), Pertambangan dan Penggalian (83,01 persen), Listrik, Gas, dan Air (68,75 persen) dan Perantara Keuangan (65,90 persen). Sementara perusahaan/usaha yang mayoritas (lebih dari 60 persen) lebih banyak berusaha di bangunan campuran adalah kategori lapangan usaha Jasa Perorangan yang Melayani Rumahtangga (79,27 persen), Konstruksi (73,15 persen), Industri Pengolahan (70,55 persen), Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya (63,77 persen), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (61,89 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5.



3.4 Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha

Tidak adanya keseragaman definisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Usaha Menengah dan Besar (UMB) yang diakui oleh semua departemen, instansi pemerintah, serta swasta menyebabkan jumlah perusahaan/usaha berdasarkan skala usaha berbeda-beda mengikuti kriteria yang digunakan. Berbedanya kriteria yang digunakan ini mengakibatkan kebijakan yang diambil hanya terbatas pada kepentingan pihak tertentu tidak dapat mengakomodir kepentingan pelaku ekonomi secara menyeluruh.

Dalam SE06, pengelompokan perusahaan/usaha dibedakan menjadi empat skala usaha, yaitu mikro, kecil, menengah, dan besar. Kriteria pengelompokan tersebut menggunakan beberapa karakteristik, seperti tenaga kerja (khusus untuk kategori lapangan usaha Industri Pengolahan) dan omset perusahaan/usaha selama setahun (di luar kategori lapangan usaha Industri Pengolahan). Disamping itu, pengelompokan juga mempertimbangkan kriteria yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seperti identifikasi hotel berbintang (1 hingga 5) atau melati pada kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Kriteria pengklasifikasian skala usaha dalam SE06 menggunakan tenaga kerja (khusus industri pengolahan), omset selama setahun dan kriteria lainnya yang digunakan BPS.

Istilah UMK dan UMB baru diperkenalkan pada sosialisasi hasil SE06-listing yang sudah dimuat pada Berita Resmi Statistik (BRS) edisi Januari 2007. Namun, istilah yang lebih dahulu populer adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Besar (UB). Posisi UKM diakui makin penting dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial Indonesia. Tak heran, bila pengembangan UKM menjadi salah satu *platform* dari agenda pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Menurut Berry dan H.Sandeem, setidaknya ada tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang penting keberadaan UKM, yaitu :

1. Kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.
2. Sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi.

3. UKM diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

Usaha-usaha berskala mikro dan kecil mendominasi perusahaan/usaha di Indonesia, yaitu sebesar 99,03 persen (22,52 juta perusahaan/usaha).

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa distribusi jumlah perusahaan/usaha menurut skala usaha di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha berskala mikro dan kecil dengan kontribusi sebesar 99,03 persen, yaitu sekitar 22,52 juta perusahaan/usaha. Selebihnya merupakan perusahaan/usaha yang berskala menengah 164.839 perusahaan, dan berskala besar sebanyak 44.048 perusahaan/usaha.

Bila dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, perusahaan/usaha dengan skala besar mendominasi keberadaannya di daerah perkotaan, yaitu mencapai 38.735 perusahaan/usaha atau 87,94 persen dari seluruh perusahaan/usaha berskala besar. Demikian pula dengan perusahaan/usaha berskala menengah di perkotaan mencapai 130.472 perusahaan/usaha (79,15 persen). Hal ini bisa dipahami, mengingat berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan usaha lebih mudah diperoleh di perkotaan. Sementara, jumlah perusahaan/usaha berskala kecil dan mikro tidak terlalu signifikan antara yang berada di perkotaan dengan di perdesaan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa secara umum, gambaran perusahaan/usaha Indonesia didominasi oleh usaha-usaha berskala mikro dan kecil.

Tabel 3.6. Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Daerah, Tahun 2006

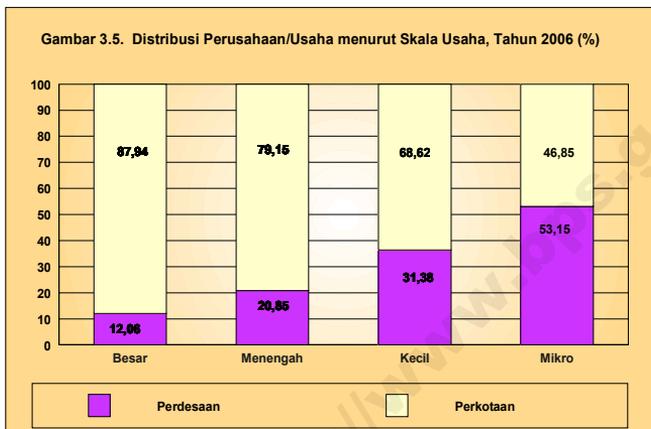
Klasifikasi Daerah	Skala Usaha				Tidak dpt di Klasifikasikan	Jumlah
	Besar	Menengah	Kecil	Mikro		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	38 735 (87,94)	130 472 (79,15)	2 461 717 (68,62)	8 867 479 (46,85)	9 234 (76,27)	11 507 637 (50,61)
Perdesaan	5 313 (12,06)	34 367 (20,85)	1 125 857 (31,38)	10 060 741 (53,15)	2 873 (23,73)	11 229 151 (49,39)
Perkotaan + Perdesaan	44 048 100,00	164 839 100,00	3 587 574 100,00	18 928 220 100,00	12 107 100,00	22 736 788 100,00

Catatan : - tidak dapat diklasifikasikan adalah perusahaan/usaha yang berstatus cabang, perwakilan, perusahaan pusat/induk dan unit pembantu yang hanya melayani
- Angka dalam kurung menunjukkan persentase

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Struktur usaha seperti inilah yang membentuk pola perekonomian Indonesia. Manajerial yang baik, pengelolaan aset dan omset usaha serta pembinaan yang dilakukan terus menerus, akan menghasilkan perekonomian yang kuat meskipun hanya ditopang oleh usaha-usaha berskala mikro dan kecil. Hal ini sudah dibuktikan dari kokohnya usaha seperti ini dalam melalui krisis ekonomi pada periode 1997-1999 yang lalu. Bila dilihat distribusinya menurut pulau, polanya sejalan dengan struktur usaha di tingkat nasional, dimana usaha mikro dan kecil mendominasi perusahaan/usaha di masing-masing pulau.

Mudahnya memperoleh berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan usaha di perkotaan menyebabkan perusahaan/usaha berskala besar mendominasi keberadaan perusahaan/usaha di perkotaan (87,94 persen).



Dari 44.048 perusahaan/usaha berskala besar, 29.833 perusahaan/usaha atau 67,73 persen berada di Pulau Jawa, diikuti oleh Pulau Sumatera sebanyak 7.062 perusahaan/usaha (16,03 persen). Selebihnya tersebar di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta Pulau Maluku dan Papua. Distribusi perusahaan/usaha berskala menengah, kecil, dan mikro memiliki pola yang sama dengan pola perusahaan/usaha skala besar. Dari semua skala usaha, kontribusi perusahaan/usaha di Pulau Maluku dan Papua mencatat peringkat terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia di bagian Timur ini masih belum digali secara optimal, tertinggal dibandingkan wilayah di bagian Barat. Angka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Pulau dan Skala Usaha, Tahun 2006

Pulau	Skala Usaha				Tidak dpt di Klasifikasikan	Jumlah
	Besar	Menengah	Kecil	Mikro		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	7 062	26 218	649 914	3 345 973	2 781	4 031 948
Jawa	29 833	105 356	2 373 841	11 990 599	6 219	14 505 848
Bali dan Nusa Tenggara	1 972	12 124	150 450	1 045 332	671	1 210 549
Kalimantan	2 471	9 456	200 879	886 446	1 441	1 100 693
Sulawesi	2 136	9 105	170 880	1 403 199	597	1 585 917
Maluku dan Papua	574	2 580	41 610	256 671	398	301 833
Indonesia	44 048	164 839	3 587 574	18 928 220	12 107	22 736 788

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Jika dilihat berdasarkan pengelompokan kategori lapangan usaha, semua skala usaha mendominasi perusahaan/usaha pada kategori lapangan usaha tersier, yaitu yang termasuk di dalamnya kategori lapangan usaha G hingga P. Sementara urutan kedua ditempati oleh kategori lapangan usaha primer non pertanian, yaitu mencakup kategori lapangan usaha C dan D, dan urutan terakhir berada pada kategori lapangan usaha sekunder (E dan F). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Skala Usaha				Tidak dapat diklasifikasikan	Jumlah
	Besar	Menengah	Kecil	Mikro		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C Pertambangan dan Penggalian	352	527	22 884	222 954	195	246 912
D Industri Pengolahan	8 671	26 253	293 436	2 901 111	0	3 229 471
E Listrik, Gas dan Air	750	2 199	1 305	9 409	837	14 500
F Konstruksi	1 821	5 391	38 993	118 387	314	164 906
G Perdagangan Besar dan Eceran	17 873	56 418	2 257 080	7 970 068	3 008	10 304 447
H Penyediaan Akomodasi dan Makan	1 110	18 615	474 507	2 520 348	166	3 014 746
I Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	2 301	12 369	179 378	2 505 697	2 799	2 702 544
J Perantara Keuangan	7 316	13 615	26 621	34 439	1 618	83 609
K Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1 734	15 554	75 919	714 827	716	808 750
M Jasa Pendidikan	787	4 204	52 171	283 797	596	341 555
N Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	708	4 149	29 923	142 811	1 296	178 887
O Jasa Kemasyarakatan, SosBud, Hiburan & Perorangan	615	5 513	132 268	1 327 805	553	1 466 754
P Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	10	32	3 089	176 567	9	179 707
Jumlah	44 048	164 839	3 587 574	18 928 220	12 107	22 736 788

Sumber : diolah dari SE06-Listing

3.5. Perusahaan/Usaha menurut Tahun Mulai Beroperasi

Pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi melanda negeri ini dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi -13,7 persen dari pertumbuhan sebesar 4,9 persen di tahun sebelumnya (1997). Dengan datangnya badai krisis tersebut, banyak perusahaan/usaha yang menghentikan kegiatannya, terutama perusahaan/usaha skala menengah dan besar yang memproduksi barang dengan kandungan impor (*import content*) yang besar. Terlebih perusahaan-perusahaan yang dalam operasinya sangat menggantungkan diri pada hutang luar negeri dalam valuta asing terutama dolar AS. Namun demikian di tengah hantaman badai krisis tersebut, masih banyak juga perusahaan/usaha yang baru memulai operasinya. Umumnya mereka merupakan usaha mikro dan kecil yang menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi badai krisis.

Sebagai dampak terjadinya krisis ekonomi, banyak perusahaan/usaha yang menghentikan kegiatannya terutama perusahaan/usaha yang memproduksi barang dengan kandungan impor yang dominan.

Sementara itu, berdasarkan data PDRB, krisis ekonomi telah menyebabkan propinsi-propinsi di Jawa mengalami kontraksi ekonomi yang lebih besar ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia. Seluruh provinsi di Jawa adalah merupakan lima besar provinsi di Indonesia yang mengalami kemerosotan ekonomi terparah. Pada tahun 1998, saat ekonomi Indonesia mengalami kondisi yang terparah, hanya Papua yang pertumbuhannya masih positif sedangkan provinsi-provinsi lainnya mengalami kemerosotan.

Dengan menggunakan informasi tahun mulai beroperasi, SE06 ingin melihat distribusi perusahaan/usaha menurut klasifikasi tahun mulai beroperasi, yaitu periode sebelum 1997, periode 1997-1999, dan periode setelah 1999. Pengklasifikasian tahun mulai beroperasi ini diharapkan dapat memberi informasi dampak dari krisis ekonomi terhadap populasi perusahaan/usaha dalam memulai usahanya. Namun, oleh karena tahun mulai beroperasi hanya ditanyakan kepada perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat permanen, maka analisisnya tidak mencakup usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen.

Tahun mulai beroperasi adalah tahun pertama kali unit kegiatan menghasilkan/ memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Tahun mulai beroperasi secara komersial yang dimaksud adalah tahun sesuai dengan akte pendirian kegiatan usaha. Apabila suatu kegiatan usaha berubah bentuk badan hukumnya, maka yang ditulis untuk tahun beroperasi adalah tahun pada bentuk badan hukum terakhir. Khusus untuk jenis kegiatan konstruksi, yang dimaksud tahun mulai berproduksi adalah tahun mulai kegiatan (*early production*).

Bila dilihat distribusi perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat permanen berdasarkan tahun mulai beroperasi secara komersial, terdapat 57,79 persen usaha/perusahaan yang berdiri sesudah tahun 1999 yang berarti pasca krisis ekonomi. Kontribusi perusahaan/usaha yang beroperasi secara komersial pada periode tersebut terlihat paling besar di seluruh kategori lapangan usaha kecuali pada kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan (kategori

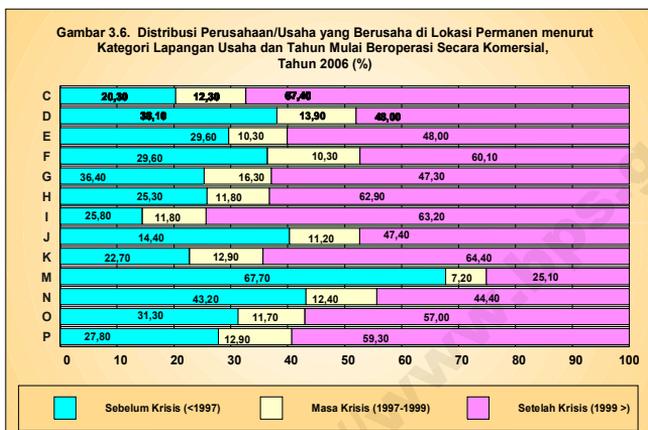
Tabel 3.9. Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dengan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Tahun Mulai Beroperasi secara Komersial			Jumlah
	Sebelum Krisis (< 1997)	Masa Krisis (1997-1999)	Setelah Krisis (1999 >)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. Pertambangan dan Penggalian	50 206	30 363	166 343	246 912
D. Industri Pengolahan	1 209 883	441 752	1 526 470	3 178 105
E. Listrik, Gas dan Air	4 242	1 470	8 604	14 316
F. Konstruksi	58 312	26 064	76 013	160 389
G. Perdagangan Besar dan Eceran	1 300 796	609 203	3 235 090	5 145 089
H. Akomodasi dan Makan Minum	324 483	138 138	792 885	1 255 506
I. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	62 020	48 227	319 591	429 838
J. Perantara Keuangan	31 535	9 618	37 150	78 303
K. Real Estate dan Usaha Persewaan	181 993	103 757	517 269	803 019
M. Jasa Pendidikan	231 253	24 536	85 580	341 369
N. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72 568	20 826	74 470	167 864
O. Jasa Kmsyrktan, SosBud, Hib.& Perorgn Lainnya	347 400	129 545	633 448	1 110 393
P. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	5 939	2 746	12 665	21 350
Jumlah	3 880 630	1 586 245	7 485 578	12 952 453

Sumber : diolah dari SE06-Listing

M). Sementara perusahaan/usaha yang berdiri sebelum tahun 1997 ada 29,96 persen perusahaan/usaha dan ada sebanyak 12,25 persen yang memulai usahanya pada tahun 1997-1999 (periode krisis ekonomi). Yang menarik adalah bahwa besarnya persentase perusahaan/usaha yang memulai usahanya pada periode 1997-1999 hampir sama di seluruh kategori lapangan usaha kecuali kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan, yaitu berkisar dari 11,00 persen hingga 16,25 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap perusahaan/usaha memberikan reaksi yang sama untuk mencoba memulai berusaha justru pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia (Gambar3.6).

Kontribusi perusahaan/usaha yang mulai beroperasi sesudah tahun 1999 tercatat tertinggi hampir di seluruh kategori lapangan usaha.



3.6. Perusahaan/Usaha menurut Status Badan Hukum/Usaha

Perilaku para pengusaha di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Usaha pada strata terendah biasanya dilakukan secara perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Sementara pada strata menengah ke atas, bentuk badan usaha dari perusahaan/usaha yang dioperasikan sudah mulai mempertimbangkan untuk mempunyai bentuk badan hukum. Perusahaan/usaha yang mempunyai badan hukum, biasanya mempunyai kemampuan untuk lebih mudah mengembangkan usahanya dibandingkan dengan

perusahaan/usaha yang tidak mempunyai badan hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi ¹⁾

Tabel 3.10. Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Badan Hukum/Usaha di Indonesia, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Berbadan Hukum	Tidak Berbadan Hukum	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Pertambangan dan Penggalian	8 500	238 412	246 912
D. Industri Pengolahan	137 023	3 041 082	3 178 105
E. Listrik, Gas dan Air	5 235	9 081	14 316
F. Konstruksi	42 876	117 513	160 389
G. Perdagangan Besar dan Eceran	413 544	4 731 545	5 145 089
H. Akomodasi dan Makan Minum	57 073	1 198 433	1 255 506
I. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	117 072	312 766	429 838
J. Perantara Keuangan	62 665	15 638	78 303
K. Real Estate dan Usaha Persewaan	50 587	752 432	803 019
M. Jasa Pendidikan	276 260	65 109	341 369
N. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88 234	79 630	167 864
O. Jasa Kmsyrktan, SosBud, Hib.& Perorgn Lainnya	67 852	1 042 541	1 110 393
P. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	880	20 470	21 350
Jumlah	1 327 801	11 624 652	12 952 453

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Dari 1,3 juta perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen, 89,75 persen beroperasi tanpa bentuk badan hukum/badan usaha.

Perusahaan/usaha yang berbadan hukum di Indonesia ada sebanyak 1,3 juta perusahaan/usaha atau 10,25 persen dari seluruh perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen. Selebihnya 89,75 persen beroperasi tanpa bentuk badan hukum/badan usaha. Kontribusi perusahaan/usaha berbadan hukum yang lebih dari 25 persen adalah perusahaan/usaha pada kategori lapangan usaha Listrik, Gas dan Air; Konstruksi; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Perantara Keuangan, serta Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara kontribusi perusahaan/usaha berbadan hukum pada kategori lapangan usaha Pertambangan/Penggalian; Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran berkisar antara 3,44 persen hingga 8,04 persen.

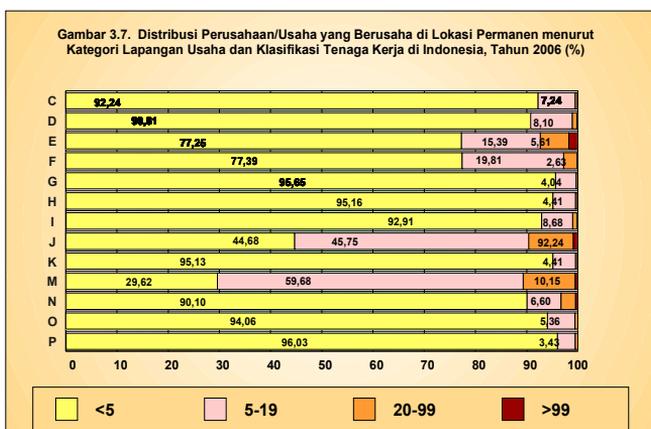
1) Sri Redjeki Hartono, Pengembangan Koperasi sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia, Denpasar: 2003

3.7. Perusahaan/Usaha menurut Klasifikasi Tenaga Kerja

Struktur perusahaan/usaha menurut klasifikasi tenaga kerja mencerminkan peranan masing-masing perusahaan/usaha dalam pembangunan ekonomi. Idealnya, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, semakin besar kemampuan perusahaan/usaha untuk berkembang. Masing-masing kelompok perusahaan/usaha memiliki keunggulan komparatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Kelompok perusahaan/usaha yang termasuk dalam Usaha Besar memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan, sementara kelompok Usaha Kecil berperan sebagai penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Sebagian besar perusahaan/usaha mempekerjakan kurang dari 5 orang (91,72 persen), hanya 0,11 persen perusahaan/usaha yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 99 orang.

Untuk melihat distribusi perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat permanen menurut klasifikasi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan dibedakan menjadi empat kelompok, masing-masing adalah kurang dari 5 orang, antara 5 hingga 9 orang, antara 20 hingga 99 orang dan lebih besar dari 99 orang. Gambar 3.7 menunjukkan perusahaan/usaha yang mempekerjakan kurang dari 5 orang dan antara 5 hingga 9 orang terlihat mendominasi, masing-masing 91,72 persen dan 7,29 persen, hanya 0,11 persen perusahaan/usaha yang mempekerjakan lebih dari 99 orang. Pola serupa juga dijumpai pada sebagian besar kategori lapangan usaha, kecuali pada kategori lapangan usaha Perantara Keuangan dan Jasa Pendidikan. Kontribusi



perusahaan/usaha Perantara Keuangan yang mempekerjakan kurang dari 5 orang dan antara 5 hingga 9 orang hampir sama, yaitu 44,68 persen dan 45,72 persen. Sementara perusahaan/usaha yang mempekerjakan antara 5 hingga 9 orang pada kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan justru paling besar yaitu 59,68 persen.

Tabel 3.11. Jumlah Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Klasifikasi Tenaga Kerja di Indonesia, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Klasifikasi Jumlah Tenaga Kerja				Jumlah
	< 5	5 - 19	20 - 99	> 99	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C. Pertambangan dan Penggalian	227 762	17 876	1 083	191	246 912
D. Industri Pengolahan	2 885 894	257 314	27 478	7 419	3 178 105
E. Listrik, Gas dan Air	11 059	2 203	803	251	14 316
F. Konstruksi	124 119	31 786	4 217	267	160 389
G. Perdagangan Besar dan Eceran	4 921 147	207 646	15 109	1 187	5 145 089
H. Akomodasi dan Makan Minum	1 194 797	55 422	4 755	532	1 255 506
I. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	399 370	26 101	3 847	520	429 838
J. Perantara Keuangan	34 985	35 803	6 798	717	78 303
K. Real Estate dan Usaha Persewaan	763 872	35 408	3 325	414	803 019
M. Jasa Pendidikan	101 109	203 726	34 658	1 876	341 369
N. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151 247	11 081	4 840	696	167 864
O. Jasa Kmsyrktan, SosBud, Hib.& Perorgn Lainnya	1 044 438	59 463	6 234	258	1 110 393
P. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	20 502	732	114	2	21 350
Jumlah	11 880 301	944 561	113 261	14 330	12 952 453

Sumber : diolah dari SE06-Listing

3.8. Perusahaan/Usaha menurut Jaringan Perusahaan/Usaha

Dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas, jalinan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain perlu dilakukan. Kerjasama ini dilakukan untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, diantaranya untuk mendapat pangsa pasar produksi ataupun pangsa pasar bahan baku.

Pola kerjasama operasional antar perusahaan/usaha pada dasarnya tidak mempengaruhi eksistensi perusahaan/usaha secara hukum, tetapi cenderung hanya untuk mencapai produktivitas dan efisiensi serta untuk menguasai pangsa pasar. Pola pengembangan inilah yang merupakan salah satu pola pengembangan yang dilaksanakan oleh perusahaan/usaha dengan status badan

hukum yang mempunyai modal kuat, fasilitas memadai dan memiliki kekuatan negosiasi. Untuk mengarah pada perubahan struktur perusahaan tersebut perlu dilakukan hal-hal untuk mengantisipasi lingkungan usaha atau faktor eksternal yang juga berubah. Perubahan faktor eksternal harus diikuti oleh faktor internal, termasuk manajemen umum perusahaan/usaha, organisasi perusahaan/usaha, SDM sumber daya keuangan dan sumber daya teknologi.

Pembentukan jaringan perusahaan/usaha pada dasarnya bertujuan untuk kebutuhan ekspansi perusahaan/usaha. Namun, tidak semua perusahaan/usaha memerlukan jaringan untuk menjalankan usahanya. Hasil pendataan SE06 menunjukkan dari jumlah perusahaan/usaha yang berlokasi permanen (12,95 juta perusahaan/usaha), 98,64 persen atau sebanyak 12,8 juta perusahaan/usaha merupakan perusahaan/usaha dengan status usaha tunggal dan sisanya merupakan usaha dengan status jaringan (Kantor Pusat/Induk, Pabrik, Cabang, Perwakilan dan Unit Pembantu).

Pada Tabel 3.12 memperlihatkan bahwa pada kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan lebih cenderung merupakan perusahaan tunggal, masing-masing sebesar 5,1 juta dan 3,1 juta perusahaan/usaha. Pada kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, ada sekitar 59.396 perusahaan/usaha yang merupakan pabrik.

Dari seluruh perusahaan/usaha berstatus cabang, perusahaan/usaha perdagangan besar dan eceran memiliki kontribusi terbesar, yaitu sekitar 30,06 persen.

Perusahaan/usaha pada kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Perantara Keuangan, Jasa Pendidikan, dan Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi mengembangkan usahanya melalui kantor cabangnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.12 bahwa ada lebih dari 10 ribu perusahaan/usaha di lapangan usaha tersebut yang berstatus sebagai kantor cabang.

Tabel 3.12. Jumlah Perusahaan/Usaha di Lokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Jaringan Usaha di Indonesia, Tahun 2006

Kategori Lapangan Usaha	Jaringan Perusahaan/Usaha						Jumlah
	Tunggal	Kantor Pusat/Induk	Pabrik	Cabang	Perwakilan	Unit Pembantu	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
C	246 299	190	0	314	63	46	246 912
D	3 111 689	1 881	59 396	4 469	109	561	3 178 105
E	11 219	167	0	2 227	61	642	14 316
F	158 289	761	0	1 150	99	90	160 389
G	5 112 192	3 850	0	27 342	516	1 189	5 145 089
H	1 250 835	713	0	3 880	29	49	1 255 506
I	415 856	1 060	0	11 078	435	1 409	429 838
J	57 687	1 100	0	14 792	238	4 486	78 303
K	798 617	809	0	3 205	211	177	803 019
M	327 461	2 186	0	11 472	82	168	341 369
N	159 164	617	0	6 875	36	1 172	167 864
O	1 105 324	647	0	4 121	98	203	1 110 393
P	21 283	13	0	46	2	6	21 350
Jumlah	12 775 915	13 994	59 396	90 971	1 979	10 198	12 952 453

Keterangan :

- C. Pertambangan dan Penggalian
- D. Industri Pengolahan
- E. Listrik, Gas dan Air
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan Besar dan Eceran
- H. Akomodasi dan Makan Minum
- I. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- J. Perantara Keuangan
- K. Real Estate dan Usaha Persewaan
- M. Jasa Pendidikan
- N. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- O. Jasa Kmsyrktan, SosBud, Hib.& Perorgn Lainnya
- P. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Sumber : diolah dari SE06-Listing

GAMBARAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

4

4.1. Umum

Selain mengumpulkan data tentang perusahaan/ usaha menurut berbagai karakteristik usaha, SE06 juga mengumpulkan data jumlah tenaga kerja yang dapat menginformasikan tentang penyerapan tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha. Seluruh informasi tersebut dapat menjadi dasar perencanaan bagi kalangan dunia usaha untuk pengembangan usaha, pangsa pasar dan potensi pasar, serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan dasar bagi perencanaan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam istilah ekonomi, tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa atau sering disebut faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli.

Pada bab ini konsep tenaga kerja mengacu pada pedoman pencacahan SE06 dimana pekerja/karyawan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pekerja/karyawan dibayar dan pekerja/karyawan tidak dibayar. Pembahasan struktur tenaga kerja akan dibedakan menurut pulau, kategori lapangan usaha, jenis kelamin, skala usaha serta status badan usaha dan tahun mulai beroperasi perusahaan tempat bekerja bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha yang berlokasi permanen.

4.2. Struktur Tenaga Kerja menurut Pulau

Berdasarkan hasil pendataan SE06, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja ada sebanyak 49,7 juta orang. Bila dibedakan menurut pulau, Pulau Jawa mendominasi penyerapan tenaga kerja dibanding pulau lainnya yaitu sekitar 32,2 juta orang atau 64,86 persen dari seluruh tenaga kerja. Diikuti oleh Sumatera dengan persentase

Tabel 4.1. Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha dan Pulau, Tahun 2006 (orang)

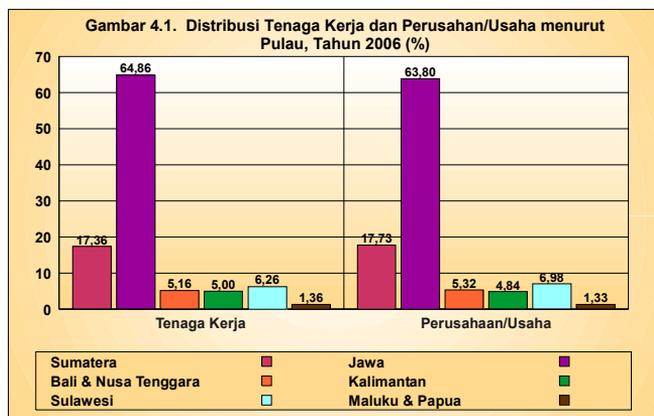
Kategori Lapangan Usaha	Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku dan Papua	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertambangan dan Penggalian	115 908	279 080	52 539	131 695	29 633	24 856	633 711
Industri Pengolahan	1 542 224	8 566 398	632 202	418 744	532 125	93 364	11 785 057
Listrik Gas dan Air	36 423	82 759	9 638	11 030	17 062	4 863	161 775
Konstruksi	153 034	316 400	76 157	67 476	92 968	18 486	724 521
Perdagangan Besar dan Eceran	3 366 274	10 452 463	866 962	927 902	1 307 432	286 461	17 207 494
Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	904 324	3 555 979	210 260	250 404	184 008	32 225	5 137 200
Transportasi Pergudangan dan Komunikasi	571 826	2 297 910	184 979	142 486	291 712	72 153	3 561 066
Perantara Keuangan	150 274	566 729	69 522	43 330	57 712	17 521	905 088
Real Estate Usaha Persewaan	251 740	1 317 895	75 582	90 123	79 406	18 478	1 833 224
Jasa Pendidikan	801 866	2 409 668	215 661	220 715	310 241	69 593	4 027 744
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148 905	436 071	41 141	44 889	48 477	13 074	732 557
Jasa Kemasyarakatan Sosbud Hiburan dan Perorangan lainnya	503 548	1 834 097	126 396	124 932	144 186	23 801	2 756 960
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	73 995	102 268	3 385	8 919	12 619	2 584	203 770
Jumlah	8 620 341	32 217 717	2 564 424	2 482 645	3 107 581	677 459	49 670 167
Persentase	17,36	64,86	5,16	5,00	6,26	1,36	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

17,36 persen, sedangkan sisanya tersebar di pulau lain. Kondisi ini sejalan dengan distribusi perusahaan/usaha, yaitu sekitar 63,80 persen tersebar di pulau Jawa dan 17,73 persen di Sumatera. Demikian halnya yang terjadi di Pulau lain, distribusi perusahaan/usaha selaras dengan penyerapan tenaga kerjanya. Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat dari Gambar 4.1.

Sejalan dengan sebaran perusahaan/usaha, tenaga kerja paling banyak terserap di kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, yaitu sekitar 17,2 juta orang (34,64 persen).

Sementara kategori lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Pulau Jawa adalah Perdagangan Besar dan Eceran, yaitu sekitar 32,44 persen



atau sebanyak 10,5 juta orang. Kemudian diikuti oleh Industri Pengolahan sekitar 26,59 persen atau sebanyak 8,6 juta orang. Sisanya tersebar di kategori lapangan usaha lainnya. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa, tenaga kerja di Pulau Sumatera juga paling banyak terserap di kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, yaitu sekitar 39,05 persen atau sebanyak 3,4 juta orang, kemudian diikuti oleh kategori lapangan usaha Industri Pengolahan dengan jumlah sekitar 17,89 persen atau sebanyak 1,5 juta orang.

Sementara sebaran tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha secara umum, menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 17,2 juta orang atau mencapai 34,64 persen dari total 49,7 juta tenaga kerja di Indonesia. Diikuti oleh kategori lapangan usaha Industri Pengolahan yang menyerap sekitar 11,8 juta tenaga kerja atau sekitar 23,73 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada kategori lapangan usaha lainnya berkisar antara 0,33 persen (Listrik, Gas dan Air) sampai 10,34 persen (Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum).

4.3. Struktur Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin

Tenaga kerja perempuan merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dibandingkan laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan perempuan dalam menghasilkan barang dan jasa pada berbagai kategori lapangan usaha. Selain menghasilkan barang dan jasa tersebut, tenaga kerja perempuan juga memiliki peran dalam lingkup individu, yaitu membantu mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Bahkan tidak jarang dijumpai tenaga kerja perempuan justru berperan sebagai pencari nafkah utama, dikarenakan statusnya sebagai *single parent* ataupun mengambil alih peran suami yang sudah tidak dapat bekerja lagi.

Tenaga kerja perempuan cenderung memilih pekerjaan yang lebih memerlukan ketelitian, kesabaran dan keuletan dibandingkan ketrampilan fisik dan pekerjaan kasar.

Tabel 4.2. Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha dan Jenis kelamin, Tahun 2006 (orang)

Kategori Lapangan Usaha	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertambangan dan Penggalian	532 598	84,04	101 113	15,96	633 711
Industri Pengolahan	6 455 004	54,77	5 330 053	45,23	11 785 057
Listrik, Gas dan Air	137 468	84,97	24 307	15,03	161 775
Konstruksi	654 904	90,39	69 617	9,61	724 521
Perdagangan Besar dan Eceran	8 793 904	51,11	8 413 590	48,89	17 207 494
Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2 412 778	51,11	2 724 422	53,03	5 137 200
Transportasi, Pergudangan dan Perantara Keuangan	3 255 844	91,43	305 222	8,57	3 561 066
Real Estate, Usaha Persewaan	579 055	63,98	326 033	36,02	905 088
Jasa Pendidikan	1 268 150	69,18	565 074	30,82	1 833 224
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2 033 194	50,48	1 994 550	49,52	4 027 744
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	281 477	38,42	451 080	61,58	732 557
Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya	1 890 575	68,57	866 385	31,43	2 756 960
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	51 894	25,47	151 876	74,53	203 770
Jumlah	28 346 845	57,07	21 323 322	42,93	49 670 167

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Kontribusi tenaga kerja perempuan di kategori lapangan usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sangat kecil, masing-masing 8,57 persen dan 9,61 persen.

Tenaga kerja perempuan dan laki-laki biasanya memiliki pilihan jenis pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh perempuan misalnya tenaga profesional, pendidik, perawat, pekerjaan non-manual menengah, tenaga administrasi, pramuniaga, pengasuh anak, pekerja pabrik setengah terampil, pekerjaan domestik setengah terlatih. Intinya adalah pekerjaan yang memerlukan ketelitian, kesabaran dan keuletan serta pekerjaan yang memerlukan sedikit keterampilan fisik dan pekerjaan kasar. Sedangkan tenaga kerja laki-laki pada umumnya lebih banyak melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik, teknik, serta pekerjaan lainnya yang banyak memerlukan kemampuan fisik dan pekerjaan kasar. Namun tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil listing SE06 terlihat bahwa secara umum tenaga kerja laki-laki lebih banyak dari tenaga kerja perempuan. Masing-masing sebanyak 28,4 juta orang (57,07 persen) dan 21,3 juta orang (42,93 persen).

Perbedaan kontribusi terbesar terjadi pada kategori lapangan usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, dengan tenaga kerja perempuan sekitar 8,57 persen, demikian halnya dengan kategori lapangan usaha Konstruksi dengan tenaga kerja perempuan sekitar 9,61 persen. Sifat dari kegiatan di dua kategori lapangan usaha ini yang lebih mengutamakan kekuatan fisik dan memerlukan keahlian tertentu, menyebabkan tingginya perbedaan antara kontribusi tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Namun untuk kategori lapangan usaha Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, justru didominasi oleh tenaga kerja perempuan. Pada kategori lapangan usaha Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, kontribusi tenaga kerja perempuan sekitar 74,53 persen. Sedangkan pada kategori lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, kontribusi tenaga kerja perempuan masing-masing sekitar 61,58 persen dan 53,03 persen. Hal ini disebabkan jenis pekerjaan pada ketiga kategori lapangan usaha tersebut lebih banyak membutuhkan keterampilan yang dimiliki perempuan.

Perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu 41,6 juta orang (83,87 persen). Hal ini sejalan dengan kontribusi perusahaan/usaha mikro dan kecil yang mendominasi sebaran perusahaan/usaha.

4.4. Struktur Tenaga Kerja menurut Skala Usaha

Sejalan dengan keberadaan usaha mikro yang mendominasi perekonomian di Indonesia (sekitar 83,25 persen), komposisi jumlah tenaga kerja menurut skala usaha menunjukkan bahwa usaha mikro paling banyak menyerap jumlah tenaga kerja, yaitu sekitar 31,1 juta orang atau mencapai 62,51 persen. Tenaga kerja pada usaha mikro paling banyak terserap oleh kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yaitu sekitar 11,4 juta orang atau sekitar 36,73 persen dari seluruh tenaga kerja yang terserap pada usaha mikro di Indonesia. Diikuti oleh Industri Pengolahan sebanyak 5,7 juta orang atau sekitar 18,49 persen. Skala usaha berikutnya yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 10,6 juta orang atau sekitar 21,36 persen. Hal ini juga sesuai dengan komposisi jumlah perusahaan/usaha kecil di Indonesia yang menempati

Tabel 4.3. Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha, Tahun 2006 (orang)

Kategori lapangan usaha (1)	Skala Usaha				Tidak dapat diklasifikasi (6)	Jumlah (7)
	Besar (2)	Menengah (3)	Kecil (4)	Mikro (5)		
Pertambangan dan Penggalian	91 295	16 292	114 366	383 560	28 198	633 711
Industri Pengolahan	3 075 726	1 513 917	1 455 881	5 739 533	0	11 785 057
Listrik, Gas dan Air	74 040	26 773	20 570	19 356	21 036	161 775
Konstruksi	70 861	63 935	257 382	324 075	8 268	724 521
Perdagangan Besar dan Eceran	427 314	389 481	4 947 996	11 404 346	38 357	17 207 494
Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	128 765	190 768	1 120 672	3 693 442	3 553	5 137 200
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	162 417	149 960	404 310	2 809 424	34 955	3 561 066
Perantara Keuangan	296 226	180 730	215 663	183 255	29 214	905 088
Real Estate, Usaha Persewaan	111 371	134 249	255 027	1 317 010	15 567	1 833 224
Jasa Pendidikan	95 913	175 896	1 137 706	2 606 595	11 634	4 027 744
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182 967	122 823	132 055	288 286	6 426	732 557
Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya	44 767	85 039	539 392	2 082 902	4 860	2 756 960
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	114	204	7 515	195 879	58	203 770
Jumlah tenaga kerja	4 761 776	3 050 067	10 608 535	31 047 663	202 126	49 670 167
Persentase	9,59	6,14	21,36	62,51	0,41	100,00
Jumlah perusahaan/usaha	44 048	164 839	3 587 574	18 928 220	12 107	22 736 788
Persentase	0,19	0,72	15,78	8325,00	0,05	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Perusahaan/usaha industri pengolahan di semua skala usaha banyak menyerap tenaga kerja. hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini cenderung bersifat padat karya.

urutan kedua, yaitu sebanyak 3,6 juta perusahaan (15,78 persen). Pada skala usaha kecil, kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran juga paling banyak menyerap tenaga kerja yang juga diikuti oleh Industri Pengolahan, masing-masing sebanyak 5,0 juta orang (46,64 persen) dan 1,5 juta orang (13,72 persen). Tingginya penyerapan tenaga kerja pada skala usaha mikro dan kecil menunjukkan tingginya peran ekonomis kedua skala usaha tersebut dalam menciptakan pendapatan rumah tangga.

Meskipun hasil listing SE06 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan/usaha berskala besar tercatat paling sedikit, namun penyerapan tenaga kerjanya lebih besar dari pada perusahaan/usaha berskala menengah, yaitu 4,8 juta orang atau sekitar 9,59 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada perusahaan/usaha berskala menengah sebanyak 3,1 juta orang atau sekitar 6,14 persen.

Pada skala usaha besar dan menengah, lapangan usaha industri pengolahan paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan jumlah masing-masing 3,1 juta orang dan

1,5 juta orang. Dengan banyaknya tenaga kerja pada perusahaan yang bergerak pada kategori lapangan usaha Industri Pengolahan baik pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro, menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha ini mampu menyerap tenaga kerja pada berbagai skala usaha secara merata. Hal tersebut mengindikasikan bahwa industri pengolahan cenderung bersifat padat karya (*labor intensive*) dibandingkan padat modal (*capital intensive*). Sementara itu, perusahaan yang tidak dapat diklasifikasikan, hanya menyerap tenaga kerja 202.126 orang tenaga kerja dari sebanyak 12.107 perusahaan/usaha.

4.5. Struktur Tenaga Kerja menurut Lokasi Tempat Usaha Perusahaan/Usaha

Pendaftaran perusahaan pada SE06 dapat membedakan perusahaan/usaha menurut lokasi tempat usaha yaitu tempat beroperasi secara *de facto* atau lokasi dimana usaha tersebut dilakukan. Dari hasil listing dapat diketahui bahwa dari 11,3 juta tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha berlokasi tidak permanen, sekitar 40,21 persen merupakan tenaga kerja yang bekerja pada usaha keliling dan 34,43 persen merupakan tenaga kerja pada usaha kaki lima, sedangkan sisanya merupakan usaha yang berlokasi di los/koridor dan pangkalan ojek motor. Sementara dari 38,4 juta tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha berlokasi permanen sekitar 59,48 persen bekerja pada perusahaan/usaha yang berdiri di atas bangunan khusus usaha dan sisanya merupakan

Tabel 4.4. Jumlah Tenaga Kerja menurut Lokasi Tempat Usaha dan Pulau, Tahun 2006 (orang)

Lokasi Tempat Usaha	Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku dan Papua	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lokasi Tidak Permanen								
Keliling	668 031	3 306 813	163 002	153 052	216 826	27 774	4 535 498	40,21
Usaha Kaki Lima	872 505	2 248 216	178 803	244 647	265 905	73 021	3 883 097	34,43
Pangkalan Ojek Motor	195 780	790 830	85 991	45 947	108 648	36 315	1 263 511	11,20
Los/Koridor	293 687	985 957	77 474	63 377	151 828	24 872	1 597 195	14,16
Jumlah	2 030 003	7 331 816	505 270	507 023	743 207	161 982	11 279 301	100,00
Lokasi Permanen								
Bangunan Khusus Usaha	3 907 897	14 948 389	1 184 254	1 242 186	1 256 940	295 612	22 835 278	59,48
Bangunan Campuran	2 682 441	9 937 512	874 900	733 436	1 107 434	219 865	15 555 588	40,52
Jumlah	6 590 338	24 885 901	2 059 154	1 975 622	2 364 374	515 477	38 390 866	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

tenaga kerja pada perusahaan/usaha yang berdiri di atas bangunan campuran atau bangunan yang menyatu dengan tempat tinggal.

Bila dilihat menurut pulau, tenaga kerja yang bekerja pada usaha keliling atau usaha yang dalam melakukan aktivitas kegiatannya tidak pada satu lokasi yang tetap (berpindah-pindah) paling banyak terdapat di Pulau Jawa (3,3 juta orang) dan paling sedikit berada di Maluku dan Papua (27,8 ribu orang). Demikian halnya dengan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha berlokasi pada bangunan khusus usaha, paling banyak terdapat di Pulau Jawa (15,0 juta orang) dan paling sedikit berada di Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 295.612 orang.

4.6. Struktur Tenaga Kerja Pada Perusahaan yang Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum

Selain dapat menyajikan distribusi tenaga kerja menurut jenis kelamin, skala usaha dan lokasi tempat usaha, hasil listing SE06 juga dapat menyajikan distribusi tenaga kerja pada perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Namun mengingat bentuk badan hukum hanya ditanyakan pada perusahaan/usaha di lokasi permanen, maka penyajiannya hanya terbatas pada perusahaan yang berlokasi di tempat permanen yang mencakup perusahaan/usaha yang menempati bangunan khusus usaha atau bangunan campuran.

Perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan perusahaan/usaha yang berbadan hukum, yaitu sekitar 63,35 persen. Hal ini disebabkan mayoritas perusahaan/usaha yang ada di Indonesia adalah usaha mikro yang pada umumnya merupakan usaha yang tidak berbadan hukum. Hasil listing SE06 juga menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha Perantara Keuangan; Listrik, Gas dan Air; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi lebih banyak menyerap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha berbadan hukum dari pada perusahaan/usaha tidak berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan proporsi jumlah perusahaan pada kategori lapangan usaha tersebut yang lebih banyak berstatus badan hukum.

Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan/Usaha yang Berlokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Badan Usaha Perusahaan/Usaha, Tahun 2006 (orang)

Kategori lapangan usaha	Berbadan Hukum		Tidak Berbadan Hukum		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertambangan dan Penggalian	169 520	26,75	464 191	73,25	633 711
Industri Pengolahan	4 633 089	39,61	7 064 589	60,39	11 697 678
Listrik, Gas dan Air	143 202	88,64	18 354	11,36	161 556
Konstruksi	352 902	49,24	363 751	50,76	716 653
Perdagangan Besar dan Eceran	1 953 571	17,46	9 232 529	82,54	11 186 100
Akomodasi dan Penyediaan	480 537		2 460 231	83,66	2 940 768
Makan Minum		16,34			
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	608 574	50,29	601 642	49,71	1 210 216
Perantara Keuangan	829 268	92,21	70 058	7,79	899 326
Real Estate, Usaha Persewaan	374 546	20,52	1 451 128	79,48	1 825 674
Jasa Pendidikan	3 508 553	87,12	518 930	12,88	4 027 483
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	599 049	83,08	122 005	16,92	721 054
Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya	412 576	17,68	1 921 540	72,32	2 334 116
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	4 393	12,03	32 138	87,97	36 531
Jumlah	14 069 780	36,65	24 321 086	63,35	38 390 866

Sumber : diolah dari SE06-Listing

4.7. Struktur Tenaga Kerja menurut Tahun Perusahaan/Usaha Mulai Beroperasi

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 membawa dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan terjadinya krisis ekonomi banyak perusahaan/usaha yang harus gulung tikar atau sekarat. Krisis yang terjadi tahun 1997, membawa nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika merosot tajam, bahkan 1 dollar Amerika nilainya sama dengan 10 ribu rupiah. Efek meningkatnya nilai dollar Amerika terhadap rupiah inilah yang banyak membawa perusahaan/usaha tidak dapat bertahan hidup, terutama perusahaan/usaha yang menggunakan bahan baku atau produk dengan menggunakan harga dollar Amerika.

Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan/usaha yang mulai beroperasi sebelum krisis ekonomi menimpa Indonesia pada tahun 1997 ada

Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak pada banyaknya perusahaan/usaha yang gulung tikar telah mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja. Bila pada periode sebelum tahun 1997 jumlah tenaga kerja ada 15,8 juta orang, pada masa krisis (1997-1999) turun menjadi 4,4 juta orang.

sebanyak 15,8 juta orang, sedangkan pada masa krisis (tahun 1997-1999) ada sebanyak 4,4 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak krisis sangat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan/usaha di Indonesia, sehingga mengakibatkan jumlah perusahaan yang mulai beroperasi pada masa krisis hanya sedikit. Hal tersebut juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang menyebabkan permintaan tenaga kerja menurun. Kemudian pada saat perekonomian mulai pulih dan masa krisis sudah mulai berakhir, muncullah perusahaan/usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja empat kali lipat lebih banyak dari tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan/usaha yang mulai beroperasi pada masa krisis, yaitu mencapai 18,2 juta orang.

Bila dilihat menurut kategori lapangan usaha, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran tetap menjadi kategori lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, baik pada perusahaan yang mulai beroperasi sebelum, saat ataupun sesudah krisis ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut tetap menjadi pilihan usaha yang padat karya (*labor intensive*) bagi para pengusaha maupun investor.

Tabel 4.6. Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan/Usaha yang Berlokasi Permanen menurut Kategori Lapangan Usaha dan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, Tahun 2006 (orang)

Kategori lapangan usaha	Sebelum Krisis (<1997)	Masa Krisis (1997-1999)	Setelah Krisis (> 1999)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertambangan dan Penggalian	145 154	62 819	425 738	633 711
Industri Pengolahan	5 676 443	1 518 912	4 502 323	11 697 678
Listrik, Gas dan Air	100 579	11 053	49 924	161 556
Konstruksi	301 388	105 648	309 617	716 653
Perdagangan Besar dan Eceran	3 118 252	1 352 386	6 715 462	11 186 100
Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	863 577	334 472	1 742 719	2 940 768
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	349 808	130 038	730 370	1 210 216
Perantara Keuangan	467 561	94 975	336 790	899 326
Real Estate, Usaha Persewaan	448 679	218 432	1 158 563	1 825 674
Jasa Pendidikan	3 091 717	262 876	672 890	4 027 483
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	456 838	58 867	205 349	721 054
Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya	726 858	269 959	1 337 299	2 334 116
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	11 689	4 477	20 365	36 531
Jumlah	15 758 543	4 424 914	18 207 409	38 390 866

Sumber : diolah dari SE06-Listing

ANALISIS SEKTORAL

5

5.1. Umum

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi negara tersebut. Kinerja masing-masing sektor ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan masing-masing sektor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Demikian halnya dengan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi yang membentuknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan kinerja positif, namun lebih cenderung melambat dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2005 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,68 persen, sedangkan pada tahun 2006 hanya sebesar 5,48 persen. Selama tahun 2006 hampir seluruh sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif. Namun sayang seperti halnya kinerja perekonomian secara umum, pertumbuhan masing-masing sektor juga menunjukkan perlambatan. Selain sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan dan sektor Angkutan, pertumbuhan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2006 cenderung melambat dibandingkan tahun 2005.

Untuk melihat kinerja masing-masing sektor ekonomi perlu dilakukan analisis sektoral. Pendekatan sektoral dimulai dengan pertanyaan sektor apa yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di suatu wilayah (daerah). Oleh karena itu analisis sektoral tidak dapat dipisahkan dari analisis kewilayahan. Pada hakekatnya perencanaan pembangunan mengikuti suatu hirarki. Hirarki pertama menunjukkan tujuan dari pembangunan. Hirarki kedua menunjukkan sektor-sektor mana yang terpilih dalam pembangunan dan hirarki ketiga menunjukkan daerah-daerah mana yang terpilih. Sementara hirarki keempat menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam bab ini, analisis dibatasi pada pembahasan sektoral tanpa dikaitkan dengan pembahasan kewilayahan. Pembahasan berisi gambaran/profil perusahaan/usaha ekonomi (kecuali lapangan usaha Pertanian dan lapangan

Analisis sektoral bertujuan untuk melihat kinerja masing-masing sektor ekonomi dilihat dari jumlah perusahaan/usaha dan jumlah tenaga kerja menurut beberapa karakteristik.

usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) pada tahun 2006 berdasarkan hasil Listing Sensus Ekonomi. Gambaran perusahaan/usaha tersebut dilihat dari jumlah perusahaan/usaha dan jumlah tenaga kerja menurut jaringan usaha, lokasi perusahaan/usaha dan bentuk badan hukum perusahaan/usaha. Diharapkan analisis ini dapat memberikan informasi mengenai penyebaran perusahaan/usaha di Indonesia beserta beberapa karakteristik usahanya.

5.2. Industri Pengolahan (Kategori D)

Lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sumbangan lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2006 sebesar 28,05 persen dari seluruh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini melebihi sumbangannya pada tahun 2005 yang hanya sebesar 27,71 persen. Sementara pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2006 mencapai 4,63 persen dan 4,57 persen pada tahun 2005.

Industri Makanan dan Minuman (kode 15), Industri Tekstil (kode 17), Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk meubeler) dan Barang-banrang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya (kode 20), Industri Barang Galian Bukan Logam (kode 26) serta Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya (kode 36) mendominasi perusahaan/usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 88,61 persen.

Hasil Listing Sensus Ekonomi 2006 (SE06) menunjukkan jumlah perusahaan Industri Pengolahan pada tahun 2006 sebanyak 3,2 juta perusahaan/usaha. Sementara jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor ini sebanyak 11,8 juta orang. Menurut jumlah perusahaan, dari 23 golongan pokok industri, Industri Pengolahan didominasi oleh 5 golongan pokok industri, yaitu Industri Makanan dan Minuman (kode 15), Industri Tekstil (kode 17), Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk meubeler) dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya (kode 20), Industri Barang Galian Bukan Logam (kode 26) dan Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya (kode 36). Jumlah perusahaan dari kelima golongan pokok industri ini mencapai 88,61 persen dari total perusahaan/usaha industri. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh lima jenis industri ini sebesar 69,52 persen.

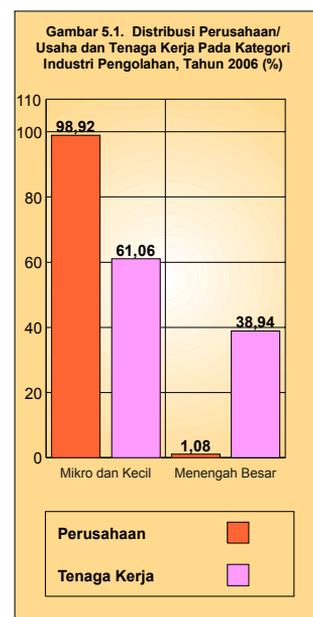
Gambar 5.1. menunjukkan kategori lapangan usaha Industri Pengolahan didominasi oleh industri berskala mikro

dan kecil. Industri Pengolahan berskala mikro dan kecil berjumlah 3,2 juta perusahaan/usaha atau sekitar 98,92 persen perusahaan/usaha Industri Pengolahan di Indonesia. Namun jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri mikro dan kecil hanya 7,2 juta orang atau sekitar 61,06 persen dari total tenaga kerja di Industri Pengolahan. Sebaliknya, tenaga kerja yang mampu diserap perusahaan Industri Pengolahan berskala menengah dan besar mencapai 38,94 persen dari total tenaga kerja Industri Pengolahan, meskipun jumlah perusahaannya hanya sekitar 1,08 persen.

Meskipun kontribusi perusahaan industri pengolahan menengah dan besar hanya sekitar 1,08 persen dari seluruh perusahaan industri pengolahan, namun tenaga kerja yang mampu diserap mencapai 38,94 persen.

Distribusi jumlah perusahaan/usaha dan jumlah tenaga kerja menurut masing-masing skala usaha dan golongan industri menunjukkan bahwa distribusi industri skala menengah dan besar lebih merata dibandingkan yang berskala mikro dan kecil. Pada industri berskala mikro dan kecil, jumlah perusahaan industri pada lima jenis industri yang dominan (lihat Tabel 5.1. bagian yang diarsir) sekitar 88,96 persen, sedangkan pada industri yang berskala menengah dan besar hanya sekitar 56,28 persen. Sementara jumlah tenaga kerja kelima golongan pokok industri yang berskala mikro dan kecil sebesar 83,03 persen, sedangkan yang berskala besar dan sedang sebesar 48,34 persen.

Selain itu Tabel 5.1. juga menunjukkan Industri Pengolahan di Indonesia lebih didominasi oleh industri-industri yang berbasis sumber daya alam, khususnya yang berasal dari sektor Pertanian. Industri Makanan (kode 15) merupakan industri yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, baik untuk yang berskala mikro dan kecil maupun yang berskala menengah dan besar. Industri ini juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar diantara Industri Pengolahan lainnya. Hal ini dapat dijadikan suatu peluang bagi pengembangan sektor Industri Makanan di Indonesia, mengingat alam Indonesia sangat kaya akan bahan yang dapat dijadikan bahan baku Industri Makanan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan aneka ragam makanan khas daerah. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar produk makanan yang potensial. Jika potensi ini diusahakan dan



Industri Pengolahan di Indonesia lebih didominasi oleh industri-industri yang berbasis sumber daya alam, khususnya yang berasal dari sektor Pertanian.

dikembangkan secara profesional maka tidak mustahil jika Industri Makanan dapat berkembang dengan lebih baik. Pada gilirannya sumbangan nilai tambah Industri Makanan pada PDB Indonesia juga diharapkan meningkat.

Pada industri yang berskala mikro dan kecil, jumlah Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk meubeler) dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya (kode 20) menduduki urutan kedua setelah Industri Makanan, yaitu termasuk meubeler berskala mikro dan kecil sebesar 24,20 persen dari total Industri

Tabel 5.1. Distribusi Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Golongan Pokok dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)

Golongan Pokok	Jumlah Perusahaan			Jumlah Tenaga Kerja		
	Mikro Kecil	Menengah Besar	Total	Mikro Kecil	Menengah Besar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	37,76	21,17	37,58	36,60	16,74	28,86
16	1,46	5,60	1,50	3,88	6,41	4,86
17	9,34	10,41	9,35	6,85	13,09	9,28
18	3,09	10,43	3,17	4,65	11,80	7,43
19	1,00	2,94	1,02	1,56	4,59	2,74
20	24,46	7,31	24,27	19,15	7,54	14,63
21	0,12	1,49	0,13	0,16	2,71	1,15
22	1,19	3,65	1,22	1,54	1,80	1,64
23	0,00	0,20	0,01	0,01	0,23	0,09
24	0,48	3,81	0,51	0,57	4,47	2,09
25	0,47	5,20	0,52	0,56	6,38	2,83
26	9,16	6,52	9,13	11,37	3,56	8,33
27	0,04	1,15	0,05	0,08	1,48	0,63
28	2,62	3,33	2,63	3,17	2,43	2,88
29	0,15	1,56	0,16	0,22	1,46	0,70
30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02
31	0,01	0,71	0,02	0,02	1,36	0,54
32	0,01	0,84	0,02	0,02	2,99	1,18
33	0,02	0,19	0,02	0,02	0,25	0,11
34	0,03	0,93	0,04	0,06	1,64	0,67
35	0,25	1,11	0,26	0,28	1,44	0,73
36	8,24	10,87	8,27	9,07	7,40	8,42
37	0,09	0,55	0,09	0,13	0,19	0,16
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: diolah dari SE06-Listing

Pengolahan berskala mikro dan kecil, sedangkan tenaga kerja yang mampu diserap sebesar 11,69 persen. Jika dilihat lebih rinci, 98 persen perusahaan yang termasuk dalam golongan pokok industri ini adalah Industri Barang-barang dari Kayu dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya (kode 202). Barang-barang yang dihasilkan dari industri ini terutama adalah barang kerajinan rumahtangga. Produk-produk ini sangat berpotensi untuk dikembangkan terutama untuk pasar luar negeri, mengingat kerajinan Indonesia terkenal unik dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Untuk itu perlu adanya usaha pembinaan perajin kecil di bidang *design* dan kualitas produk, sehingga nilai tambah produknya semakin meningkat. Selain itu aspek pemasaran produk juga harus diperhatikan. Namun demikian, pengembangan industri ini harus tetap mempertimbangkan aspek kelangsungan pembangunan (*sustainable development*) sehingga penebangan kayu dan pengumpulan rotan harus tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Distribusi jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri berskala mikro dan kecil yang lebih rinci menurut golongan pokok dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

Barang kerajinan rumah tangga Indonesia yang terkenal unik dan mempunyai nilai seni tinggi sangat berpotensi untuk dikembangkan terutama untuk pasar luar negeri.

Pada perusahaan/usaha Industri Pengolahan yang berskala menengah dan besar, persentase jumlah perusahaan terbesar setelah Industri Makanan adalah Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya (kode 36). Disusul oleh Industri Tekstil (kode 17) dan Industri Pakaian Jadi (kode 18). Persentase jumlah perusahaan ini masing-masing sekitar 10 persen. Sementara jumlah Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk meubeler), Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya (kode 20) serta Industri Barang Galian Bukan Logam (kode 26) persentasenya hanya sekitar 6-7 persen dari total perusahaan industri berskala menengah dan besar. Distribusi jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri berskala menengah dan besar yang lebih rinci menurut golongan pokok dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

Distribusi jumlah perusahaan/usaha menurut jaringan usaha menunjukkan sekitar 98,07 persen usaha industri berskala mikro dan kecil merupakan usaha tunggal

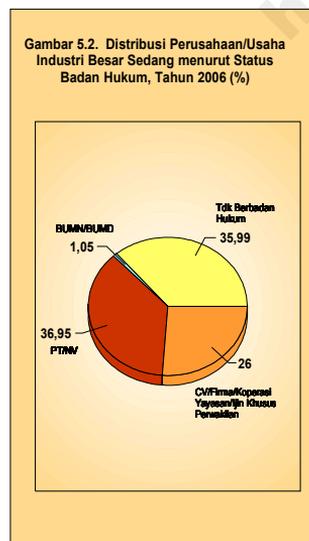
dan 1,78 persen adalah pabrik. Selebihnya merupakan cabang, perwakilan dan unit pembantu. Hal ini dapat dimengerti mengingat usaha industri berskala mikro dan kecil banyak yang merupakan usaha rumah tangga. Belum banyak usaha industri pengolahan berskala mikro dan kecil yang merupakan kantor pusat cabang, perwakilan atau unit pembantu.

Mengingat usaha industri mikro dan kecil kebanyakan merupakan usaha rumah tangga, maka 98,07 persen usaha industri berskala mikro dan kecil adalah usaha tunggal.

Sementara distribusi perusahaan/usaha industri pengolahan menurut status badan hukum dan skala usaha menunjukkan adanya perbedaan. Industri Pengolahan berskala besar dan sedang yang berbadan hukum mencapai 64,01 persen sementara pada Industri Pengolahan mikro dan kecil hanya sekitar 3,65 persen. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan organisasi perusahaan antara industri besar dan sedang dan mikro kecil. Hal ini berimplikasi pada kebijakan dan pola pengelolaan perusahaan.

Gambar 5.2. menunjukkan distribusi industri berskala besar dan sedang menurut status badan hukum. Terlihat bahwa masih ada perusahaan/usaha industri pengolahan berskala besar dan sedang yang tidak berbadan hukum yang persentasenya hampir 36 persen.

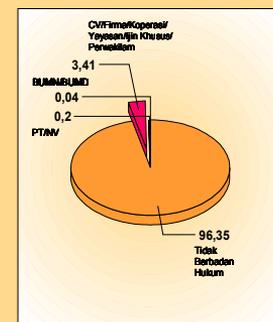
Jika dilihat lebih rinci terlihat bahwa terdapat 2 kelompok Industri Pengolahan berskala menengah dan besar menurut status badan hukumnya. Industri dengan teknologi sederhana seperti Industri Makanan (kode 15), Pengolahan Tembakau (kode 16), Industri Tekstil (kode 17), Industri Pakaian Jadi (18), Industri Kulit, barang dari Kulit dan Alas Kaki (kode 19), Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk meubler), dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya (kode 20), Industri Barang Galian Bukan Logam (kode 26) cenderung tidak berbadan hukum. Sementara sebagian besar golongan pokok industri berteknologi tinggi berstatus PT/NV. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar industri berteknologi tinggi membutuhkan investasi yang cukup besar sehingga diperlukan campur tangan dari pemegang saham. Khusus untuk Daur Ulang (kode 37), sebagian besar perusahaannya berstatus CV/Firma/Koperasi/perwakilan.



Sebaliknya Gambar 5.3 menunjukkan sebagian besar Industri Pengolahan berskala mikro dan kecil tidak berbadan hukum, yang persentasenya mencapai 96,35 persen. Hal ini mengindikasikan kelembagaan Industri Pengolahan berskala mikro dan kecil masih lemah. Sebagai akibatnya jumlah perusahaan berskala ini mudah berubah, karena cepatnya perusahaan untuk tutup atau bertambahnya perusahaan baru.

Sementara itu distribusi perusahaan menurut umur perusahaan yang dilihat dari tahun mulai beroperasi secara komersial (Gambar 5.4) menunjukkan hampir separuh perusahaan Industri Pengolahan berskala menengah dan besar berumur 10 tahun lebih. Sedangkan yang berumur antara 7 sampai 10 tahun sekitar 13,46 persen dan yang berumur antara 1 sampai 6 tahun sekitar 37 persen. Namun demikian, ada beberapa golongan industri yang mempunyai pengecualian. Sebagai contoh sekitar 80,00 persen perusahaan/usaha Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya serta Perbaikan Kereta Api (kode 352) merupakan usaha yang telah berumur lebih dari 10 tahun. Sementara itu sekitar 81,82 persen Industri Barang-barang dari Batubara (kode 231) merupakan

Gambar 5.3. Distribusi Perusahaan/Usaha Industri Berskala Mikro dan Kecil menurut Status Badan Hukum, Tahun 2006 (%)

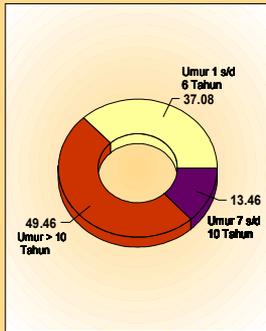


Tabel 5.2. Distribusi Perusahaan/Usaha Industri Pengolahan menurut Umur Perusahaan, Tahun 2006 (%)

Kode	Deskripsi	Umur perusahaan		
		> 10 tahun	7 s/d 10 tahun	1 s/d 6 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
171	Industri Pemintalan, Pertununan, Pengolahan Akhir Tekstil	62,69	11,24	26,07
173	Industri Perajutan	37,35	11,55	51,11
182	Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Pencilupan Bulu	0,00	0,00	100,00
223	Reproduksi Media Rekaman, Film dan Video	30,00	20,00	50,00
231	Industri Barang-barang dari Batubara	18,18	0,00	81,82
242	Industri Barang-barang Kimia Lainnya	63,31	9,03	27,67
251	Industri Karet dan Barang dari Karet	68,30	10,43	21,27
261	Industri Gelas dan Barang dari Gelas	64,49	7,48	28,04
315	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	75,00	14,29	10,71
321	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya	24,35	17,62	58,03
322	Industri Alat Transmisi Komunikasi	31,82	4,55	63,64
323	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan Sejenisnya	35,06	11,69	53,25
332	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	56,25	25,00	18,75
341	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	76,47	0,00	23,53
352	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya serta Perbaikan Kereta Api	80,00	0,00	20,00
353	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya serta Perbaikan Pesawat	0,00	0,00	100,00
372	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	30,38	12,03	57,59

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Gambar 5.4. Distribusi Perusahaan/Usaha Industri Pengolahan Skala Besar dan Sedang menurut Umur Perusahaan, Tahun 2006 (%)



industri yang relatif muda karena berumur antara 1 sampai 6 tahun.

Jika disimpulkan, perusahaan/usaha Industri Pengolahan lebih didominasi oleh usaha berskala mikro dan kecil, tidak berbadan hukum dan berumur lebih dari 10 tahun. Jenis-jenis usaha yang mendominasi kategori ini adalah Industri Makanan dan Minuman (kode 15), Industri Tekstil (kode 17), Industri Pakaian Jadi (kode 18), Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk meubler) dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya (kode 20), Industri Barang Galian Bukan Logam (kode 26) dan Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainnya (kode 36).

5.3. Konstruksi (Kategori F)

Hasil SE06 menunjukkan jumlah perusahaan/usaha Konstruksi sebanyak 164,9 ribu perusahaan/usaha. Gambar 5.5. menunjukkan distribusi perusahaan konstruksi tahun 2006. Sekitar 88,77 persen perusahaan/usaha Konstruksi adalah perusahaan/usaha Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil (golongan 452). Kegiatan-kegiatan lain seperti Penyiapan Lahan, Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil dan Penyelesaian Konstruksi Gedung persentasenya relatif kecil karena biasanya tidak dikerjakan tersendiri, namun merupakan bagian dari kegiatan Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil. Perusahaan/usaha Penyelesaian Konstruksi Gedung (golongan 454) tercatat sebesar 7,02

Tabel 5.3. Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Golongan dan Kelompok Banyaknya Pekerja, Tahun 2006 (%)

Golongan Pokok (1)	Kelompok Banyaknya Pekerja			Jumlah (5)
	1-4 (2)	5-19 (3)	> 20 (4)	
451 Penyiapan Lahan	0,33	0,09	0,02	0,45
452 Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	68,65	17,44	2,39	88,48
453 Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil	2,61	0,84	0,18	3,63
454 Penyelesaian Konstruksi Gedung	6,16	0,95	0,11	7,22
455 Penyewaan Alat Konstruksi atau Peralatan				
455 Pembongkar/Penghancur Bangunan dengan Operator	0,12	0,08	0,03	0,23
Jumlah	77,87	19,40	2,72	100,00

Sumber: diolah dari SE06-Listing

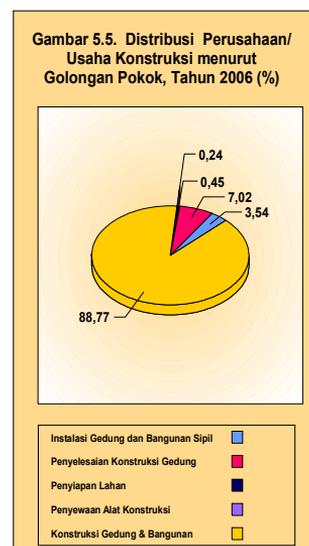
persen. Sisanya sebesar 4,23 persen terdiri dari perusahaan/usaha Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil (golongan 453), Penyiapan Lahan (golongan pokok 451) dan Penyewaan Alat Konstruksi atau Peralatan Pembongkar/Penghancur Bangunan dengan Operator (golongan pokok 455).

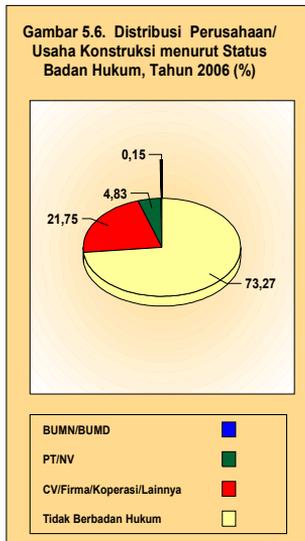
Distribusi perusahaan menurut kelompok banyaknya pekerja dapat dilihat pada Tabel 5.3, yang menunjukkan sekitar 77,87 persen perusahaan/usaha Konstruksi adalah usaha dengan jumlah pekerja antara 1 sampai 4 orang. Sedangkan usaha Konstruksi dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang sebesar 19,40 persen. Sisanya sekitar 2,72 persen adalah perusahaan/usaha Konstruksi dengan tenaga kerja di atas 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Konstruksi banyak digerakkan oleh usaha perorangan atau usaha Konstruksi yang mempekerjakan 1 sampai 4 juta orang. Secara lebih rinci terlihat bahwa sebagian besar perusahaan/usaha Konstruksi adalah perusahaan/usaha Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil (golongan 452) dengan tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Persentase perusahaan/usaha di kelompok ini mencapai 68,65 persen. Selanjutnya disusul oleh usaha sejenis dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang yang persentasenya sekitar 17,44 persen.

Untuk mengetahui batasan kemampuan perusahaan/usaha Konstruksi dalam mengerjakan suatu proyek, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi lainnya telah melakukan penggolongan perusahaan/usaha Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK). Tabel 5.4. menunjukkan secara umum perusahaan/usaha Konstruksi adalah perusahaan/usaha non kualifikasi antara lain pemborong bangunan di rumah tangga yang tidak memiliki badan hukum, yang persentasenya sekitar 77,71 persen dari total perusahaan/usaha Konstruksi. Hal ini menunjukkan persentase perusahaan/usaha Konstruksi yang tidak memiliki SBUJK, baik yang dikeluarkan oleh LPJK maupun Asosiasi Konstruksi, cukup besar. Jika dilihat lebih rinci persentase perusahaan/usaha non kualifikasi pada penyelesaian

Sebagian besar perusahaan/usaha Konstruksi adalah perusahaan/usaha Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil yang mempekerjakan 1 sampai 4 orang.

Gambar 5.5. Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Golongan Pokok, Tahun 2006 (%)





Konstruksi Gedung (kode 454) merupakan yang paling besar dimana persentasenya mencapai 93,79 persen.

Di sisi lain, persentase perusahaan/usaha Konstruksi yang mampu mengerjakan proyek di atas 10 miliar relatif kecil. Secara umum kurang dari 1 persen perusahaan/usaha Konstruksi yang mampu mengerjakan proyek di atas 10 miliar (kategori B). Persentase perusahaan/usaha berkategori B terbesar adalah pada usaha Penyewaan Alat Konstruksi atau Peralatan Bongkar/Penghancur Bangunan dengan Operator (golongan 455) yang mencapai 2,12 persen. Untuk kualifikasi lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Distribusi perusahaan konstruksi menurut status badan hukum menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha konstruksi tidak berbadan hukum. Gambar 5.6. menunjukkan persentase perusahaan/usaha Konstruksi yang tidak berbadan hukum sekitar 73,27 persen dari total usaha Konstruksi. Sementara perusahaan/usaha Konstruksi yang berbentuk CV dan PT/NV masing-masing sebesar 21,75 persen dan 4,83 persen. Sedangkan yang berstatus BUMN/BUMD hanya kurang dari 1 persen. Hal ini menunjukkan kelembagaan perusahaan/usaha konstruksi belum cukup kuat, terutama pada

Tabel 5.4. Distribusi Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Kualifikasi Perusahaan, Tahun 2006 (%)

Golongan Pokok (1)	Kualifikasi Perusahaan/Usaha							Jumlah (9)
	B (2)	M1 (3)	M2 (4)	K1 (5)	K2 (6)	K3 (7)	NK (8)	
451 Penyiapan Lahan	0,84	1,96	1,82	1,82	12,89	3,92	76,75	100,00
452 Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	0,86	1,02	1,10	4,20	9,23	7,10	76,49	100,00
453 Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil	2,01	1,41	1,02	3,65	8,08	6,81	77,02	100,00
454 Penyelesaian Konstruksi Gedung	0,54	0,48	0,31	0,91	2,09	1,88	93,79	100,00
455 Penyewaan Alat Konstruksi atau Peralatan Bongkar/Penghancur Bangunan dengan operator	2,12	2,65	2,12	8,22	8,75	4,51	71,62	100,00
Jumlah	0,88	1,01	1,05	3,94	8,70	6,71	77,71	100,00

Keterangan:

- B : kelompok perusahaan/usaha yang mampu mengerjakan proyek di atas 10 miliar
- M1 : kelompok perusahaan/usaha yang mampu mengerjakan proyek antara 3 s/d 10 miliar
- M2 : kelompok perusahaan/usaha yang mampu mengerjakan proyek antara 1 s/d 3 miliar
- K1 : kelompok perusahaan/usaha yang mampu mengerjakan proyek antara 400 juta s/d 1 miliar
- K2 : kelompok perusahaan/usaha yang mampu mengerjakan proyek antara 100 juta s/d 400 juta
- K3 : kelompok perusahaan/usaha yang mampu mengerjakan proyek di bawah 100 juta
- NK : Non-kualifikasi adalah kelompok perusahaan/usaha konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi baik yang dikeluarkan oleh LPJK maupun Asosiasi

Sumber : diolah dari SE06-Listing

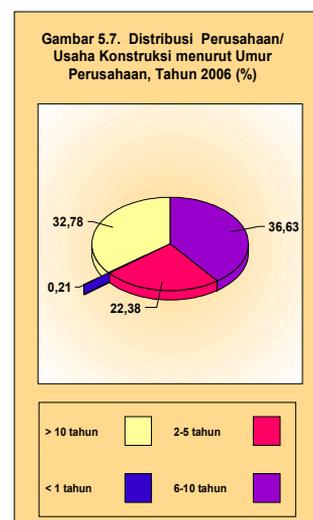
perusahaan/usaha konstruksi yang tenaga kerja berjumlah 1 sampai 4 orang. Termasuk dalam kategori ini adalah tukang bangunan yang bekerja borongan dan ikut menanggung resiko. Lemahnya kelembagaan suatu organisasi sangat berpengaruh pada kelangsungan organisasi tersebut. Perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum, mudah untuk gulung tikar/bangkrut dibandingkan perusahaan berstatus PT/NV. Selain itu, perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum banyak yang merupakan perusahaan perorangan /keluarga sehingga kebijakan yang diambil banyak yang tidak berpihak kepada pekerja/buruh.

Disamping itu data juga menunjukkan bahwa masih banyak usaha Konstruksi yang belum mempunyai tempat usaha khusus. Hanya 26,85 persen perusahaan/usaha Konstruksi yang berada di bangunan khusus untuk usaha. Sementara perusahaan/usaha Konstruksi lebih banyak menempati bangunan campuran atau bangunan yang dipakai untuk usaha dan tempat tinggal. Persentase perusahaan/usaha kelompok ini sekitar 73 persen. Hal ini terjadi karena sebagian perusahaan/usaha Konstruksi adalah usaha Konstruksi dan Bangunan Sipil dengan tenaga kerja antara 1-4 orang yang kadang-kadang pekerjanya tinggal di proyek sehingga tidak menempati bangunan khusus usaha.

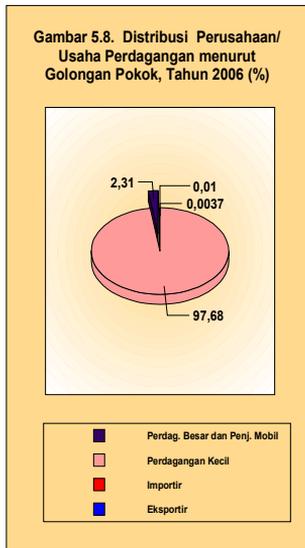
Gambar 5.7. menunjukkan distribusi perusahaan konstruksi menurut umur perusahaan yang dilihat dari tahun berdiri perusahaan secara komersial. Secara umum sebagian besar perusahaan/usaha konstruksi berumur 6 tahun ke atas, yang persentasenya mencapai sekitar 69,41 persen. Sementara itu sekitar 31 persen perusahaan/usaha konstruksi berumur di bawah 6 tahun.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha Konstruksi adalah usaha Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil. Selain itu sebagian besar usaha konstruksi adalah usaha tidak berbadan hukum, non kualifikasi, memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang, berumur di atas 6 tahun dan tidak mempunyai tempat usaha khusus.

Sebagian besar perusahaan/usaha Konstruksi menempati bangunan campuran (73 persen), hanya 27 persen yang berada di bangunan khusus untuk usaha.



Gambar 5.8. Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Golongan Pokok, Tahun 2006 (%)



5.4. Perdagangan Besar dan Eceran (Kategori G)

Hasil Listing SE06 menunjukkan jumlah usaha perdagangan besar dan eceran mencapai sekitar 10,30 juta perusahaan/usaha. Jika dilihat distribusi jumlah perusahaan terlihat bahwa perusahaan/usaha Perdagangan Besar dan Eceran lebih didominasi oleh usaha Perdagangan Eceran (kode 52). Gambar 5.8. menunjukkan persentase perusahaan/usaha Perdagangan Eceran mencapai sekitar 97,68 persen. Sisanya sekitar 2,31 persen adalah usaha Perdagangan Besar dan Penjualan Mobil (kode 50 dan 51) sedangkan perusahaan/usaha Eksportir (kode 53) dan perusahaan/usaha Importir (54) kurang dari 0,015 persen.

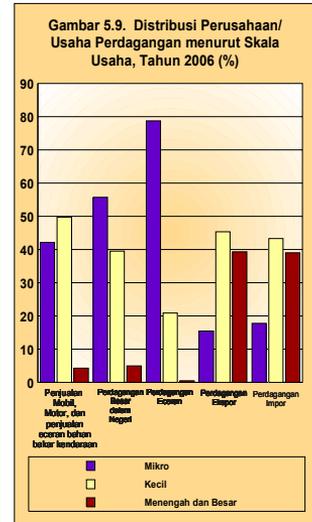
Secara lebih rinci terlihat bahwa sebagian besar usaha Perdagangan Eceran adalah usaha Perdagangan Eceran Barang-barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau selain di Supermarket/Minimarket (kode 52112) yang persentasenya mencapai 26,5 persen dari total usaha Perdagangan Eceran. Selanjutnya disusul oleh usaha Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian (Kode 52721) dan Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Kode 52722). Persentase kedua usaha tersebut masing-masing sebesar 7 persen dan 5,36 persen dari keseluruhan usaha Perdagangan Eceran.

Tabel 5.5. Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Golongan Pokok dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)

Kode	Golongan Pokok	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah dan Besar	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	Penjualan Mobil, Sepeda Motor, dan Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	42,04	49,66	8,29	100,00
51	Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor dan Impor (kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor)	55,66	39,46	4,88	100,00
52	Perdagangan Eceran kecuali Mobil dan Sepeda Motor	78,69	20,87	0,45	100,00
53	Perdagangan Ekspor kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor	15,38	45,34	39,29	100,00
54	Perdagangan Impor kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor	17,77	43,24	38,99	100,00
	Total	77,82	21,56	0,62	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Bila dirinci menurut skala usaha, sekitar 77,82 persen usaha Perdagangan Besar dan Eceran dikategorikan sebagai usaha mikro. Sedangkan usaha yang berskala kecil sekitar 21,56 persen, sementara sisanya sekitar 0.62 persen merupakan usaha skala menengah dan besar. Gambar 5.9. menunjukkan bahwa usaha Penjualan Mobil, Sepeda Motor dan Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan (golongan 50), usaha Perdagangan Besar Dalam Negeri (golongan 51) dan usaha Perdagangan Eceran (golongan 52) lebih didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Pada usaha Perdagangan Dalam Negeri sekitar 55,66 persen adalah usaha berskala mikro dan 39,46 persen berskala kecil. Sedangkan untuk usaha Perdagangan Eceran sekitar 78,69 persen berskala mikro dan 20,87 persen berskala kecil. Sementara untuk usaha Perdagangan Ekspor (Kode 53) dan usaha Perdagangan Impor (Kode 54) lebih didominasi oleh usaha yang berskala kecil dan menengah/besar.

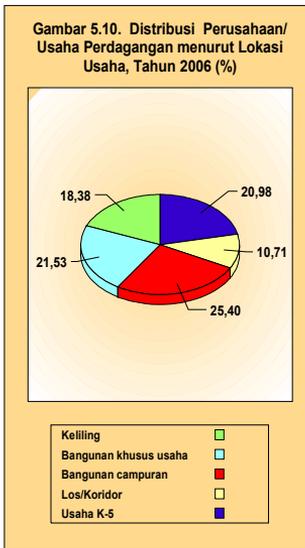


Jika dilihat menurut badan hukum terlihat bahwa sebagian besar perusahaan/usaha Perdagangan Besar dan Eceran tidak berbadan hukum, yang persentasenya mencapai 96 persen. Pada Perdagangan Eceran (Kode 52) persentase perusahaan/usaha tidak berbadan hukum mencapai 96,18 persen. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar perusahaan/usaha Eceran adalah usaha perorangan dengan rata-rata tenaga kerja per perusahaan sebanyak 2 orang. Sedangkan perusahaan/usaha Perdagangan Besar (termasuk penjualan mobil) yang tidak berbadan hukum mencapai 88,20 persen. Sebaliknya, hampir seluruh perusahaan/usaha eksportir

Tabel 5.6. Distribusi Perusahaan/Usaha Perdagangan menurut Status Badan Hukum dan Golongan Pokok, Tahun 2006 (%)

Status Badan Hukum	Perdagangan Besar	Perdagangan Eceran	Eksportir	Importir	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berbadan Hukum	88,20	96,18	15,28	13,00	95,99
Tidak Berbadan Hukum	11,80	3,82	84,72	87,00	4,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: diolah dari SE06-Listing



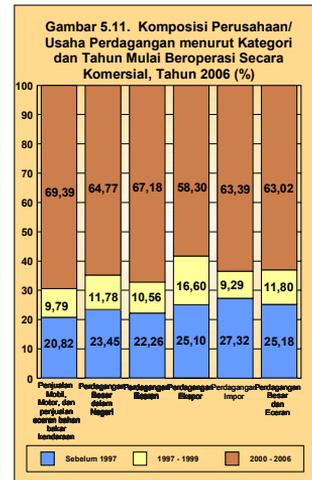
Sekitar 28,40 persen perusahaan/usaha Perdagangan Besar menempati bangunan campuran, ini menunjukkan bahwa sebagian usaha belum dikelola secara profesional sehingga lokasi usahanya masih bercampur dengan tempat tinggal.

dan importir adalah perusahaan/usaha berbadan hukum. Tabel 5.6. menunjukkan bahwa seluruh perusahaan/usaha Importir berbadan hukum. Sementara hanya 15,28 persen perusahaan/usaha Eksportir berbadan hukum. Dengan demikian terdapat sekitar 84,72 persen dari perusahaan/usaha Eksportir yang tidak berbadan hukum.

Daya serap kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di kategori lapangan usaha ini. Hasil SE06 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan/usaha Perdagangan Besar dan Eceran tercatat sebanyak 17,2 juta orang. Dari jumlah tersebut sekitar 95 persen bekerja di perusahaan/usaha Perdagangan Eceran. Selanjutnya 4,86 persen bekerja di perusahaan/usaha Perdagangan Besar dan sisanya bekerja pada perusahaan/usaha Perdagangan Lainnya. Jika dilihat menurut rata-ratanya terlihat bahwa tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha Eceran hanya sebanyak 2 orang per perusahaan dan yang bekerja pada perusahaan/usaha Perdagangan Besar sebanyak 4 orang. Sedangkan yang bekerja pada perusahaan/usaha Eksportir dan Importir masing-masing sebanyak 239 orang dan 263 orang.

Distribusi perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran menurut lokasi usaha menunjukkan bahwa sekitar 50 persen usaha Perdagangan Besar dan Eceran berada di dalam bangunan, yaitu 21,53 persen pada bangunan khusus usaha dan 28,40 persen pada bangunan campuran. Banyaknya usaha yang berada di dalam bangunan campuran menunjukkan bahwa sebagian usaha perdagangan belum dikelola secara profesional sehingga lokasi tempat usahanya masih bercampur dengan tempat tinggal. Sedangkan perusahaan/usaha Perdagangan Besar dan Eceran yang merupakan usaha kaki lima adalah sebesar 20,98 persen dan yang merupakan usaha keliling sebesar 18,38 persen. Sementara perusahaan/usaha yang berusaha di tempat tetap namun bukan bangunan (los/koridor) sebesar 10,71 persen (Gambar 5.10).

Kelangsungan kegiatan perusahaan/usaha sangat menentukan kinerja perusahaan/usaha tersebut. Untuk mengetahui kelangsungan atau lamanya kegiatan suatu perusahaan/usaha berlangsung dapat dilihat dari tahun mulai beroperasi secara komersial. Gambar 5.11. menunjukkan bahwa lebih dari 63 persen perusahaan/usaha Perdagangan Besar dan Eceran mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2000 atau sesudahnya, sedangkan 11,88 persen berdiri antara tahun 1997-1999 dan sekitar 25 persen berdiri sebelum tahun 1997. Meskipun secara rata-rata komposisi perusahaan menurut tahun berdiri hampir sama, ada beberapa kecenderungan sebagai berikut: Usaha Penjualan Mobil, Sepeda Motor dan Mobil (Kode 50) dan usaha Perdagangan Eceran (Kode 52) memiliki persentase perusahaan/usaha yang beroperasi secara komersial antara tahun 2000 sampai 2006 yang relatif lebih besar dibandingkan usaha lainnya. Demikian juga, perusahaan/usaha Ekspor yang beroperasi secara komersial antara tahun 2000 sampai 2006 memiliki persentase yang paling besar diantara usaha lainnya. Sedangkan perusahaan/usaha Usaha Penjualan Mobil, Sepeda Motor dan Mobil yang beroperasi secara komersial tahun 2000-2006 memiliki persentase yang paling besar diantara usaha lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan/usaha Perdagangan Dalam Negeri lebih banyak berdiri dibandingkan perusahaan perdagangan luar negeri.



Dari ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha Perdagangan Besar dan Eceran lebih didominasi oleh usaha Perdagangan Eceran, berskala mikro, dan tidak berbadan hukum. Selain itu terlihat bahwa sebagian besar usaha Perdagangan Besar dan Eceran beroperasi secara komersial setelah tahun 2000.

5.5. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori H)

5.5.1. Penyediaan Akomodasi

Penyediaan akomodasi didefinisikan sebagai usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang pada umumnya dilakukan secara komersial. Penyediaan akomodasi meliputi: hotel (bintang dan melati), penginapan remaja (*youth hostel*), pondok wisata (*homestay*), bumi perkemahan, persinggahan karavan dan jasa akomodasi lainnya.

Tabel 5.7. menjelaskan jumlah perusahaan/usaha, jumlah tenaga kerja beserta distribusinya dari usaha Penyediaan Akomodasi. Hasil Listing SE06 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan/usaha Penyediaan Akomodasi sebanyak 16.404 perusahaan/usaha sedangkan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sekitar 247,5 ribu orang. Secara rata-rata jumlah tenaga kerja yang bekerja

Tabel 5.7. Jumlah Perusahaan/Usaha, Tenaga Kerja, dan Tenaga Kerja per Perusahaan Penyediaan Akomodasi, Tahun 2006

Kode	Golongan Pokok	Jumlah Perusahaan/Usaha		Jumlah Tenaga Kerja (orang)		Tenaga kerja/per perusahaan (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55111	Hotel Bintang Lima	91	0,55	48 601	19,64	534
55112	Hotel Bintang Empat	156	0,95	30 479	12,32	195
55113	Hotel Bintang Tiga	271	1,65	30 858	12,47	114
55114	Hotel Bintang Dua	243	1,48	13 718	5,54	56
55115	Hotel Bintang Satu	316	1,93	11 273	4,56	36
55120	Hotel Melati	6 677	40,70	79 583	32,16	12
55130	Penginapan Remaja	421	2,57	2 363	0,95	6
55140	Pondok Wisata	2 446	14,91	10 439	4,22	4
55150	Bumi Perkemahan	15	0,09	153	0,06	10
55160	Persinggahan Karavan	7	0,04	38	0,02	5
55190	Jasa Akomodasi Lainnya	5 761	35,12	19 976	8,07	3
Jumlah		16 404	100,00	247 481	100,00	15

Keterangan: angka miring menunjukkan persentase terhadap total

Sumber : diolah dari SE06-Listing

di tiap perusahaan/usaha penyediaan akomodasi sebesar 15 orang per perusahaan.

Secara umum, usaha Penyediaan Akomodasi didominasi oleh dua jenis akomodasi, yaitu Hotel Melati dan Pondok Wisata. Persentase Hotel Melati mencapai 40,86 persen dari total usaha akomodasi sedangkan Pondok Wisata sekitar 14,91 persen. Selanjutnya sekitar 34,99 persen dari usaha Akomodasi adalah usaha Akomodasi Lainnya. Sementara itu persentase hotel berbintang (bintang satu sampai lima) hanya sekitar 6,55 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa usaha Penyediaan Akomodasi masih sangat besar peluangnya untuk dikembangkan terutama mengingat keterkaitannya dengan usaha pariwisata di Indonesia. Sebagai negara tujuan pariwisata, ketersediaan sarana akomodasi yang memadai sangat diharapkan oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.

Sebagai negara tujuan pariwisata, ketersediaan sarana akomodasi yang memadai sangat diharapkan oleh wisatawan terutama wisatawan mancanegara.

Sementara itu, distribusi jumlah tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja pada perusahaan/usaha Hotel Melati merupakan yang terbesar diantara jenis Akomodasi Lainnya. Tabel 5.7. menunjukkan persentase jumlah tenaga kerja yang bekerja di Hotel Melati sekitar 32,23 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di usaha Penyediaan Akomodasi. Sedangkan yang bekerja pada bintang lima, bintang empat dan bintang tiga masing-masing sebesar 19,64 persen, 12,32 persen dan 12,49 persen. Namun, secara rata-rata daya serap tenaga kerja untuk setiap jenis perusahaan/usaha Penyediaan Akomodasi menunjukkan semakin tinggi status bintang semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap. Setiap hotel bintang lima mampu menyerap sekitar 534 orang tenaga kerja, sedangkan setiap Hotel Berbintang lainnya (bintang satu sampai empat) mampu menyerap 36 sampai 194 orang tenaga kerja. Sementara itu rata-rata Hotel Melati hanya menyerap sekitar 12 orang tenaga kerja per perusahaan/usaha. Hal ini cukup bisa dimengerti mengingat daya tampung hotel bintang lima yang jauh lebih besar dibanding hotel melati sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan usaha ini cukup besar.

5.5.2. Penyediaan Makan dan Minum

Meskipun jumlah usaha Bar hanya 464 unit, namun rata-rata tenaga kerja per usaha tercatat paling besar, yaitu 11 orang.

Tabel 5.8. menunjukkan jumlah perusahaan/usaha penyediaan makan minum hasil listing SE06. Jumlah perusahaannya tercatat sebanyak 3,0 juta perusahaan/usaha. Sementara tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha ini sekitar 4,9 juta orang. Dengan demikian, secara rata-rata setiap perusahaan/usaha Penyediaan Makan dan Minum mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Diantara jenis usaha Penyediaan Makan dan Minum, usaha Bar tercatat paling banyak menyerap tenaga kerja per perusahaan yaitu sekitar 11 orang per perusahaan.

Distribusi jumlah perusahaan/usaha dan jumlah tenaga kerja usaha Penyediaan Makan dan Minum menunjukkan persentase keduanya tidak sejalan. Persentase usaha penjual makanan dan minuman keliling mencapai 28,54 persen, tetapi total tenaga kerja yang bekerja di usaha ini hanya sekitar 19,29 persen total usaha penyediaan makanan. Sebaliknya, meskipun persentase usaha warung makan hanya 27,48 persen dari total usaha penyediaan makan minum, namun tenaga kerja yang mampu diserap telah mencapai 36,22 persen. Perkecualian pada usaha Kedai Makanan dan Minuman di mana jumlah perusahaan dan tenaga kerjanya sekitar 42,88 persen dan 40,06 persen.

Tabel 5.8. Jumlah Perusahaan/Usaha Tenaga Kerja, Tenaga Kerja dan Rata-rata Tenaga Kerja per Perusahaan, Tahun 2006

Kode	Golongan Pokok	Jumlah Perusahaan/Usaha		Jumlah Tenaga Kerja (orang)		Rata-rata Tenaga Kerja per Perusahaan (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5521	Restoran/Rumah Makan	15 802	0,53	139 854	2,86	9
5522	Warung Makan	823 936	27,48	1 771 119	36,22	2
5523	Bar	464	0,02	4 929	0,10	11
5524	Kedai Makanan dan Minuman	1 285 601	42,88	1 958 838	40,06	2
5525	Penjual Makanan dan Minuman Keliling/Tempat tidak tetap	855 784	28,54	943 206	19,29	1
5526	Jasa Boga (Catering)	16 755	0,56	71 773	1,47	4
	Jumlah	2 998 342	100,00	4 889 719	100,00	2

Keterangan: angka miring menunjukkan persentase terhadap total

Sumber : diolah dari SE06-Listing

5.6. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (Kategori I)

Gambaran tentang jumlah dan persentase perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi beserta persentasenya berdasarkan hasil listing SE06 dapat dilihat dari Tabel 5.9. Jumlah perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi pada tahun 2006 sekitar 2,7 juta perusahaan/usaha. Dari jumlah tersebut sekitar 88,84 persen merupakan perusahaan/usaha Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa, sementara sebesar 8,13 persen adalah usaha Pos dan Komunikasi. Sisanya merupakan usaha Angkutan Air, Angkutan Udara dan Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan dan Jasa Perjalanan Wisata.

Persentase terbesar baik jumlah perusahaan/usaha maupun jumlah tenaga kerja pada kategori lapangan usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi adalah KBLI kode 60 yaitu Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa.

Sementara itu jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sekitar 3,6 juta orang. Sama dengan persentase jumlah perusahaan/usahanya, persentase tenaga kerja terbesar terdapat pada perusahaan/usaha Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa (Kode 60) yang mencapai 2,7 juta orang atau sekitar 76,46 persen. Selanjutnya disusul oleh usaha pos dan telekomunikasi (Kode 64) sebanyak 511,4 ribu orang (14,36 persen), jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan wisata sebanyak 228,4 ribu

Tabel 5.9. Jumlah dan Persentase Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Tahun 2006

Kode	Golongan Pokok	Jumlah Perusahaan/Usaha		Jumlah Tenaga Kerja (orang)	
		(3)	(4)	(5)	(6)
60	Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa	2 400 888	88,84	2 722 941	76,46
61	Angkutan Air	37 642	1,39	80 275	2,26
62	Angkutan Udara	372	0,01	18 064	0,51
63	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan dan Jasa Perjalanan wisata	43 998	1,63	228 374	6,41
64	Pos dan Telekomunikasi	219 643	8,13	511 402	14,36
	Jumlah	2 702 543	100,00	3 561 056	100,00

Keterangan: angka miring menunjukkan persentase

Sumber : diolah dari SE06-Listing

orang (6,41 persen) serta usaha angkutan air sebanyak 80,3 ribu orang (2,25 persen).

Secara umum, persentase perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi yang berbadan hukum mendominasi di masing-masing KBLI 2 digit kecuali pada KBLI 62, yaitu Angkutan Udara yang mayoritas merupakan perusahaan/usaha yang berbadan hukum.

Tabel 5.10. menggambarkan distribusi perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurut status badan hukum. Secara umum distribusi perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurut status badan hukum untuk setiap golongan pokok menunjukkan kecenderungan yang sama, kecuali untuk perusahaan/usaha Angkutan Udara dan perusahaan/usaha Pos dan Telekomunikasi. Sebagian besar perusahaan/usaha di kategori Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi tidak berbadan hukum, yang persentasenya mencapai 95,67 persen dan sekitar 4 persen yang berbadan hukum. Sebaliknya persentase perusahaan/usaha Angkutan Udara yang tidak berbadan hukum hanya sebesar 3,49 persen. Sebagian besar perusahaan/usaha Angkutan Udara berstatus PT/NV dimana persentasenya mencapai 68,82 persen. Sedangkan yang berstatus BUMN/ BUMD dan perwakilan asing masing-masing sekitar 12,63 persen dan 7,80 persen. Pada perusahaan/usaha Pos dan Telekomunikasi sekitar 70,21 persen tidak berbadan hukum dan 22,56 persen statusnya mendapat ijin khusus dari instansi.

Tabel 5.10. Distribusi Perusahaan/Usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurut Status Badan Hukum, Tahun 2006 (%)

Kode	Golongan Pokok	Status Badan Hukum/Usaha						Total
		BUMN/ BUMD	PT/NV	CV/Firma/ Koperasi/ Yayasan	Ijin Khusus dari Instansi	Perwakilan Perusahaan Asing	Tidak Berbadan Hukum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
60	Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa	0,01	0,08	0,11	1,27	0,00	98,53	100,00
61	Angkutan Air	0,14	1,98	0,21	3,49	0,00	94,18	100,00
62	Angkutan Udara	12,63	68,82	2,69	4,57	7,80	3,49	100,00
63	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan dan Jasas Perjalanan wisata	0,74	17,19	4,76	8,41	0,04	68,85	100,00
64	Pos dan Telekomunikasi	0,76	2,54	3,92	22,56	0,00	70,21	100,00
Jumlah		0,09	0,59	0,50	3,15	0,00	95,67	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Sementara itu, distribusi perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan, Pos dan Telekomunikasi menurut jaringan dapat dilihat dari Tabel 5.11. Data menunjukkan bahwa sebagian besar usaha ini merupakan usaha tunggal dengan persentase mencapai 99,48 persen. Perkecualian hanya untuk usaha Angkutan Udara, dimana sebagian besar perusahaan/usaha merupakan kantor cabang dengan persentase mencapai 48,66 persen. Pada usaha ini hanya sekitar 22,58 persen yang merupakan perusahaan/usaha tunggal. Selain itu terdapat sekitar 18,82 persen perusahaan/usaha yang merupakan perwakilan. Dengan demikian terlihat bahwa usaha angkutan mempunyai jaringan yang lebih luas dibandingkan jenis usaha lainnya.

Sebagian besar perusahaan/usaha Transportasi, Pergudangan, Pos dan Telekomunikasi merupakan perusahaan/usaha tunggal (99,48 persen) kecuali untuk perusahaan/usaha Angkutan Udara yang sebagian besar merupakan kantor cabang (48,66 persen).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usaha Transportasi adalah usaha Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa. Perusahaan/usaha Transportasi didominasi oleh usaha tidak berbadan hukum dan merupakan perusahaan tunggal.

Tabel 5.11. Distribusi Perusahaan/Usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurut Jaringan, Tahun 2006 (%)

Golongan Pokok (1)	Jaringan Perusahaan/Usaha					Jumlah (7)
	Tunggal (2)	Kantor Pusat/Induk (3)	Cabang (4)	Perwakilan (5)	Unit Pembantu (6)	
60 Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa	99,92	0,01	0,06	0,00	0,01	100,00
61 Angkutan Air	98,86	0,16	0,90	0,04	0,03	100,00
62 Angkutan Udara	22,58	5,65	48,66	18,82	4,30	100,00
63 Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan dan Jasa Perjalanan wisata	89,09	0,93	7,59	0,44	1,95	100,00
64 Pos dan Telekomunikasi	97,00	0,16	2,63	0,03	0,17	100,00
Jumlah	99,48	0,04	0,41	0,02	0,05	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

5.7. Perantara Keuangan (Kategori J).

Sejalan dengan distribusi perusahaan/usaha Perantara Keuangan dimana usaha Koperasi Simpan Pinjam mendominasi sekitar 53,78 persen, penyerapan tenaga kerjanya juga tertinggi yaitu 40,88 persen.

Hasil listing SE06 menunjukkan jumlah perusahaan/usaha Lembaga Keuangan di Indonesia sebanyak 83,6 ribu. Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah Koperasi Simpan Pinjam yang persentasenya mencapai 53,71 persen. Disusul kemudian oleh Jasa Perantara Keuangan lainnya, seperti jasa akuisisi dan *merger, credit union, rentenir*, yang persentasenya sekitar 14,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan bukan bank lebih dominan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara persentase Bank Sentral, Bank Umum dan jasa moneter lainnya sekitar 2,59 persen. Secara lebih rinci, distribusi perusahaan/usaha lembaga keuangan dapat dilihat dari Tabel 5.12.

Tabel 5.12. Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan, Tahun 2006

Kode	Golongan Pokok	Jumlah Perusahaan		Jumlah Tenaga Kerja (orang)		Rata-rata Tenaga Kerja per perusahaan (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6511	Ban Sentral	37	0,04	5 782	0,64	156
6512	Bank Umum	10 811	12,93	284 727	31,46	26
6519	Jasa Perantara Moneter Lainnya	8 042	9,62	65 189	7,20	8
6591	Sewa Guna Usaha (Leasing)	211	0,25	7 712	0,85	37
6592	Pembiayaan Non Leasing	1 477	1,77	47 196	5,21	32
6593	Modal Ventura	53	0,06	1 356	0,15	26
6594	Pegadaian	821	0,98	6 405	0,71	8
6595	Koperasi Simpan Pinjam	44 905	53,71	370 008	40,88	8
6599	Jasa Perantara Keuangan Lainnya	12 520	14,97	24 212	2,68	2
6601	Asuransi Jiwa	1 875	2,24	53 440	5,90	29
6602	Dana Pensiun	218	0,26	2 601	0,29	12
6603	Asuransi Non Jiwa	643	0,77	16 131	1,78	25
6711	Administrasi Pasar Modal	6	0,01	462	0,05	77
6712	Jasa yang berkaitan dg efek	320	0,38	8 977	0,99	28
6713	Jasa Perantara Keuangan yg menunjang Kegiatan Administrasi Pasar Modal dan Jasa yg berkaitan dg efek	22	0,03	605	0,07	28
6719	Jasa Penunjang Keuangan Lainnya	1 385	1,66	6 300	0,70	5
6720	Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun	264	0,31	3 987	0,44	15
Jumlah		83 607	100,00	905 090	100,00	11

Keterangan: angka miring menunjukkan persentase
 Sumber : diolah dari SE06-Listing

Sementara itu jumlah tenaga kerja yang tercatat bekerja pada perusahaan/usaha Lembaga Keuangan sebanyak 905,1 ribu orang. Menurut persentasenya, tenaga kerja pada Lembaga Keuangan paling banyak bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam, disusul pada Bank Umum dan Jasa Perantara Moneter Lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, Baitul Maal dan WanTanmil. Persentase tenaga kerja yang bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam sekitar 40,88 persen dari total tenaga kerja di perusahaan/usaha Lembaga Keuangan. Meskipun jumlah perusahaan/usaha Bank Umum hanya sekitar 12,93 persen, namun jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha tersebut mencapai 31,46 persen.

Usaha Koperasi Simpan Pinjam mendominasi jumlah perusahaan/usaha pada kategori lapangan usaha Lembaga Keuangan, yang sebagian besar berstatus sebagai perusahaan tunggal.

Secara rata-rata jumlah tenaga kerja pada Lembaga Keuangan sebanyak 11 orang per perusahaan. Distribusi rata-rata tenaga kerja per perusahaan bervariasi antara 2 sampai 156 orang per perusahaan. Rata-rata tertinggi tenaga kerja per perusahaan adalah pada Bank Sentral dimana setiap perusahaan/usaha Bank Sentral memiliki tenaga kerja sebanyak 156 orang. Sedangkan Jasa Perantara Keuangan Lainnya memiliki rata-rata terendah yaitu sekitar 2 orang per perusahaan/usaha.

Tabel 5.13 menggambarkan persentase perusahaan/usaha Lembaga Keuangan menurut jaringan perusahaan/usaha. Jaringan perusahaan/usaha Lembaga Keuangan menunjukkan sebagian besar perusahaan/usaha merupakan usaha tunggal yang persentasenya sekitar 75,34 persen. Selanjutnya disusul oleh perusahaan/usaha yang berbentuk cabang sebesar 17,67 persen dan unit pembantu sebesar 5,36 persen.

Jika dilihat lebih rinci terlihat bahwa sebagian besar perusahaan/usaha Bank Sentral, Bank Umum, Pembiayaan Non Leasing, Pegadaian, Asuransi Jiwa, dan Asuransi Non Jiwa merupakan perusahaan cabang. Hal ini berarti bahwa sebagian besar perusahaan/usaha tersebut merupakan usaha yang diperbolehkan menjalankan semua kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyeleng-

Tabel 5.13. Distribusi Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan menurut Sub Kelompok KBLI dan Jaringan Perusahaan/Usaha, Tahun 2006 (%)

Kode	Golongan Pokok	Jaringan Perusahaan/Usaha					Jumlah
		Tunggal	Pusat/Induk	Cabang	Perwakilan	Unit Pembantu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6511	Bank Sentral	0,00	2,70	94,44	0,00	2,78	100,00
6512	Bank Umum	2,26	1,03	60,20	0,50	36,02	100,00
6519	Jasa Perantara Moneter lainnya	77,75	3,58	13,54	0,25	4,87	100,00
6591	Sewa Guna (Leasing)	32,23	7,11	55,46	1,90	3,32	100,00
6592	Pembiayaan Non Leasing	34,87	2,03	59,92	1,62	1,56	100,00
6593	Modal Ventura	52,83	13,21	30,19	3,77	0,00	100,00
6594	Pegadaian	25,94	0,00	73,45	0,24	0,37	100,00
6595	Koperasi Simpan Pinjam	92,42	1,00	6,35	0,05	0,19	100,00
6599	Jasa Perantara Keuangan Lainnya	99,03	0,14	0,77	0,02	0,04	100,00
6601	Asuransi Jiwa	2,29	2,29	89,28	3,41	2,72	100,00
6602	Dana Pensiun	83,03	8,72	4,59	2,75	0,92	100,00
6603	Asuransi Non Jiwa	9,33	5,75	79,16	4,04	1,71	100,00
6711	Administrasi Pasar Modal	66,67	0,00	33,33	0,00	0,00	100,00
6712	Jasa yang berkaitan dg efek	51,88	11,56	33,75	1,56	1,25	100,00
6713	Jasa Perantara Keuangan yg menunjang Kegiatan Administrasi Pasar Modal dan Jasa yg berkaitan dg efek	63,64	9,09	18,18	4,55	4,55	100,00
6719	Jasa Penunjang Keuangan Lainnya	81,88	1,95	15,74	0,22	0,22	100,00
6720	Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun	65,13	7,28	25,57	1,15	0,76	100,00
Jumlah		75,34	1,32	17,67	0,28	5,36	100,00

Sumber : diolah dari SEO6-Listing

garakan tata usaha/pembukuan sendiri, namun dalam melakukan usahanya tetap mengacu pada tata-cara kantor pusatnya. Sementara sebagian besar perusahaan/usaha pada golongan Lembaga Keuangan lainnya lebih didominasi oleh perusahaan/usaha tunggal.

Kesimpulan yang bisa diambil untuk kategori Perantara Keuangan adalah bahwa kategori ini didominasi oleh usaha Koperasi Simpan Pinjam. Karena sebagian besar usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah usaha tunggal, maka sebagian besar perusahaan/usaha Perantara Keuangan merupakan perusahaan/usaha tunggal.

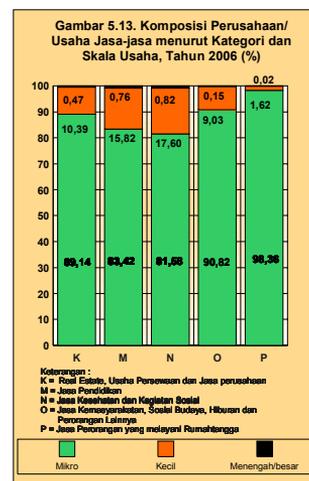
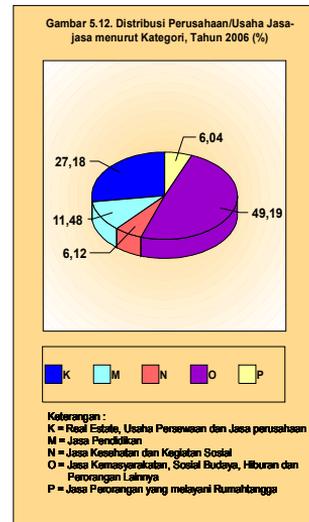
5.8. Jasa-jasa (Kategori K sampai P)

Pertumbuhan sektor jasa-jasa terus meningkat selama kurun 2002-2006. Jika pada tahun 2002

berdasarkan PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 pertumbuhan sektor Jasa-jasa hanya sebesar 3,75 persen, maka pada tahun 2006 telah mencapai 6,22 persen. Selain itu, berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku sumbangan sektor jasa-jasa juga menunjukkan peningkatan dari 8,89 persen menjadi 10,14 persen. Yang termasuk kategori lapangan usaha Jasa-jasa dalam bab ini adalah kegiatan yang termasuk dalam kategori K sampai P. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan usaha Real Estat, usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (kategori K), Jasa Pendidikan (kategori M), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (kategori N), Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya (Kategori O) dan Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga (Kategori P).

Hasil listing SE06 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan/usaha jasa-jasa sekitar 2,9 juta. Gambar 5.12. menunjukkan sekitar 49,19 persen perusahaan/usaha Jasa-jasa adalah perusahaan/usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya (Kategori O). Setelah kategori O, urutan persentase jumlah perusahaan adalah sebagai berikut: Usaha Real Estat, usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (Kategori K) sebesar 27,18 persen, Jasa Pendidikan (Kategori M) sebesar 11,48 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori N) sebesar 6,12 persen dan Jasa Perorangan Lainnya sebesar 6,04 persen.

Sementara distribusi perusahaan/usaha menurut skala usaha, komposisi jumlah perusahaan/usaha Jasa-jasa menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha Jasa-jasa berskala mikro (89,46 persen). Sementara usaha Jasa-jasa berskala kecil sekitar 10,21 persen, sisanya merupakan usaha berskala menengah dan besar. Gambar 5.13. menunjukkan persentase usaha mikro terbesar ada pada perusahaan/usaha Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga (kategori P) yang persentasenya mencapai 98,36 persen. Sebaliknya perusahaan/usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (kategori N) memiliki persentase usaha mikro terkecil yang hanya sekitar 81,58 persen.



Lampiran 5.2. menjelaskan jumlah dan persentase perusahaan/usaha Jasa-jasa menurut skala usaha secara lebih rinci. Pada kategori Real Estate, usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (Kategori K) terlihat adanya variasi komposisi usaha menurut skala usaha. Pada perusahaan/usaha Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (tanpa operator), Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi (Kode 71) sebagian usahanya berskala mikro dengan persentase mencapai 87,07 persen sisanya kurang dari 13 persen berskala kecil, menengah dan besar. Sedangkan pada perusahaan/usaha Penelitian dan Pengembangan Swasta (Kode 73) hanya sekitar 32,57 persen yang berskala mikro, sekitar 44 persen berskala kecil dan sisanya sekitar 23,43 persen berskala menengah dan besar.

Sebagian besar perusahaan/usaha Jasa Pendidikan Dasar dan Jasa Pendidikan Lainnya merupakan perusahaan/usaha berskala mikro, masing-masing 86,46 persen dan 85,15 persen. Sementara perusahaan/usaha berskala mikro pada kategori Jasa Pendidikan Menengah dan Jasa Pendidikan Tinggi hanya 45,89 persen dan 19,59 persen.

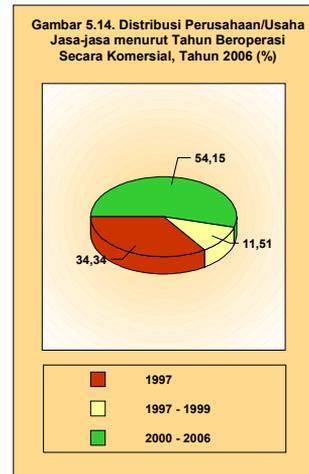
Hal yang sama juga terjadi pada kategori Jasa Pendidikan (kategori M) dimana hanya 2 dari 4 golongan pokok yang didominasi oleh usaha berskala mikro. Sebagian besar perusahaan/usaha Jasa Pendidikan Dasar (Kode 801) dan Jasa Pendidikan Lainnya (Kode 809) merupakan perusahaan/usaha berskala mikro. Persentase usaha mikro pada kedua golongan pokok ini masing-masing sekitar 86,46 persen dan 85,15 persen usahanya adalah usaha berskala mikro. Sementara perusahaan/usaha Jasa Pendidikan Menengah (Kode 802) yang berskala mikro hanya sekitar 45,89 persen. Bahkan persentase perusahaan/usaha Jasa Pendidikan Tinggi yang berskala mikro hanya sekitar 19,59 persen.

Pada perusahaan/usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori N) sekitar 80 persen merupakan usaha mikro. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada golongan pokoknya kecuali untuk perusahaan/usaha Jasa Sosial dimana hanya sekitar 60 persen usahanya yang merupakan usaha mikro. Sementara pada perusahaan/usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya (Kategori O) sekitar 90 persen merupakan usaha berskala mikro. Hanya usaha organisasi bisnis, pengusaha dan profesional (Kode 911) dan Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Budaya

Lainnya (Kode 923) yang persentase usaha mikronya kurang dari 70 persen.

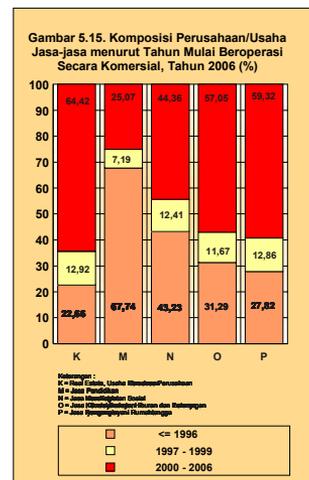
Sementara itu, distribusi perusahaan/usaha Jasa-jasa menurut jaringan menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan/usaha berbentuk tunggal. Perkecualian pada usaha Penelitian dan Pengembangan Swasta (Kode 73), Jasa Pendidikan Tinggi (Kode 803), dan Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Professional (Kode 911) dimana persentase usaha tunggal hanya sekitar 60 sampai 70 persen. Pada ketiga jenis usaha ini sekitar 16 sampai 25 persen perusahaan/usaha berbentuk cabang.

Tahun berdiri perusahaan/usaha dapat digunakan sebagai indikator kelangsungan kegiatan suatu perusahaan/usaha. Gambar 5.14. menunjukkan bahwa sekitar 54,15 persen perusahaan/usaha Jasa-jasa berdiri antara tahun 2000 sampai 2006. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 perusahaan/usaha Jasa-jasa mulai banyak berdiri. Sementara itu perusahaan yang mampu bertahan selama lebih dari 10 tahun hanya sekitar 34,34 persen. Sedangkan perusahaan/usaha yang berdiri antara tahun 1997-1999 atau berdiri selama krisis ekonomi sekitar 11,51 persen.



Hampir seluruh perusahaan/usaha jasa-jasa merupakan perusahaan tunggal, kecuali pada usaha penelitian dan pengembangan swasta, jasa pendidikan tinggi, dan organisasi bisnis, pengusaha dan profesional.

Distribusi perusahaan jasa-jasa menurut kategori dan tahun berdiri dapat dilihat dari Gambar 5.15 dimana hampir seluruh kategori mempunyai kecenderungan yang sama dimana sebagian besar usaha berdiri setelah tahun 2000. Hanya Jasa Pendidikan yang menunjukkan perbedaan dimana sekitar 67,74 persen perusahaan/usaha jasa pendidikan berdiri sebelum tahun 1996. Hal ini menunjukkan perusahaan/usaha jasa pendidikan mampu bertahan lama karena sifatnya yang akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat.



ANALISIS KEWILAYAHAN

6

<http://www.bps.go.id>

6.1. Umum

Salah satu landasan yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana Pengembangan Wilayah Ekonomi (*Regional Economic Development*) adalah analisis kewilayahan (*Spasial Analysis*). Tujuan dari pengembangan wilayah ekonomi adalah memfokuskan pengembangan perekonomian melalui peningkatan usaha di wilayah tertentu, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yang berkembang dengan baik merupakan sarana penting untuk menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Salah satu topik dari analisis kewilayahan adalah fenomena kluster. Fenomena ini telah menarik perhatian para ekonom untuk menganalisis kewilayahan, sehingga memunculkan paradigma baru yang disebut geografi ekonomi baru (*new economic geography* atau *geographical economics*) (Fujita & Thisse, 1996; Krugman, 1995; Lucas, 1988). Argumentasi ini dikuatkan kembali oleh Porter, bahwa peta ekonomi dewasa ini didominasi oleh apa yang dinamakan kluster (Porter, 1998). Hal senada juga dikemukakan oleh Kuncoro (2002) bahwa industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah di mana potensi mereka mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. Definisi kluster menurut Porter, adalah konsentrasi geografi dari perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi yang saling berhubungan dalam wilayah tertentu. Kuncoro lebih lanjut menguraikan bahwa kluster industri (*industrial cluster*) pada dasarnya merupakan kelompok produksi yang amat terkonsentrasi secara spasial dan biasanya berspesialisasi pada satu atau dua industri utama saja.

Kluster industri merupakan kelompok produksi yang amat terkonsentrasi secara spasial dan biasanya berspesialisasi pada satu atau dua industri utama saja (Kuncoro, 2002).

Pembangunan ekonomi di suatu negara tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Dinamika perekonomian secara global/dunia mempunyai pengaruh terhadap suatu negara, terutama bagi negara yang menganut sistem

perekonomian terbuka. Pengaruh globalisasi tersebut akan berdampak pada kebijakan ekonomi maupun kebijakan pembangunan yang diambil. Instrumen perekonomian suatu negara yang rentan akan pengaruh globalisasi, seperti nilai tukar mata uang, banyaknya investasi yang dilakukan oleh investor asing, perkembangan ekspor dan impor. Instrumen perekonomian tersebut yang mendukung dinamika perekonomian bagi negara yang menganut sistem perekonomian terbuka.

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan regional/wilayah lebih menitikberatkan pada daerah mana yang mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru menentukan sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan.

Pendekatan kewilayahan/regional maupun sektoral dalam perencanaan merupakan bagian hierarki pembangunan secara umum. Aziz (1994) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan mengikuti suatu hirarki. Hirarki pertama menunjukkan tujuan pembangunan, hirarki kedua menunjukkan sektor-sektor mana yang terpilih, hirarki ketiga menunjukkan daerah-daerah terpilih, dan hirarki keempat menunjukkan kebijakan siasat dan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Berbeda dengan pendekatan sektoral, pendekatan regional/wilayah lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Namun demikian hirarki ke dua dan ke tiga pada dasarnya dapat bertukar urutan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai.

Pendekatan regional haruslah dalam kerangka totalitas pembangunan. Penekanan pembangunan tidak hanya pada beberapa daerah tertentu, seperti daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau daerah yang diharapkan mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomi-politis. Mengingat arah yang dituju adalah gabungan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan wilayah/daerah perlu selalu mengkaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Menurut Glasson (1990), pada dasarnya pembangunan wilayah merupakan proses pengembangan wilayah melalui lima fase strata ekonomi secara berkelanjutan. Fase/urutan pertama adalah fase ekonomi *subsistence* yang ditandai dengan sebagian besar

penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Fase kedua, ditandai dengan berkembangnya lapangan usaha perdagangan, transportasi dan industri yang khusus (spesialisasi bagi industri pedesaan). Fase ketiga, ditandai dengan pengembangan usaha industri yang berkaitan lapangan usaha pertanian secara ekstensif seperti agroindustri (pengembangan usaha industri buah-buahan, peternakan, dll). Fase keempat, ditandai dengan pengembangan usaha industri pengolahan hasil pertanian dan usaha industri pengolahan lainnya. Fase kelima, ditandai dengan pengembangan usaha industri pengolahan untuk tujuan ekspor baik modal, keahlian maupun rekayasa.

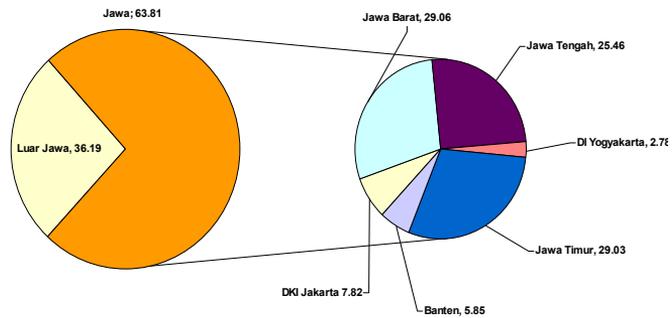
Fase pengembangan usaha atau proses pembangunan wilayah merupakan dasar bagi pengembangan komposisi perusahaan/usaha industri. Proses ini akan memberikan perubahan-perubahan dari pengurangan jumlah perusahaan/usaha skala kecil kepada penambahan jumlah perusahaan/usaha skala sedang maupun besar pada lokasi dan wilayah yang terpola. Hal ini terjadi karena perusahaan/usaha skala sedang atau besar yang bertambah akan berpindah ke wilayah pusat-pusat pertumbuhan.

6.2. Komposisi Jumlah Perusahaan/Usaha

Sebaran perusahaan/usaha menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi di pulau Jawa merupakan wilayah konsentrasi usaha. Sebanyak 63,81 persen atau 14,5 juta unit perusahaan/usaha berada di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Timur dan provinsi Jawa Tengah memiliki persentase banyaknya perusahaan/usaha yang lebih tinggi dibandingkan tiga provinsi lainnya di pulau Jawa. Ketersediaan infrastruktur yang cukup baik pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa merupakan salah satu faktor pendorong dan pendukung berkembangnya usaha-usaha ekonomi, baik usaha besar, menengah, kecil maupun mikro di pulau Jawa. Infrastruktur yang baik, seperti jalan dan telekomunikasi, akan memperlancar proses produksi maupun distribusi barang/jasa dalam wilayah yang bersangkutan.

Ketersediaan infrastruktur yang cukup baik pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa merupakan salah satu faktor pendorong dan pendukung berkembangnya usaha-usaha ekonomi baik usaha besar, menengah, kecil maupun mikro.

Gambar 6.1. Sebaran Perusahaan/Usaha Menurut Wilayah, Tahun 2006 (%)

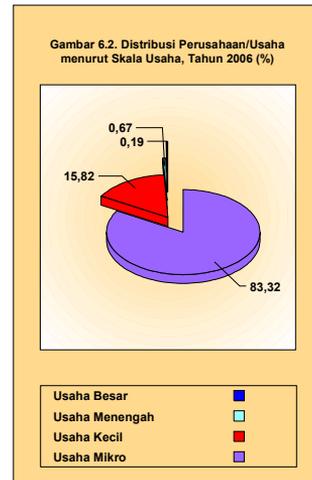


Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menunjang seluruh aspek dan kegiatan dari pembangunan secara umum maupun pembangunan ekonomi. Pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan infrastruktur merupakan sektor pembangunan yang dibiayai cukup besar dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang paling menonjol di masa orde baru di dalam pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan dan ketenagalistrikan atau yang lebih dikenal dengan visinya, yaitu "listrik masuk desa". Namun pembangunan infrastruktur mulai mengalami hambatan saat krisis ekonomi. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, pembangunan infrastruktur mulai mengalami hambatan pembiayaan karena beberapa komponen input produksi untuk pembangunan infrastruktur kebanyakan berasal dari komponen impor (*import content*).

Dilihat menurut lingkup kawasan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) mempunyai persentase perusahaan/usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Provinsi Sulawesi Selatan dan provinsi Sulawesi Utara merupakan dua provinsi yang persentase banyaknya perusahaan/usaha tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di KTI. Tingginya persentase perusahaan/usaha di provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh faktor infrastruktur yang dimiliki sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di KTI.

Komposisi perusahaan/usaha berdasarkan skala usaha di masing-masing provinsi mengikuti pola nasional,

dimana persentase perusahaan/usaha mikro dan kecil mendominasi jumlah perusahaan/usaha. Sementara, kontribusi perusahaan/usaha berskala besar dan menengah tidak mencapai satu persen. Berdasarkan penelitian Rabeloti (1994), pada saat Industri Skala Besar di Inggris, Jerman dan Italia mengalami kelesuan pada periode 1970-80an, ternyata ISK (terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra-sentra) yang membuat produk-produk tradisional mengalami pertumbuhan yang pesat, bahkan mampu mengembangkan pasar ekspor untuk barang-barang tersebut dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Tambunan, pengalaman ini menunjukkan bahwa industri kecil di sentra-sentra dapat berkembang lebih pesat, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar, dan dapat meningkatkan produksinya daripada industri kecil secara individu di luar sentra.



Tabel 6.1. Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Usaha Besar	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Tidak dapat diklasifikasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. Aceh Darussalam	0,10	0,50	16,29	83,06	0,05	0,16
Sumatera Utara	0,21	0,74	19,62	79,30	0,12	0,34
Sumatera Barat	0,17	0,70	14,76	84,31	0,07	0,24
Riau	0,22	0,81	17,87	80,96	0,13	0,36
Jambi	0,18	0,57	14,47	84,70	0,09	0,27
Sumatera Selatan	0,12	0,47	12,55	86,85	0,00	0,12
Bengkulu	0,11	0,48	11,77	87,60	0,04	0,15
Lampung	0,11	0,43	11,92	87,54	0,01	0,12
Bangka Belitung	0,31	0,93	34,69	63,95	0,12	0,43
Kepulauan Riau	0,62	2,04	21,44	75,87	0,02	0,64
DKI Jakarta	0,79	1,82	32,13	65,11	0,16	0,95
Jawa Barat	0,19	0,67	16,82	82,31	0,02	0,20
Jawa Tengah	0,13	0,59	13,74	85,51	0,03	0,16
Di Yogyakarta	0,19	1,16	16,54	82,08	0,02	0,21
Jawa Timur	0,14	0,60	14,13	85,07	0,05	0,19
Banten	0,17	0,53	15,47	83,82	0,01	0,19
Bali	0,35	2,04	19,23	78,32	0,05	0,41
Nusa Tenggara Barat	0,08	0,54	11,45	87,90	0,04	0,12
Nusa Tenggara Timur	0,08	0,50	5,32	94,02	0,09	0,16
Kalimantan Barat	0,22	0,99	18,80	79,90	0,08	0,30
Kalimantan Tengah	0,14	0,74	19,01	79,98	0,13	0,27
Kalimantan Selatan	0,16	0,59	15,91	83,29	0,05	0,21
Kalimantan Timur	0,38	1,20	20,61	77,52	0,29	0,67
Sulawesi Utara	0,11	0,60	11,11	88,11	0,07	0,18
Sulawesi Tengah	0,12	0,69	11,57	87,56	0,07	0,18
Sulawesi Selatan	0,17	0,60	11,61	87,59	0,02	0,19
Sulawesi Tenggara	0,11	0,53	9,49	89,84	0,02	0,14
Gorontalo	0,06	0,34	5,99	93,58	0,02	0,09
Sulawesi Barat	0,07	0,39	9,47	90,01	0,07	0,14
Maluku	0,10	0,64	8,56	90,67	0,03	0,13
Maluku Utara	0,14	0,90	15,33	83,49	0,14	0,28
Irian Jaya Barat	0,16	0,78	14,89	83,86	0,30	0,46
Papua	0,30	1,03	16,73	81,80	0,14	0,43
Indonesia	0,19	0,72	15,78	83,25	0,05	0,25

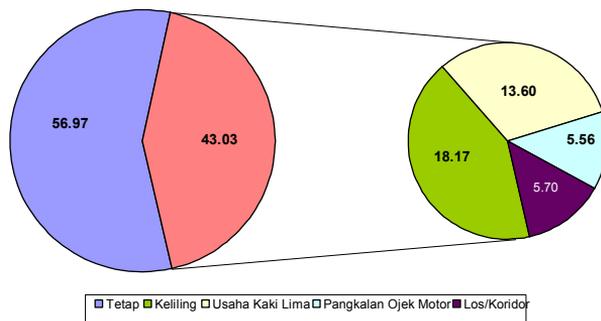
Sumber : diolah dari SE06-Listing

Dari seluruh perusahaan/usaha mikro dan kecil di lokasi tidak permanen, persentase usaha keliling dan kaki lima di Provinsi Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam di atas persentase nasional.

Sementara itu kontribusi perusahaan/usaha berskala besar di enam provinsi jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. DKI Jakarta dan Kepulauan Riau menunjukkan kontribusi perusahaan/usaha berskala besar masing-masing 0,79 persen dan 0,62 persen. Demikian pula dengan Kalimantan Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Papua berturut-turut kontribusinya adalah 0,38 persen, 0,35 persen, 0,31 persen dan 0,30 persen. Sedangkan kontribusi perusahaan/usaha besar di provinsi lainnya hanya berkisar antara 0,06 persen hingga 0,22 persen. Sementara itu, kontribusi perusahaan/usaha berskala menengah di Kepulauan Riau, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Papua berkisar mulai dari 1,03 persen hingga 2,04 persen, provinsi lainnya hanya mencatat kontribusi di bawah 1 persen. Angka selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.

Secara nasional, persentase perusahaan/usaha keliling dan usaha kaki lima terhadap total perusahaan/usaha di lokasi tidak permanen masing-masing sebesar 42,23 persen dan 31,61 persen. Dominasi usaha keliling dan usaha kaki lima terhadap seluruh perusahaan/usaha di lokasi tidak permanen nampaknya juga terjadi di sebagian provinsi, bahkan persentase gabungan antara usaha keliling dan usaha kaki lima di beberapa provinsi berada di atas rata-rata nasional, seperti provinsi Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (lihat Tabel 6.2). Dengan demikian, secara relatif ke empat provinsi tersebut

Gambar 6.3. Distribusi Perusahaan/Usaha yang Berusaha di Lokasi Tidak Permanen menurut Lokasi Usaha, Tahun 2006 (%)



Tabel 6.2. Distribusi Perusahaan/Usaha di Lokasi Tidak Permanen menurut Provinsi dan Lokasi Usaha, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Kelliling	Usaha Kaki		Pangkalan Ojek	Los/Koridor
		Lima	Motor	Motor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	42,37	41,36	8,90	7,37	7,37
Sumatera Utara	42,33	42,58	3,62	11,47	11,47
Sumatera Barat	19,24	47,00	17,57	16,20	16,20
Riau	22,87	49,07	7,05	21,00	21,00
Jambi	27,42	39,92	18,73	13,93	13,93
Sumatera Selatan	18,70	42,69	14,69	10,39	10,39
Bengkulu	25,59	47,55	16,47	10,39	10,39
Lampung	41,26	27,09	14,55	17,57	17,57
Bangka Belitung	13,81	39,77	4,94	13,99	13,99
Kepulauan Riau	22,22	26,21	41,39	10,19	10,19
DKI Jakarta	33,32	45,52	14,17	6,99	6,99
Jawa Barat	49,50	23,82	20,59	6,09	6,09
Jawa Tengah	47,26	26,58	5,84	20,31	20,31
Di Yogyakarta	11,11	36,22	2,22	3,11	3,11
Jawa Timur	51,70	27,33	5,14	15,83	15,83
Banten	43,61	27,27	23,39	5,74	5,74
Bali	32,95	36,01	11,31	18,73	18,73
Nusa Tenggara Barat	37,68	32,07	20,32	9,93	9,93
Nusa Tenggara Timur	19,93	40,58	20,22	17,25	17,25
Kalimantan Barat	43,93	28,13	10,55	7,29	7,29
Kalimantan Tengah	37,70	34,05	11,48	16,76	16,76
Kalimantan Selatan	30,19	40,58	5,00	10,39	10,39
Kalimantan Timur	24,31	47,58	14,45	13,67	13,67
Sulawesi Utara	30,56	18,78	28,56	22,10	22,10
Sulawesi Tengah	43,81	38,00	11,90	7,37	7,37
Sulawesi Selatan	32,56	34,52	11,90	21,02	21,02
Sulawesi Tenggara	25,24	63,98	23,93	17,34	17,34
Gorontalo	32,28	43,02	10,13	14,56	14,56
Sulawesi Barat	25,75	44,94	12,17	17,15	17,15
Maluku	23,75	36,60	25,63	14,02	14,02
Maluku Utara	18,82	29,73	35,19	16,26	16,26
Irian Jaya Barat	12,15	40,02	29,74	18,09	18,09
Papua	14,42	50,05	23,71	11,83	11,83
Indonesia	42,23	31,61	12,91	13,25	13,25

mempunyai potensi pengembangan ke kedua jenis usaha tersebut menjadi usaha yang mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini.

Secara nasional, dari 12,9 juta perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen, sebagian besar tidak berbadan hukum (89,75 persen). Pola ini juga terlihat di masing-masing provinsi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.3, dengan persentase perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum berkisar dari 61,61 persen (Irian Jaya Barat) hingga 94,56 persen (Sulawesi Barat). Sementara, jumlah perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum di tiga provinsi besar di Pulau Jawa masing-masing tercatat 2-3 juta perusahaan/usaha (92,04

Tabel 6.3. Distribusi Perusahaan / Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum yang Berusaha di Lokasi Permanen menurut Provinsi, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Persentase Perusahaan / Usaha		
	Berbadan Hukum	Tidak Berbadan Hukum	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	10,84	89,16	100,00
Sumatera Utara	13,45	86,55	100,00
Sumatera Barat	10,44	89,56	100,00
Riau	11,71	88,29	100,00
Jambi	15,17	84,83	100,00
Sumatera Selatan	10,19	89,81	100,00
Bengkulu	16,85	83,15	100,00
Lampung	10,64	89,36	100,00
Bangka Belitung	20,70	79,30	100,00
Kepulauan Riau	27,82	72,18	100,00
DKI Jakarta	12,30	87,70	100,00
Jawa Barat	9,34	90,66	100,00
Jawa Tengah	7,30	92,70	100,00
DI Yogyakarta	9,98	90,02	100,00
Jawa Timur	7,96	92,04	100,00
Banten	7,40	92,60	100,00
Bali	12,23	87,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,94	91,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,47	83,53	100,00
Kalimatan Barat	22,48	77,52	100,00
Kalimatan Tengah	18,09	81,91	100,00
Kalimatan Selatan	10,13	89,87	100,00
Kalimatan Timur	16,28	83,72	100,00
Sulawesi Utara	14,52	85,48	100,00
Sulawesi Tengah	18,60	81,40	100,00
Sulawesi Selatan	7,09	92,91	100,00
Sulawesi Tenggara	13,68	86,32	100,00
Gorontalo	11,34	88,66	100,00
Sulawesi Barat	5,44	94,56	100,00
Maluku	18,06	81,94	100,00
Maluku Utara	19,72	80,28	100,00
Irian Jaya Barat	38,39	61,61	100,00
Papua	37,59	62,41	100,00
Indonesia	10,25	89,75	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

persen) di Jawa Timur, 2,1 juta perusahaan (92,70 persen) di Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan 1,9 juta perusahaan/usaha (90,66 persen).

Komposisi perusahaan/usaha ditinjau dari lapangan usaha dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok sektor Pertanian (terdiri dari perusahaan/usaha tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan),

kelompok sektor Industri (terdiri dari perusahaan/usaha industri pengolahan), dan kelompok sektor Jasa (terdiri dari perusahaan/usaha diluar sektor pertanian dan industri). Komposisi dari ketiga kelompok sektor tersebut dapat dijadikan indikator proses dari pengembangan suatu wilayah/daerah. Oleh karena SE06 tidak mencakup lapangan usaha pertanian, maka pembahasan dalam analisis ini hanya mencakup kelompok sektor Industri dan kelompok sektor Jasa. Tabel 6.4 menyajikan distribusi perusahaan/usaha menurut Provinsi dan Kelompok Sektor.

Pada tahun 2006, perusahaan/usaha yang bergerak dalam kelompok sektor Industri mencapai 3,2 juta perusahaan/usaha atau 14,20 persen dari seluruh usaha (tidak termasuk lapangan usaha Pertanian), dan usaha dalam kelompok sektor Jasa sebanyak 19,5 juta usaha atau 85,80 persen. Suatu wilayah yang mempunyai usaha pada kelompok sektor Industri yang kuat terutama lapangan usaha Industri Dasar seperti Industri Barang Modal, akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Sesuai dengan prosesnya, lapangan usaha industri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, industri hulu yang mengolah keluaran dari lapangan usaha pertambangan/sektor primer (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap berikutnya. Kedua, jenis industri hilir yang mengolah bahan baku menjadi keluaran (barang) yang siap dikonsumsi/dipakai.

Distribusi persentase perusahaan/usaha dari kelompok sektor Industri dan Jasa menurut provinsi menunjukkan bahwa beberapa provinsi mempunyai komposisi perusahaan/usaha Industri Pengolahan lebih tinggi dibanding nasional (seperti Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali (lihat Tabel 6.4). Indikasi ini menunjukkan proses industrialisasi belum merata lintas wilayah dimana range (jarak persentase tertinggi dengan persentase terendah sektor industri) lebih dari 15 persen. Walaupun demikian, industrialisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan ekonomi wilayah tetapi salah satu strategi untuk mencapai pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan (Riedel, 1992).

Beberapa studi mengenai struktur dari kelompok sektor Industri mengemukakan indikasi bahwa sebagian besar dari usaha industri menengah dan besar terkonsentrasi di jenis-jenis industri makanan/minuman, tembakau, tekstil dan pakaian jadi (industri dengan teknologi sederhana). Tambunan (2001) lebih jauh menyatakan bahwa dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia,

Tabel 6.4. Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Kelompok Sektor, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Industri	Jasa-Jasa
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	16,83	83,17
Sumatera Utara	7,42	92,58
Sumatera Barat	11,50	88,50
Riau	6,03	93,97
Jambi	7,41	92,59
Sumatera Selatan	9,63	90,37
Bengkulu	8,55	91,45
Lampung	13,78	86,22
Bangka Belitung	8,18	91,82
Kepulauan Riau	7,94	92,06
DKI Jakarta	3,32	96,68
Jawa Barat	10,92	89,08
Jawa Tengah	22,67	77,33
DI Yogyakarta	19,00	81,00
Jawa Timur	15,94	84,06
Banten	9,30	90,70
Bali	22,13	77,87
Nusa Tenggara Barat	22,94	77,06
Nusa Tenggara Timur	24,41	75,59
Kalimantan Barat	16,33	83,67
Kalimantan Tengah	9,88	90,12
Kalimantan Selatan	12,25	87,75
Kalimantan Timur	5,21	94,79
Sulawesi Utara	12,34	87,66
Sulawesi Tengah	12,37	87,63
Sulawesi Selatan	14,44	85,56
Sulawesi Tenggara	19,93	80,07
Gorontalo	14,35	85,65
Sulawesi Barat	15,61	84,39
Maluku	16,56	83,44
Maluku Utara	14,62	85,38
Irian Jaya Barat	5,50	94,50
Papua	5,24	94,76
Jumlah	14,20	85,80

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Indonesia masih berada dibawah negara-negara tersebut dalam pembangunan industri teknologi tinggi. China merupakan salah satu negara di Asia dengan tingkat industrialisasi yang relatif tinggi dan menjadi pesaing Indonesia dalam industri mesin dan alat-alat transportasi.

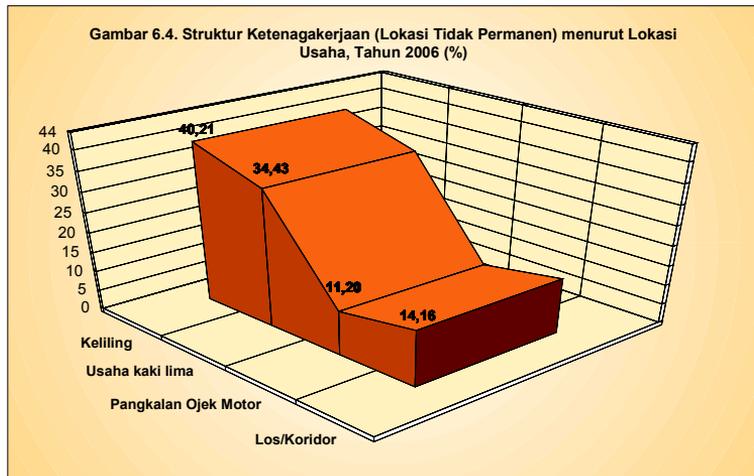
6.3. Struktur Ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil sejalan dengan keberadaan perusahaan/usaha mikro dan kecil, yang juga mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Dari 49,7 juta orang, 83,87 persen bekerja pada perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil, sisanya bekerja pada perusahaan/usaha berskala menengah dan besar. Bila dilihat komposisinya menurut provinsi, polanya tidak jauh berbeda, kecuali di enam provinsi, yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur.

Persentase tenaga kerja yang terserap pada perusahaan/usaha berskala besar di Kepulauan Riau tercatat 34,64 persen dan di DKI Jakarta tercatat 24,08 persen. Sementara di empat provinsi lainnya, persentasenya berkisar dari 10,17 persen hingga 15,05 persen. Pada perusahaan/usaha menengah di provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Bali, persentase tenaga kerja yang terserap relatif lebih tinggi yaitu di atas 10 persen dibanding provinsi lainnya yang berkisar antara 2,36 persen hingga 8,01 persen. Angka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Gambar 6.4 menunjukkan bahwa secara nasional, persentase tenaga kerja pada usaha keliling dan usaha kaki lima masing-masing tercatat 40,21 persen dan 34,43 persen. Modal yang relatif rendah menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk yang berpendidikan rendah untuk bekerja pada usaha keliling dan usaha kaki lima.

Di beberapa provinsi, perusahaan/usaha kaki lima menyerap lebih dari separuh kesempatan kerja pada perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi tidak permanen, masing-masing provinsi Riau (51,26 persen),



Tabel 6.5. Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Provinsi, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Usaha Besar	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Tidak dapat diklasifikasikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,03	2,43	21,55	73,68	0,32	100,00
Sumatera Utara	9,29	5,50	26,10	58,31	0,80	100,00
Sumatera Barat	4,37	3,73	21,29	70,31	0,30	100,00
Riau	7,97	3,98	23,46	63,83	0,76	100,00
Jambi	6,93	8,01	18,29	66,29	0,49	100,00
Sumatera Selatan	5,30	4,93	18,71	71,03	0,04	100,00
Bengkulu	2,11	3,18	18,78	75,70	0,22	100,00
Lampung	6,49	3,11	16,46	73,85	0,09	100,00
Bangka Belitung	7,14	6,24	39,65	45,44	1,53	100,00
Kepulauan Riau	34,64	13,44	18,46	33,40	0,07	100,00
DKI Jakarta	24,08	11,25	30,91	32,75	1,00	100,00
Jawa Barat	11,59	7,20	22,57	58,39	0,25	100,00
Jawa Tengah	7,87	5,43	19,48	66,97	0,25	100,00
Di Yogyakarta	8,17	7,48	23,77	60,42	0,15	100,00
Jawa Timur	8,11	5,73	19,50	66,26	0,39	100,00
Banten	15,05	5,94	19,66	59,21	0,14	100,00
Bali	10,17	11,11	25,96	52,32	0,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,76	4,50	16,15	77,27	0,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,70	3,14	10,82	84,16	0,18	100,00
Kalimantan Barat	8,47	4,47	24,32	62,43	0,31	100,00
Kalimantan Tengah	5,00	3,93	23,99	66,71	0,37	100,00
Kalimantan Selatan	6,58	3,98	19,60	69,02	0,82	100,00
Kalimantan Timur	12,17	7,75	25,18	52,34	2,56	100,00
Sulawesi Utara	3,66	3,39	17,39	75,14	0,42	100,00
Sulawesi Tengah	1,96	4,02	17,64	76,07	0,32	100,00
Sulawesi Selatan	4,52	4,40	19,21	71,59	0,27	100,00
Sulawesi Tenggara	3,19	3,35	14,08	79,32	0,07	100,00
Gorontalo	2,52	2,78	10,93	83,61	0,15	100,00
Sulawesi Barat	0,95	2,36	14,55	81,80	0,34	100,00
Maluku	4,73	4,73	13,35	76,93	0,26	100,00
Maluku Utara	5,94	5,14	18,65	68,81	1,46	100,00
Irian Jaya Barat	7,22	4,47	21,51	66,36	0,44	100,00
Papua	8,91	5,61	23,01	61,86	0,61	100,00
Indonesia	9,59	6,14	21,36	62,51	0,41	100,00

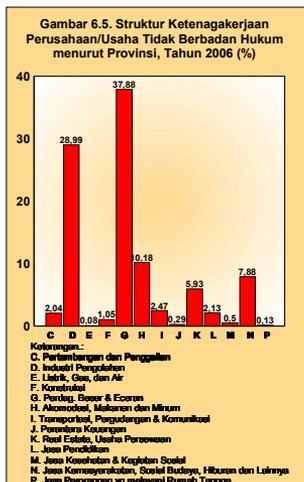
Sumber : diolah dari SE06-Listing

provinsi Kalimantan Selatan (52,82 persen), provinsi Kalimantan Timur (50,77 persen) dan provinsi Papua (53,96 persen). Selanjutnya di setiap provinsi terlihat bahwa perusahaan/usaha keliling dan usaha ojek sepeda motor di pangkalan hanya menyerap kurang dari separuh pekerja dari perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi tidak permanen. Sedangkan persentase tenaga kerja yang berusaha di los atau koridor pasar maupun pusat perbelanjaan di setiap provinsi berkisar antara 7 persen sampai dengan 29 persen (Tabel 6.6).

Tabel 6.6. Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha di Lokasi Tidak Permanen menurut Lokasi Usaha per Provinsi, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Keliling	Usaha Kaki Lima	Pangkalan Ojek Motor	Los/Koridor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	40,91	43,66	7,55	7,87	100,00
Sumatera Utara	38,76	45,67	3,04	12,53	100,00
Sumatera Barat	19,38	48,38	15,25	16,98	100,00
Riau	21,17	51,26	5,79	21,78	100,00
Jambi	26,58	42,17	16,31	14,94	100,00
Sumatera Selatan	33,09	44,05	10,82	12,04	100,00
Bengkulu	25,03	49,17	14,52	11,28	100,00
Lampung	40,32	28,62	12,51	18,56	100,00
Bangka Belitung	39,72	43,06	2,02	15,19	100,00
Kepulauan Riau	20,78	31,21	35,04	12,97	100,00
DKI Jakarta	28,56	49,70	11,68	10,06	100,00
Jawa Barat	47,56	26,78	18,41	7,25	100,00
Jawa Tengah	45,48	29,28	5,06	20,18	100,00
Di Yogyakarta	29,64	37,05	2,30	31,02	100,00
Jawa Timur	49,69	29,46	4,46	16,39	100,00
Banten	41,52	30,94	20,75	6,79	100,00
Bali	31,73	32,16	6,89	29,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,68	33,69	18,41	10,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	19,58	42,98	24,43	13,00	100,00
Kalimantan Barat	39,70	43,61	8,53	8,17	100,00
Kalimantan Tengah	36,49	35,94	9,56	18,00	100,00
Kalimantan Selatan	28,87	52,82	7,34	10,97	100,00
Kalimantan Timur	22,53	50,77	12,11	14,59	100,00
Sulawesi Utara	29,86	20,21	25,66	24,28	100,00
Sulawesi Tengah	25,27	40,67	18,01	16,05	100,00
Sulawesi Selatan	31,20	36,47	10,51	21,82	100,00
Sulawesi Tenggara	24,76	37,20	20,19	17,84	100,00
Gorontalo	30,32	45,21	9,01	15,46	100,00
Sulawesi Barat	24,65	46,02	10,77	18,56	100,00
Maluku	23,44	38,42	22,07	16,07	100,00
Maluku Utara	18,82	36,08	27,70	17,39	100,00
Irian Jaya Barat	13,11	41,49	25,90	19,50	100,00
Papua	14,33	53,96	19,18	12,54	100,00
Indonesia	40,21	34,43	11,20	14,16	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing



Tenaga kerja yang diserap pada perusahaan/usaha tidak berbadan hukum mencapai 63,35 persen. Lapangan usaha pada perusahaan/usaha tidak berbadan hukum yang menyediakan kesempatan kerja cukup besar adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran (37,88 persen). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan dan Akomodasi Makanan/Minuman mempunyai persentase penyedia kesempatan kerja terbesar kedua dan ketiga. Status tidak berbadan hukum yang merupakan ciri dari lapangan Jasa Kemasyarakatan, masing-masing 28,99 persen dan 10,18 persen. (Gambar 6.5).

Dari perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen, perusahaan/usaha yang berbadan hukum di Kepulauan Riau menyerap lebih dari dua pertiga kesempatan kerja. Sementara penyerapan tenaga kerja di perusahaan/usaha berbadan hukum di Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat dan DKI Jakarta menyerap lebih dari separuh tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 60,26 persen, 59,19 persen, dan 55,35 persen. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja pada perusahaan/usaha tidak berbadan hukum yang paling besar terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (79,60 persen). Tiga provinsi yang mempunyai struktur ketenagakerjaan di atas 70 persen adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (Tabel 6.7).

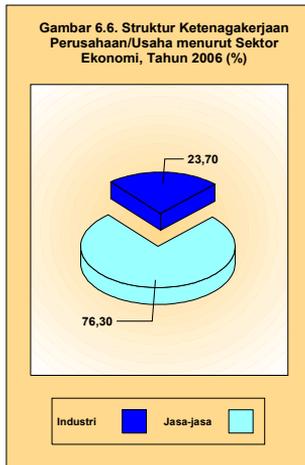
Hasil SE06 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja kelompok sektor Jasa lebih tinggi dibandingkan kelompok sektor Industri. Sektor Jasa menyerap 37,9 juta pekerja (76,30 persen), sedangkan kelompok sektor Industri menyerap 11,8 juta pekerja (23,70 persen). Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar dalam penyediaan kesempatan kerja pada sektor Jasa adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran (17,2 juta orang). Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran mempunyai karakteristik modal kerja dan modal investasi yang relatif kecil serta tanpa organisasi/manajemen yang kompleks/mahal maupun keahlian (pendidikan) yang tinggi. Oleh karena itu, mudah bagi penduduk usia kerja memasuki lapangan usaha perdagangan khususnya eceran. Seluruh provinsi mempunyai potensi kesempatan kerja yang besar pada

Potensi kesempatan kerja pada kelompok sektor Jasa terlihat mendominasi hampir di seluruh provinsi kecuali di Provinsi Kepulauan Riau yang hanya mencapai 58,72 persen.

Tabel 6.7. Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha menurut Status Badan Hukum per Provinsi, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Berbadan Hukum	Tidak Berbadan Hukum
(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	26,76	73,24
Sumatera Utara	40,84	59,16
Sumatera Barat	30,90	69,10
Riau	35,43	64,57
Jambi	42,14	57,86
Sumatera Selatan	32,28	67,72
Bengkulu	35,43	64,57
Lampung	32,36	67,64
Bangka Belitung	42,98	57,02
Kepulauan Riau	73,23	26,77
DKI Jakarta	55,53	44,47
Jawa Barat	37,34	62,66
Jawa Tengah	29,74	70,26
Di Yogyakarta	37,06	62,94
Jawa Timur	32,89	67,11
Banten	40,50	59,50
Bali	41,72	58,28
Nusa Tenggara Barat	25,17	74,83
Nusa Tenggara Timur	36,91	63,09
Kalimantan Barat	43,74	56,26
Kalimantan Tengah	34,88	65,12
Kalimantan Selatan	35,08	64,92
Kalimantan Timur	49,28	50,72
Sulawesi Utara	30,52	69,48
Sulawesi Tengah	38,40	61,60
Sulawesi Selatan	30,92	69,08
Sulawesi Tenggara	31,86	68,14
Gorontalo	31,32	68,68
Sulawesi Barat	20,40	79,60
Maluku	42,27	57,73
Maluku Utara	44,58	55,42
Irian Jaya Barat	59,19	40,81
Papua	60,26	39,74
Indonesia	36,65	63,35

Sumber : diolah dari SE06-Listing



lapangan usaha di kelompok sektor Jasa yang berkisar mulai dari 58,72 persen hingga 91,38 persen (Tabel 6.8).

Tabel 6.8. Struktur Ketenagakerjaan Perusahaan/Usaha menurut Sektor Ekonomi dan Provinsi, Tahun 2006 (%)

Provinsi	Industri	Jasa-Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	20.44	79.56	100.00
Sumatera Utara	16.50	83.50	100.00
Sumatera Barat	14.21	85.79	100.00
Riau	13.34	86.66	100.00
Jambi	18.95	81.05	100.00
Sumatera Selatan	15.75	84.25	100.00
Bengkulu	10.92	89.08	100.00
Lampung	21.69	78.31	100.00
Bangka Belitung	11.02	88.98	100.00
Kepulauan Riau	41.28	58.72	100.00
DKI Jakarta	16.74	83.26	100.00
Jawa Barat	25.84	74.16	100.00
Jawa Tengah	33.72	66.28	100.00
DI Yogyakarta	23.72	76.28	100.00
Jawa Timur	25.38	74.62	100.00
Banten	25.83	74.17	100.00
Bali	22.35	77.65	100.00
Nusa Tenggara Barat	28.49	71.51	100.00
Nusa Tenggara Timur	21.74	78.26	100.00
Kalimatan Barat	21.04	78.96	100.00
Kalimatan Tengah	15.31	84.69	100.00
Kalimatan Selatan	17.77	82.23	100.00
Kalimatan Timur	12.93	87.07	100.00
Sulawesi Utara	15.37	84.63	100.00
Sulawesi Tengah	14.01	85.99	100.00
Sulawesi Selatan	17.31	82.69	100.00
Sulawesi Tenggara	21.57	78.43	100.00
Gorontalo	17.81	82.19	100.00
Sulawesi Barat	16.31	83.69	100.00
Maluku	18.79	81.21	100.00
Maluku Utara	17.67	82.33	100.00
Irian Jaya Barat	12.31	87.69	100.00
Papua	8.62	91.38	100.00
Indonesia	23.70	76.30	100.00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

6.4. Sebaran Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja per unit perusahaan/usaha dinyatakan sebagai rasio antara jumlah tenaga kerja terhadap jumlah perusahaan/usaha pada masing-masing lapangan usaha. Tinjauan sebaran penyerapan tenaga kerja akan memberikan informasi potensi ekonomi wilayah dalam rangka pengembangan maupun mendorong potensi ekonomi tersebut menjadi pemicu pembangunan wilayah. Analisis pada sub bab ini menggunakan kerangka analisis potensi relatif perekonomian wilayah dengan teknik analisis keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

David Ricardo (1917) mengemukakan analisis keunggulan komparatif pada pembahasan perdagangan komoditas antara dua wilayah. Kesimpulannya membuktikan bahwa wilayah yang mengkonsentrasikan pada komoditi unggulan komparatif dalam ekonominya, maka wilayah tersebut lebih cepat berkembang/maju. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai. Analisis hasil SE06 menggunakan indikator penyerapan tenaga kerja sebagai indikator analisis keunggulan komparatifnya.

Sebaran penyerapan tenaga kerja per unit perusahaan/usaha menurut skala usaha menunjukkan bahwa perusahaan/usaha berskala menengah mampu menyerap rata-rata tenaga kerja sekitar 4 kali lebih besar dibandingkan perusahaan/usaha kategori mikro dan kecil. Bahkan perusahaan/usaha berskala menengah di beberapa provinsi mempunyai daya serap lebih dari empat kali, seperti Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Banten. Sementara pada perusahaan/usaha berskala mikro kecil di sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia memiliki rasio kompetitif terhadap nasional lebih dari satu, tetapi pada perusahaan/usaha menengah dan besar yang memiliki rasio kompetitif terhadap nasional kurang dari satu hanya terdapat di provinsi kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia akan lebih menguntungkan jika mengembangkan usaha mikro kecil, karena memiliki daya serap tenaga kerja melebihi penyerapan tenaga kerja nasional (Tabel 6.9).

Tabel 6.9. Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Per Perusahaan/ Usaha menurut Provinsi dan Skala Usaha, Tahun 2006 (orang)

Provinsi	Usaha Besar	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	41,0	10,5	2,7	1,8
Sumatera Utara	95,6	16,5	2,9	1,6
Sumatera Barat	49,7	11,1	2,8	1,6
Riau	81,6	11,9	3,0	1,8
Jambi	86,7	31,4	2,8	1,7
Sumatera Selatan	91,6	23,1	3,1	1,7
Bengkulu	32,3	13,2	3,1	1,7
Lampung	120,9	15,4	2,8	1,7
Bangka Belitung	63,5	18,1	3,2	2,0
Kepulauan Riau	212,8	28,3	3,3	1,7
DKI Jakarta	92,3	18,8	2,9	1,5
Jawa Barat	141,7	26,4	3,1	1,6
Jawa Tengah	125,3	19,0	3,0	1,6
DI Yogyakarta	97,0	15,3	3,3	1,7
Jawa Timur	117,6	19,8	2,9	1,6
Banten	190,2	26,1	2,8	1,5
Bali	74,1	15,1	3,5	1,7
Nusa Tenggara Barat	43,4	15,9	2,6	1,6
Nusa Tenggara Timur	44,8	12,7	4,0	1,8
Kalimantan Barat	99,9	12,3	3,3	2,0
Kalimantan Tengah	79,7	11,2	2,8	1,9
Kalimantan Selatan	79,7	13,7	2,4	1,6
Kalimantan Timur	79,4	15,3	3,0	1,7
Sulawesi Utara	61,1	11,5	3,0	1,6
Sulawesi Tengah	33,1	11,6	3,0	1,7
Sulawesi Selatan	54,5	15,0	3,4	1,7
Sulawesi Tenggara	55,5	12,5	2,9	1,7
Gorontalo	66,0	13,9	3,1	1,5
Sulawesi Barat	25,3	10,2	2,7	1,6
Maluku	103,6	16,7	3,4	1,9
Maluku Utara	99,5	12,2	3,0	2,0
Irian Jaya Barat	100,2	13,0	3,2	1,7
Papua	67,6	13,2	3,1	1,7
Jumlah	108,1	19,1	3,0	1,6

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Secara umum, sebaran penyerapan tenaga kerja per unit perusahaan/usaha menurut lokasi (khususnya mikro dan kecil) relatif sama. Penyerapan tenaga kerja di setiap provinsi berada pada kisaran satu-dua orang. Walaupun relatif kecil perbedaannya, urutan penyerapan tenaga kerja mikro dan kecil pada lokasi tidak permanen adalah perusahaan/usaha kaki lima, perusahaan/usaha di los/koridor pasar/pusat perbelanjaan, perusahaan/usaha keliling dan perusahaan/usaha ojek motor. Keunggulan

kompetitif dari perusahaan/usaha menurut lokasi menunjukkan bahwa lebih dari sepuluh provinsi unggul pada perusahaan/usaha kaki lima dan perusahaan/usaha keliling. Sementara hanya ada delapan provinsi yang dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil baik perusahaan/usaha kaki lima, perusahaan/usaha keliling maupun perusahaan/usaha los/koridor di pasar/pusat perbelanjaan karena perusahaan/usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja nasional (Tabel 6.10).

Tabel 6.10. Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja per Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Lokasi Usaha, Tahun 2006 (orang)

Provinsi	Keliling	Usaha Kaki Lima	Los/Koridor
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	1,14	1,24	1,26
Sumatera Utara	1,09	1,28	1,30
Sumatera Barat	1,16	1,19	1,21
Riau	1,13	1,27	1,26
Jambi	1,11	1,21	1,23
Sumatera Selatan	1,11	1,23	1,29
Bengkulu	1,11	1,17	1,23
Lampung	1,12	1,21	1,23
Bangka Belitung	1,18	1,42	1,42
Kepulauan Riau	1,10	1,41	1,50
DKI Jakarta	1,04	1,32	1,74
Jawa Barat	1,07	1,26	1,33
Jawa Tengah	1,11	1,27	1,15
DI Yogyakarta	1,16	1,33	1,21
Jawa Timur	1,11	1,24	1,19
Banten	1,07	1,28	1,33
Bali	1,16	1,26	1,21
Nusa Tenggara Barat	1,10	1,16	1,13
Nusa Tenggara Timur	1,19	1,22	1,22
Kalimantan Barat	1,12	1,42	1,37
Kalimantan Tengah	1,16	1,27	1,29
Kalimantan Selatan	1,11	1,22	1,24
Kalimantan Timur	1,11	1,27	1,27
Sulawesi Utara	1,09	1,20	1,22
Sulawesi Tengah	1,14	1,21	1,18
Sulawesi Selatan	1,09	1,20	1,18
Sulawesi Tenggara	1,14	1,27	1,19
Gorontalo	1,06	1,18	1,21
Sulawesi Barat	1,08	1,16	1,22
Maluku	1,15	1,22	1,33
Maluku Utara	1,27	1,54	1,36
Irian Jaya Barat	1,24	1,19	1,24
Papua	1,23	1,33	1,31
Jumlah	1,10	1,26	1,23

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Tinjauan penyerapan tenaga kerja per unit perusahaan/usaha menurut status badan hukum menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada perusahaan/usaha berbadan hukum lebih tinggi dibandingkan penyerapan pada perusahaan/usaha tidak berbadan hukum (Tabel 6.11). Perusahaan/ usaha berbadan hukum di Kawasan Indonesia Bagian Timur mempunyai penyerapan tenaga kerja lebih rendah

Tabel 6.11. Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja per Unit Perusahaan/Usaha menurut Provinsi dan Status Badan Hukum, Tahun 2006 (orang)

Provinsi	Berbadan Hukum	Tidak Berbadan Hukum
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	6,3	2,1
Sumatera Utara	9,0	2,0
Sumatera Barat	7,3	1,9
Riau	8,9	2,2
Jambi	8,5	2,1
Sumatera Selatan	9,3	2,2
Bengkulu	5,4	2,0
Lampung	8,0	2,0
Bangka Belitung	6,7	2,3
Kepulauan Riau	14,1	2,0
Dki Jakarta	21,1	2,4
Jawa Barat	13,7	2,4
Jawa Tengah	11,1	2,1
Di Yogyakarta	10,5	2,0
Jawa Timur	11,0	1,9
Banten	17,7	2,1
Bali	10,5	2,0
Nusa Tenggara Barat	7,1	2,1
Nusa Tenggara Timur	5,4	1,8
Kalimantan Barat	6,0	2,2
Kalimantan Tengah	5,4	2,2
Kalimantan Selatan	9,1	1,9
Kalimantan Timur	9,9	2,0
Sulawesi Utara	5,1	2,0
Sulawesi Tengah	5,3	1,9
Sulawesi Selatan	11,8	2,0
Sulawesi Tenggara	5,7	1,9
Gorontalo	6,0	1,7
Sulawesi Barat	8,3	1,9
Maluku	6,7	2,0
Maluku Utara	7,1	2,2
Irian Jaya Barat	5,0	2,2
Papua	5,1	2,0
Jumlah	10,6	2,1

Sumber : diolah dari SE06-Listing

dibandingkan penyerapan tenaga kerja nasional, kecuali Provinsi Sulawesi Selatan (11,8). Demikian pula dengan provinsi-provinsi yang berada pada pulau Sumatera kecuali Provinsi Kepulauan Riau (14,1). Provinsi yang penyerapan tenaga kerja pada perusahaan/usaha berbadan hukum tercatat rendah tetapi mempunyai keunggulan kompetitif pada penyerapan tenaga kerja pada perusahaan/usaha tidak berbadan hukum adalah Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat.

Penyerapan tenaga kerja per unit perusahaan/usaha dari kelompok sektor Industri masih lebih tinggi dibandingkan kelompok sektor Jasa. Rata-rata penyerapan tenaga kerja di dua kelompok sektor tersebut berturut-turut 3,6 orang, dan 1,9 orang (lihat Tabel 6.12). Sebaran penyerapan tenaga kerja pada kelompok sektor Industri menurut provinsi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terendah terdapat di provinsi Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 1,85 orang dan 1,76 orang, sementara penyerapan tenaga kerja tertinggi pada provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 19,7 orang. Provinsi-provinsi di kawasan Indonesia bagian timur menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada kelompok sektor Industri lebih rendah dari rata-rata penyerapan tenaga kerja nasional kecuali provinsi Kalimantan Timur (6,1 orang) dan Irian Jaya Barat (4,9 orang). Sementara sebaran penyerapan tenaga kerja pada sektor Jasa di provinsi wilayah paling timur menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai penyerapan nasional kecuali

Tabel 6.12. Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja per Unit Perusahaan/ Usaha Menurut Propinsi dan Sektor Ekonomi, Tahun 2006 (orang)

Provinsi	Industri	Jasa-jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	2,47	1,95	2,04
Sumatera Utara	4,79	1,95	2,16
Sumatera Barat	2,36	1,85	1,91
Riau	5,05	2,10	2,28
Jambi	5,69	1,95	2,23
Sumatera Selatan	3,39	1,93	2,08
Bengkulu	2,44	1,86	1,91
Lampung	3,15	1,82	2,00
Bangka Belitung	3,73	2,69	2,77
Kepulauan Riau	19,70	2,42	3,79
DKI Jakarta	15,15	2,59	3,01
Jawa Barat	5,38	1,89	2,28
Jawa Tengah	3,13	1,80	2,10
DI Yogyakarta	2,83	2,14	2,27
Jawa Timur	3,28	1,83	2,06
Banten	6,01	1,77	2,17
Bali	2,61	2,57	2,58
Nusa Tenggara Barat	2,32	1,74	1,87
Nusa Tenggara Timur	1,76	2,05	1,98
Kalimantan Barat	3,32	2,43	2,57
Kalimantan Tengah	3,46	2,10	2,23
Kalimantan Selatan	2,79	1,80	1,92
Kalimantan Timur	6,11	2,26	2,46
Sulawesi Utara	2,39	1,85	1,92
Sulawesi Tengah	2,22	1,93	1,96
Sulawesi Selatan	2,43	1,96	2,03
Sulawesi Tenggara	2,14	1,94	1,98
Gorontalo	2,08	1,61	1,68
Sulawesi Barat	1,85	1,75	1,77
Maluku	2,49	2,14	2,20
Maluku Utara	2,86	2,28	2,37
Irian Jaya Barat	4,94	2,05	2,21
Papua	3,69	2,16	2,24
Jumlah	3,60	1,90	2,20

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

6.5. Indeks Konsentrasi

Indikator Indeks Konsentrasi dapat memberikan gambaran profil perekonomian suatu daerah/ wilayah/ kawasan secara lebih mendalam dan terukur. Analisis indeks konsentrasi dapat digunakan sebagai dasar

perencanaan maupun evaluasi pembangunan wilayah untuk mencapai sasaran pembangunan. Analisis ini menggunakan tiga jenis Indeks Konsentrasi yaitu Indeks Pengganda Pemanfaatan Tenaga Kerja (PK), indeks *location quotient* (LQ) dan indeks konsentrasi (IK). Masing-masing indeks mempunyai kekuatan dan kelemahan sesuai dengan asumsi dasar dari penggunaan indeks tersebut. Banyak literatur yang membahas kelemahan dan kekuatan dari ketiga indeks tersebut dalam kajian pembangunan ekonomi regional.

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dimana perubahan struktur perekonomian suatu wilayah akan menyertai pertumbuhan tersebut. Tidak semua sektor dalam suatu perekonomian mempunyai pertumbuhan yang sama. Dengan demikian, perencanaan pembangunan ekonomi perlu memanfaatkan sektor-sektor yang dominan, yaitu yang pertumbuhannya secara rata-rata relatif lebih tinggi. Lapangan usaha atau sektor yang dominan tersebut dapat dikatakan sebagai sektor ekonomi basis dari wilayahnya, sementara sektor yang tidak dominan adalah sektor ekonomi bukan basis. Sektor basis sewajarnya berperan sebagai penggerak utama bagi setiap perubahan dan berpengaruh ganda terhadap wilayahnya.

Hasil penghitungan indeks konsentrasi (sektor basis=usaha UMKM) menunjukkan bahwa rata-rata indeks PK sebesar 5,6. Oleh karena itu, perubahan penyerapan tenaga kerja pada usaha UMKM akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja usaha berskala besar sebanyak enam kalinya. Perubahan yang meningkat dari usaha UMKM akan membentuk penambahan pendapatan yang meningkat pula. Pertambahan pendapatan yang meningkat akan menggerakkan permintaan barang dan jasa konsumsi penduduk secara agregat. Perusahaan/usaha berskala besar meningkatkan produksi barang untuk memenuhi permintaan dan peningkatan ini membutuhkan faktor produksi tenaga kerja baru lagi yang lebih banyak lagi. Indeks PK provinsi Lampung, Kepulauan Riau dan Banten mempunyai besaran melebihi dari provinsi-provinsi lainnya yaitu masing-masing 7,1; 7,4; dan 7,3 (lihat Tabel 6.13).

Tabel 6.13. Indeks Konsentrasi Usaha Menurut Provinsi dan Jenis Indeks, Tahun 2006 (%)

Provinsi	PK	LQ	IK
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	3,7	0,7	0,9
Sumatera Utara	5,6	0,9	0,8
Sumatera Barat	4,2	0,7	1,1
Riau	5,9	0,7	0,7
Jambi	3,4	1,5	0,9
Sumatera Selatan	4,3	1,2	0,8
Bengkulu	2,8	0,9	0,8
Lampung	7,1	0,9	0,8
Bangka Belitung	3,7	0,8	0,7
Kepulauan Riau	7,4	0,8	0,7
Dki Jakarta	5,0	0,7	1,2
Jawa Barat	5,6	1,3	1,0
Jawa Tengah	6,3	1,0	1,1
Di Yogyakarta	5,8	0,8	1,2
Jawa Timur	5,8	1,1	1,1
Banten	7,3	1,3	0,9
Bali	4,6	0,7	1,1
Nusa Tenggara Barat	3,1	1,0	1,2
Nusa Tenggara Timur	3,4	0,9	0,7
Kalimantan Barat	6,7	0,6	0,5
Kalimantan Tengah	6,0	0,7	0,8
Kalimantan Selatan	5,5	0,8	1,2
Kalimantan Timur	5,0	0,8	0,9
Sulawesi Utara	4,8	0,8	1,1
Sulawesi Tengah	3,0	0,8	0,8
Sulawesi Selatan	3,7	0,9	1,0
Sulawesi Tenggara	4,2	0,8	0,9
Gorontalo	4,6	1,0	1,2
Sulawesi Barat	2,7	0,8	0,9
Maluku	5,7	0,9	0,7
Maluku Utara	6,8	0,7	0,6
Irian Jaya Barat	6,6	0,7	0,7
Papua	4,8	0,7	0,6
Jumlah	5,6	1,0	1,0

Sumber : diolah dari SE06-Listing

Keterangan : Sektor Basis=usaha UMKM

Indeks LQ menunjukkan bahwa delapan provinsi mempunyai nilai satu atau lebih. LQ sebesar satu atau lebih mengindikasikan provinsi tersebut merupakan konsentrasi usaha UMKM dimana relatif penyerapan tenaga kerjanya sama atau melebihi dari rata-rata

penyerapan tenaga kerja nasional. Demikian pula dengan indeks IK menunjukkan beberapa provinsi mempunyai besaran satu atau lebih. Perpaduan antara hasil indeks LQ dan indeks IK yang besarnya satu atau lebih mendapatkan lima provinsi konsentrasi usaha UMKM, yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo. Namun demikian, kajian lebih dalam masih diperlukan di lima provinsi tersebut agar sesuai dengan gambaran perekonomian provinsinya.

<http://www.bps.go.id>

PENUTUP

7

Sensus Ekonomi 2006 (SE06), yang merupakan Sensus Ekonomi ketiga setelah tahun 1986 dan 1996 telah dapat menghasilkan data dasar yang lengkap, rinci dan up to date tentang kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Kegiatan usaha yang dicakup dalam SE06 ini meliputi seluruh kategori lapangan usaha, tidak termasuk kategori lapangan usaha Pertanian (kategori A dan B) dan kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (kategori L).

Berdasarkan hasil pendaftaran (*listing*) SE06, dari 22,7 juta perusahaan/usaha yang ada di Indonesia, Pulau Jawa terlihat mendominasi distribusi perusahaan/usaha dengan sekitar 63,80 persen perusahaan/usaha. Hal ini sejalan dengan sebaran penduduk di Indonesia, yaitu lebih dari 50 persen penduduk berdomisili di Pulau Jawa. Kemudian diikuti dengan jumlah perusahaan/usaha di Pulau Sumatera yang menduduki tempat kedua dengan 17,73 persen. Selebihnya tersebar di Pulau Bali dan Nusa Tenggara (5,32 persen), Pulau Kalimantan (4,84 persen), Pulau Sulawesi (6,97 persen), dan Pulau Maluku dan Papua (1,33 persen).

Kondisi tersebut sejalan dengan penyerapan tenaga kerja menurut pulau. Dari sekitar 49,7 juta orang, penyerapan tenaga kerja terbanyak berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 32,22 juta orang atau 64,86 persen dari seluruh tenaga kerja. Diikuti oleh Sumatera dengan persentase 17,36 persen, sedangkan sisanya tersebar di pulau lain. Ketersediaan infrastruktur yang cukup baik di pulau Jawa merupakan salah satu faktor pendorong dan pendukung berkembangnya usaha-usaha ekonomi yang juga mendorong terciptanya kesempatan kerja. Infrastruktur yang baik, seperti jalan dan telekomunikasi, akan memperlancar proses produksi maupun distribusi barang/jasa dalam wilayah yang bersangkutan.

Empat kategori lapangan usaha, masing-masing Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; serta Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi mendominasi jumlah perusahaan/usaha yang terdaftar (sekitar 80

persen). Jumlah perusahaan/usaha di kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran mencatat kontribusi terbesar yaitu 45,32 persen dari seluruh perusahaan/usaha yang ada, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 17,2 juta orang atau mencapai 34,64 persen dari total 49,7 juta tenaga kerja di Indonesia. Sementara jumlah perusahaan/usaha di tiga kategori lapangan usaha yang lain berkisar dari 11,89 persen hingga 14,20 persen. Sedangkan jumlah perusahaan di lima kategori lapangan usaha, masing-masing Listrik, Gas dan Air; Konstruksi; Perantara Keuangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga kontribusinya hanya kurang dari satu persen.

Distribusi perusahaan/usaha hasil SE06 membedakan skala usaha menjadi empat kategori, masing-masing perusahaan/usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Perusahaan/usaha mikro dan kecil sangat mendominasi, yaitu sekitar 22,5 juta perusahaan/usaha atau sekitar 99,04 persen dari seluruh perusahaan/usaha di Indonesia. Selebihnya merupakan 152 789 perusahaan/usaha berskala menengah, dan 44 038 perusahaan/usaha berskala besar. Sejalan dengan keberadaan usaha mikro dan kecil yang mendominasi perekonomian di Indonesia, komposisi jumlah tenaga kerja pada perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil juga menunjukkan penyerapan jumlah tenaga kerja terbanyak, yaitu sekitar 41,7 juta orang atau mencapai 83,95 persen.

Pendaftaran perusahaan/usaha SE06 dibedakan menurut lokasi usaha, yaitu di lokasi tidak permanen (Daftar SE06-L1) dan di lokasi permanen (Daftar SE06-L2). Dari seluruh perusahaan/usaha, 12,9 juta perusahaan/usaha berusaha di lokasi permanen (56,97 persen) dan 9,8 juta perusahaan/usaha di lokasi tidak permanen (43,03 persen). Bila dilihat tahun mulai beroperasi secara komersial khususnya pada perusahaan/usaha di lokasi permanen, 7,5 juta perusahaan/usaha (57,79 persen) beroperasi setelah tahun 1999, berarti beroperasi setelah terjadinya krisis ekonomi. Sementara perusahaan yang mulai beroperasi sebelum tahun 1997, ada sekitar 3,9 juta perusahaan (29,96 persen), dan 1,6

juta perusahaan/usaha (12,25 persen) mulai beroperasi pada periode 1997-1999. Adapun penyerapan tenaga kerja pada perusahaan/usaha yang mulai beroperasi sebelum krisis ekonomi ada sebanyak 15,8 juta orang, sedangkan pada masa krisis (tahun 1997-1999) ada sebanyak 4,4 juta orang. Sementara pada saat perekonomian mulai pulih dan masa krisis sudah mulai berakhir, penyerapan tenaga kerja tercatat empat kali lipat lebih banyak dari tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan/usaha yang mulai beroperasi pada masa krisis, yaitu mencapai 18,2 juta orang.

Perusahaan/usaha yang berbadan hukum di Indonesia ada sebanyak 1,33 juta perusahaan/usaha atau 10,25 persen dari seluruh perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen. Selebihnya 89,75 persen beroperasi tanpa bentuk badan hukum/badan usaha. Dari sejumlah perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum tersebut, menyerap tenaga kerja sekitar 63,35 persen dari keseluruhan tenaga kerja pada perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi permanen. Mengingat mayoritas perusahaan/usaha mikro dan kecil mendominasi perusahaan/usaha di Indonesia, dan umumnya perusahaan/usaha tersebut tidak berbadan hukum, maka tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan/usaha tidak berbadan hukum terlihat juga mendominasi.

Pembentukan jaringan perusahaan/usaha pada dasarnya bertujuan untuk kebutuhan ekspansi perusahaan/usaha. Namun, tidak semua perusahaan/usaha memerlukan jaringan untuk menjalankan usahanya. Hasil pendataan SE06 menunjukkan dari 12,9 juta perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat permanen, 98,64 persen atau sebanyak 12,8 juta perusahaan/usaha merupakan perusahaan/usaha dengan status usaha tunggal dan sisanya merupakan usaha dengan status jaringan yang lain (Kantor Pusat/Induk, Pabrik, Cabang, Perwakilan dan Unit Pembantu).

Perusahaan/usaha industri pengolahan lebih didominasi oleh usaha berskala mikro dan kecil, tidak berbadan hukum dan lamanya beroperasi secara komersial

sudah lebih dari 10 tahun. Jenis usaha yang mendominasi kategori lapangan usaha industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman; industri tekstil; industri pakaian jadi ; industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk meubeler) dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang galian bukan logam dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya.

Sementara sebagian besar perusahaan/usaha konstruksi adalah usaha konstruksi gedung dan bangunan sipil. Selain itu sebagian besar usaha konstruksi adalah usaha tidak berbadan hukum, non kualifikasi, memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang, lamanya beroperasi di atas 6 tahun dan tidak mempunyai tempat usaha khusus.

Secara umum, usaha perdagangan besar dan eceran lebih didominasi oleh usaha perdagangan eceran, berskala mikro, dan tidak berbadan hukum. Selain itu terlihat bahwa sebagian besar usaha perdagangan besar dan eceran berdiri setelah tahun 2000. Sementara, sebagian besar usaha transportasi adalah usaha angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa. Perusahaan/usaha transportasi didominasi oleh usaha tidak berbadan hukum dan merupakan perusahaan tunggal.

Sementara untuk kategori perantara keuangan, kategori ini didominasi oleh usaha Koperasi Simpan Pinjam dan jasa perantara moneter lainnya. Katena sebagian besar usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah usaha tunggal, maka sebagian besar perusahaan/usaha perantara keuangan merupakan perusahaan/usaha tunggal.

Hasil listing SE 2006 menunjukkan bahwa dari 2,9 juta perusahaan/usaha jasa-jasa, sekitar 49.28 persen adalah perusahaan/usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya (Kategori O). Sementara komposisi jumlah perusahaan/usaha jasa-jasa menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha jasa-jasa berskala mikro (89,46 persen), sedangkan yang

berskala kecil sekitar 10 persen. Sisanya merupakan usaha berskala menengah dan besar.

Komposisi perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil di masing-masing provinsi terlihat juga mendominasi jumlah perusahaan/usaha, mengikuti pola nasional. Sementara, bila dilihat dari perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi tidak permanen, kontribusi usaha keliling dan usaha kaki lima nampak tinggi di sebagian besar provinsi. Bahkan gabungan dari kedua jenis usaha tersebut di empat provinsi (Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam) berada di atas rata-rata nasional. Bila dilihat dari bentuk badan hukum, sebagian besar perusahaan/usaha di lokasi permanen merupakan perusahaan/usaha tidak berbadan hukum, hal ini terjadi di masing-masing provinsi, yang berkisar mulai dari 61,61 persen (Irian Jaya Barat) hingga 94,56 persen (Sulawesi Barat).

Bila dibedakan menurut kelompok sektor Industri dan kelompok sektor Jasa, secara nasional perusahaan/usaha yang termasuk dalam kelompok sektor Industri ada sekitar 14,2 persen. Komposisi perusahaan/usaha kelompok sektor Industri di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali berada di atas rata-rata nasional. Indikasi ini menunjukkan bahwa proses industrialisasi belum merata lintas wilayah.

Komposisi penyerapan tenaga kerja menurut skala usaha di masing-masing provinsi tidak jauh berbeda dengan pola nasional, kecuali di enam provinsi, yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur. Sementara di beberapa provinsi, perusahaan/usaha kaki lima menyerap lebih dari separuh kesempatan kerja pada perusahaan/usaha yang berusaha di lokasi tidak permanen. Hasil SE06 juga menunjukkan bahwa seluruh provinsi mempunyai potensi kesempatan kerja yang besar pada kelompok sektor Jasa dibandingkan kelompok sektor Industri.

Berdasarkan Indeks LQ, delapan provinsi mempunyai nilai satu atau lebih. Nilai LQ sebesar satu atau lebih,

mengindikasikan provinsi tersebut merupakan konsentrasi usaha UMKM dimana relatif penyerapan tenaga kerjanya sama atau melebihi dari rata-rata penyerapan tenaga kerja nasional. Demikian pula dengan indeks IK menunjukkan beberapa provinsi mempunyai besaran satu atau lebih. Perpaduan antara hasil indeks LQ dan indeks IK yang besarnya satu atau lebih mendapatkan lima provinsi konsentrasi usaha UMKM, yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo. Namun demikian, kajian lebih dalam masih diperlukan di lima provinsi tersebut agar sesuai dengan gambaran perekonomian provinsinya.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

**Lampiran 5.1. Distribusi Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Industri
Pengolahan menurut Golongan Pokok dan Skala Usaha, Tahun 2006 (%)**

Golongan Pokok	Jumlah Perusahaan			Jumlah Tenaga Kerja		
	Mikro Kecil	Menengah Besar	Total	Mikro Kecil	Menengah Besar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	37,76	21,17	37,58	36,60	16,74	28,86
16	1,46	5,60	1,50	3,88	6,41	4,86
17	9,34	10,41	9,35	6,85	13,09	9,28
18	3,09	10,43	3,17	4,65	11,80	7,43
19	1,00	2,94	1,02	1,56	4,59	2,74
20	24,46	7,31	24,27	19,15	7,54	14,63
21	0,12	1,49	0,13	0,16	2,71	1,15
22	1,19	3,65	1,22	1,54	1,80	1,64
23	0,00	0,20	0,01	0,01	0,23	0,09
24	0,48	3,81	0,51	0,57	4,47	2,09
25	0,47	5,20	0,52	0,56	6,38	2,83
26	9,16	6,52	9,13	11,37	3,56	8,33
27	0,04	1,15	0,05	0,08	1,48	0,63
28	2,62	3,33	2,63	3,17	2,43	2,88
29	0,15	1,56	0,16	0,22	1,46	0,70
30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02
31	0,01	0,71	0,02	0,02	1,36	0,54
32	0,01	0,84	0,02	0,02	2,99	1,18
33	0,02	0,19	0,02	0,02	0,25	0,11
34	0,03	0,93	0,04	0,06	1,64	0,67
35	0,25	1,11	0,26	0,28	1,44	0,73
36	8,24	10,87	8,27	9,07	7,40	8,42
37	0,09	0,55	0,09	0,13	0,19	0,16
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: diolah dari SE2006-Listing

**Lampiran 5.2 Jumlah dan Persentase Perusahaan/Usaha Jasa-jasa
menurut Skala Usaha, Tahun 2006**

		Perkotaan + Pedesaan						
Kode/Kategori/Golongan Pokok		Skala Usaha				Jumlah		
		Mikro	Kecil	Menengah dan Besar				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
K	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa perusahaan	721	89,14	83 994	10,39	3 805	0,47	809
	70 Real Estate	500	93,43	33 597	6,28	1 519	0,28	535
	71 Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya (tanpa operator), barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi	164	87,06	23 792	12,67	500	0,27	188
	72 Jasa Komputer dan Kegiatan Terkait	8	80,77	1 746	17,55	168	1,69	10
	73 Penelitian dan Pengembangan (Swasta)	57	32,57	77	44,00	41	23,43	175
	74 Jasa Perusahaan Lainnya	50	65,29	24 782	32,63	1 577	2,08	76
M	Jasa Pendidikan	285	83,42	54 028	15,82	2 601	0,76	342
	801 Jasa Pendidikan Dasar	236	86,46	35 976	13,21	900	0,33	272
	802 Jasa Pendidikan Menengah	9	45,89	9 513	50,44	692	3,67	19
	803 Jasa Pendidikan Tinggi	622	19,59	1 857	58,49	696	21,92	3
	809 Jasa Pendidikan Lainnya	40	85,14	6 682	14,19	313	0,66	47
N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146	81,58	31 483	17,60	1 471	0,82	179
	851 Jasa Kesehatan Manusia	143	81,74	30 591	17,45	1 421	0,81	175
	852 Jasa Kesehatan Hewan	890	85,66	145	13,96	4	0,38	1
	853 Jasa Kegiatan Sosial	2	68,42	747	29,75	46	1,83	3
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	1 241 759	90,22	132 485	9,63	2 144	0,16	1 376 388
	90 Jasa Kebersihan	541	72,17	193	25,70	16	2,13	751
	91 Kegiatan organisasi ytd	2	74,27	550	22,76	72	2,98	2
	911 Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Professional	199	49,01	174	42,86	33	8,13	406
	912 Organisasi Buruh	53	82,81	10	15,63	1	1,56	64
	919 Organisasi Lainnya	2	79,25	366	18,80	38	1,95	2
	92 Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olahraga	90	86,33	13 692	13,08	610	0,58	105
	921 Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi dan Hiburan Lainnya	32	85,52	5 141	13,89	219	0,59	37
	922 Kegiatan Kantor Berita	519	90,42	48	8,36	7	1,22	574
	923 Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Budaya Lainnya	304	67,26	117	25,88	31	6,86	452
	924 Olahraga dan Kegiatan Rekreasi Lainnya	58	86,88	8 386	12,59	353	0,53	67
	93 Jasa Kegiatan Lainnya	1 239 422	91,21	11 805	8,69	1 423	0,11	1 358 918
P	Jasa Perorangan yang melayani Rumah tangga	177	98,36	2 912	1,62	39	0,02	180
	Jumlah	2 570 314	89,08	304 902	10,57	9 834	0,35	2 885 276

Sumber: diolah dari SE06-Listing

Lampiran 5.3. Distribusi Perusahaan/Usaha Jasa-jasa Menurut Jaringan Usaha, Tahun 2006 (%)

Kode/Kategori/Golongan Pokok	Jaringan Usaha					
	Tunggal	Kantor Pusat / Induk	Cabang	Perwakilan	Unit Pembantu	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
K Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa perusahaan	99,46	0,10	0,40	0,03	0,02	100,00
70 Real Estate	99,79	0,05	0,14	0,01	0,01	100,00
71 Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya (tanpa operator), barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi	99,63	0,07	0,28	0,01	0,01	100,00
72 Jasa Komputer dan Kegiatan Terkait	98,41	0,36	1,07	0,08	0,08	100,00
73 Penelitian dan Pengembangan (Swasta)	65,71	8,00	19,43	4,57	2,29	100,00
74 Jasa Perusahaan Lainnya	96,86	0,48	2,38	0,18	0,10	100,00
M Jasa Pendidikan	95,93	0,64	3,36	0,02	0,05	100,00
801 Jasa Pendidikan Dasar	96,39	0,60	2,97	0,01	0,04	100,00
802 Jasa Pendidikan Menengah	93,31	1,04	5,47	0,07	0,11	100,00
803 Jasa Pendidikan Tinggi	78,99	3,40	16,13	0,50	0,98	100,00
809 Jasa Pendidikan Lainnya	95,45	0,55	3,93	0,04	0,04	100,00
N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,14	0,34	3,84	0,02	0,66	100,00
851 Jasa Kesehatan Manusia	95,18	0,33	3,82	0,02	0,66	100,00
852 Jasa Kesehatan Hewan	98,27	0,00	1,44	0,00	0,29	100,00
853 Jasa Kegiatan Sosial	91,12	1,75	6,57	0,16	0,40	100,00
O Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	99,65	0,04	0,28	0,01	0,01	100,00
90 Jasa Kebersihan	96,67	0,40	2,26	0,00	0,67	100,00
91 Kegiatan organisasi ytd	89,04	2,15	8,03	0,54	0,25	100,00
911 Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Professional	69,21	3,94	25,37	1,23	0,25	100,00
912 Organisasi Buruh	89,06	0,00	9,38	1,56	0,00	100,00
919 Organisasi Lainnya	93,17	1,85	4,37	0,36	0,26	100,00
92 Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olahraga	99,12	0,11	0,68	0,03	0,06	100,00
921 Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi dan Hiburan Lainnya	99,08	0,15	0,67	0,03	0,07	100,00
922 Kegiatan Kantor Berita	90,42	1,22	4,18	3,83	0,35	100,00
923 Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Budaya Lainnya	86,95	1,77	8,85	0,22	2,21	100,00
924 Olahraga dan Kegiatan Rekreasi Lainnya	99,30	0,07	0,60	0,00	0,03	100,00
93 Jasa Kegiatan Lainnya	99,72	0,03	0,24	0,00	0,01	100,00
P Jasa Perorangan yang melayani Rumahtangga	99,96	0,01	0,03	0,00	0,00	100,00
Jumlah	98,92	0,14	0,86	0,01	0,06	100,00

Sumber : diolah dari SE06-Listing

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Januari 2007*, Jakarta, 2007
- BPS, *Indikator Ekonomi Januari 2007*, Jakarta, 2007
- BPS, *Indikator Ekonomi Februari 2007*, Jakarta, 2007
- BPS, *Berita Resmi Statistik Februari 2007*, Jakarta, 2007
- BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2006*, Jakarta, 2007
- BPS, *Warta Indeks Harga Konsumen Januari 2007*, Jakarta, 2006
- Kuncoro, M., *Analisis Spasial dan Regional*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> Email : bpsHQ@bps.go.id